

PERINGATAN HARI KONSTITUSI DAN HUT KE-77 MPR RI

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.09/TH.XVI/SEPTEMBER 2022



SIDANG TAHUNAN MPR RI 2022

PANDEMI COVID-19 MEREDA SIDANG DIHADIRI MAYORITAS ANGGOTA

ISSN 0854-6371
9 770854 637158

06 **Refleksi**
Memastikan Subsidi Tepat
Sasaran Demi Sehatnya APBN

16 **Nasional**
Peringatan HUT ke-77
Republik Indonesia

39 **Selingan**
Fashion Indonesia
Diawali dari Kebaya

58 **Sosialisasi**
Azas Tunggal Sampai Mengusik
Hubungan Islam dan Indonesia



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



EMPAT PILAR MPR RI

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
NKRI Sebagai Bentuk Negara
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

INI BARU
INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI



Daftar Isi



08 BERITA UTAMA

Sidang Tahunan MPR 2022

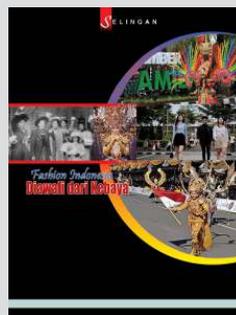
Setelah kerja keras, pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dapat mengatasi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia selama dua tahun lebih, Sidang Tahunan MPR akhirnya dapat dilaksanakan dengan dihadiri seluruh anggota MPR dan tamu undangan.



16 Nasional
Peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia



65 Sosialisasi
MPR Garda Terdepan Menjaga dan Menyelamatkan Konstitusi



39 SELINGAN
Fashion Indonesia Diawali dari Kebaya



78 Profil
Muhammad Syafrudin

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Kolom	34
Aspirasi Masyarakat	47
Gema Pancasila	48
Majelis Khusus	50
Varia MPR	68
Wawancara	72
Figur	74
Ragam	76
Dari Rumah Kebangsaan	82
Rehal	84



COVER

Edisi No.09/TH.XVI/September 2022
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

Pengantar Redaksi



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, Dyastasita,

Heri Herawan, Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Muliawan

KOORDINATOR REPORTASE

Ario Setiawan

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,

Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Bayu Nugroho, Yenita Revi,

Try Syilvani, Ikhwani Bimo F,

Amelia Rubinta

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Faridz Rizky,

Wira, Subhan

PENANGGUNG JAWAB/

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayati

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Anggun Permana,

Achmad Farobi,

Widya Permataningrum

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

Sidang Tahunan MPR Tahun 2022

MPR telah menggelar Sidang Tahunan Tahun 2022 yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR-DPD pada Selasa, 16 Agustus 2022. Sidang Tahunan MPR kali ini memang berbeda dibanding dua Sidang Tahunan sebelumnya, tahun 2020 dan 2021. Perbedaan mencolok terletak pada anggota MPR dan tamu undangan yang menghadiri Sidang Tahunan MPR. Pada tahun 2020 dan 2021, ada pembatasan jumlah anggota dan tamu undangan yang menghadiri Sidang Tahunan.

Pada tahun 2021, misalnya, Sidang Tahunan hanya dihadiri sekitar 60 orang secara fisik. Selebihnya mengikuti Sidang Tahunan MPR secara virtual. Meski demikian, Sidang Tahunan MPR tetap dihadiri Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2020 dan Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 menerapkan protokol kesehatan secara ketat (memakai masker dan menjaga jarak). Suasana cukup lengang saat penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR kala itu.

Pada tahun 2022, pandemi Covid-19 telah melewati gelombang kedua dan memperlihatkan penurunan jumlah kasus positif. Pemerintah memberikan kelonggaran-kelonggaran sehingga masyarakat bisa melakukan berbagai aktivitas seperti sediaan. Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 yang mulai reda. Namun, tetap dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, seperti tes usap atau swab PCR test untuk bisa hadir di ruang sidang paripurna. Sidang Tahunan MPR pun dihadiri mayoritas anggota MPR.

Tercatat sebanyak 435 anggota menghadiri Sidang Tahunan MPR yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR-DPD. Tidak itu saja, berbeda dengan penyelenggaraan tahun lalu, Sidang Tahunan MPR kali ini dihadiri banyak tamu undangan VVIP, di antaranya Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri, para mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Hamzah Haz, Jusuf Kalla, Boediono, para ketua umum partai politik, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para duta besar negara sahabat.

Agenda sidang paripurna ini adalah men-

dengarkan Pidato Presiden RI Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Kemerdekaan Indonesia. Dalam pidato kenegaraan itu, Presiden juga menyisipkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Sejak awal, Sidang Tahunan MPR memang dimaksudkan sebagai forum bagi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerjanya selama setahun terakhir. Masih dalam kondisi pandemi, penyampaian laporan kinerja lembaga negara diwakilkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara.

Sidang Tahunan MPR sudah dimulai pada tahun 2015 pada masa Ketua MPR Zulkifli Hasan (2014-2019) dan berlanjut setiap tahun hingga saat ini. Sidang Tahunan MPR sudah menjadi konvensi ketatanegaraan. Sebuah konvensi ketatanegaraan adalah suatu kebiasaan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan negara. Praktik ini sudah dilakukan secara terus-menerus dan menjadi satu tradisi ketatanegaraan.

Dalam hukum ketatanegaraan, selain hukum dasar yang bersifat tertulis (written constitution) juga dikenal hukum dasar tidak tertulis (unwritten constitution). Hukum dasar tidak tertulis itulah disebut konvensi ketatanegaraan. Jadi, kedudukan konvensi ketatanegaraan sesungguhnya setingkat dengan hukum dasar tertulis (konstitusi). Hampir semua negara demokrasi memiliki konvensi ketatanegaraan untuk melengkapi aturan dasar yang bersifat tertulis.

Sidang Tahunan MPR bukan sekadar acara seremonial, melainkan sarat dengan makna penting. Pertama, dalam Sidang Tahunan MPR para pelaksana kedaulatan rakyat, yakni lembaga negara menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan wewenang dan tugasnya kepada rakyat. Sidang Tahunan MPR dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan diberikan ruang untuk mengakses informasi, termasuk informasi tentang kinerja lembaga-lembaga negara. Kedua, Sidang Tahunan MPR sebagai bentuk akuntabilitas lembaga negara kepada rakyat. □

ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238,
57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



EMPAT PILAR MPR RI
 Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
 UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 NKRI Sebagai Bentuk Negara
 Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

Buku Digital MPR RI

**MUDAH DI AKSES
EFEKTIF & EFISIEN**

**MAJALAH MAJELIS, JURNAL,
PROSIDING DAN HASIL KAJIAN
MPR RI DALAM GADGET ANDA**

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDUALATAN RAKYAT

MPR.GO.ID @MPRGID

“Segera Unduh Aplikasinya!”
 DI PLAY STORE
<http://bit.ly/bukudigitalmpri>

Memastikan Subsidi Tepat Sasaran Demi Sehatnya APBN

TOLERANSI berlebihan menyebabkan persentase terbesar dari alokasi atau kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak tepat sasaran. Toleransi berlebihan itu mestinya tak boleh berulang. Demi APBN yang sehat, mekanisme penyaluran atau penjualan BBM bersubsidi perlu terus diperbarui.

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2022 sedang menanggung beban teramat berat karena besarnya alokasi pembiayaan untuk subsidi energi. Sebagaimana dipahami bersama, pemerintah melalui APBN mensubsidi BBM, LPG, dan listrik. Tujuannya untuk mendukung kegiatan produktif sebagian besar masyarakat. Untuk subsidi tiga jenis energi itu, beban APBN tahun ini mencapai Rp 502,4 triliun, sudah termasuk kompensasi untuk Pertamina dan PLN (Perusahaan Listrik Negara).

Alokasi anggaran untuk subsidi energi tahun 2022 memang sebesar Rp 208,9 triliun. Rinciannya, subsidi BBM dan LPG melalui Pertamina senilai Rp 149,4 triliun, dan subsidi listrik melalui PLN sebesar Rp 59,6 triliun. Namun, untuk merawat dan mendukung kemampuan Pertamina dan PLN menyediakan kebutuhan masyarakat akan energi yang disubsidi negara, pemerintah harus memberikan kompensasi kepada kedua BUMN itu. Kalau kompensasi itu tidak segera dipenuhi, kemampuan Pertamina dan PLN untuk menyediakan BBM, LPG, dan daya listrik bersubsidi akan terganggu.

Maka, dalam APBN 2022, dialokasikan anggaran kompensasi energi sebesar Rp 234,6 triliun. Kompensasi untuk BBM jenis solar dan pertalite sebesar Rp 213,4 triliun, sedangkan kompensasi untuk listrik Rp 21,4 triliun. Selain itu, dalam APBN tahun ini, pemerintah juga mengalokasikan kurang bayar kompensasi energi 2021 sebesar Rp 108,4 triliun. Jumlah ini meliputi kompensasi BBM Rp 83,8 triliun dan kompensasi listrik Rp 24,6 triliun. Dari perhitungan seperti itu, beban subsidi energi dalam APBN 2022 menjadi Rp 502,4 triliun.

Sudah diakui bahwa penyaluran atau penjualan BBM bersubsidi Pertalite dan solar paling sulit dikendalikan dan diawasi. Oleh Pertamina, harga jual BBM bersubsidi ditetapkan lebih rendah dari harga pasar, karena pengadaannya (impor) dibiayai dengan APBN. Untuk menjaga keseimbangan APBN, pengadaan atau belanja BBM bersubsidi pun dibatasi dengan mekanisme kuota. Karena ada kandungan subsidi negara di dalam harga jual, sudah barang tentu BBM bersubsidi pun idealnya hanya boleh dikonsumsi oleh kelompok masyarakat yang berhak.

Namun, dalam praktiknya tidak demikian. BBM bersubsidi bahkan dikonsumsi juga oleh kelompok masyarakat yang mampu. Pertamina sendiri mendapati fakta bahwa sebagian besar BBM subsidi dikonsumsi kalangan masyarakat mampu. Tidak kurang dari 60% konsumen yang membeli dan menggunakan BBM subsidi adalah kelompok masyarakat mampu atau kalangan kaya. Mereka yang 60% ini mengonsumsi sedikitnya 80% dari BBM subsidi yang dipasok ke pasar.

Sisanya, atau 40% konsumen dari kalangan yang berkekurangan, hanya mengonsumsi 20% BBM subsidi. Penyaluran subsidi negara yang tidak tepat sasaran ini bisa terjadi karena adanya toleransi yang berlebihan dalam proses penyaluran atau penjualan BBM subsidi.

Akibat toleransi berlebihan itu, kuota BBM subsidi otomatis terkuras. Bahkan, per Juli 2022, Pertamina sendiri mulai cemas karena kuota BBM bersubsidi mulai menipis. Dari kuota 14,9 juta kilo liter untuk BBM subsidi jenis solar, sudah disalurkan 9,9 juta kilo liter. Dan, dari kuota 23 juta kilo liter untuk BBM jenis Pertalite, sudah disalurkan sebanyak 16,8 juta kilo liter.

Tentu saja sangat beralasan jika pemerintah pun gelisah, karena sisa kuota BBM subsidi itu dikhawatirkan habis sebelum berakhirnya tahun anggaran ini. Kalau kuota BBM subsidi habis

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI



sebelum berakhirnya tahun anggaran sekarang ini, dinamika di ruang publik bisa berubah menjadi tidak kondusif. Publiknya biasanya bereaksi karena faktor kelangkaan BBM atau tingginya harga BBM. Lagi pula, atas nama disiplin anggaran, hampir tidak mungkin pemerintah tahun ini menambah lagi anggaran untuk subsidi energi, khususnya BBM.

Kegelisahan itulah yang mendorong pemerintah mewacanakan kebijaksanaan untuk menaikkan harga BBM. Namun, diyakini bahwa pemerintah tidak akan gegabah. Sejumlah aspek pasti tetap diperhitungkan oleh pemerintah. Sebab, menaikkan harga jual BBM selalu menimbulkan efek domino yang dampaknya pun tak kalah seriusnya. Misalnya, dampak pada percepatan laju inflasi hingga memperlemah daya beli masyarakat kebanyakan. Sebab, menaikkan harga energi berkonsekuensi logis pada naiknya biaya produksi dan distribusi, untuk kemudian berujung pada naiknya harga barang dan jasa.

Sambil menunggu keputusan pemerintah, sangat relevan untuk menggarisbawahi penjelasan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, baru-baru ini. Menteri ESDM menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan sejumlah opsi agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Selain itu, Menteri ESDM juga menegaskan, Pemerintah berkomitmen untuk tetap mengupayakan ketersediaan BBM untuk masyarakat.

Dari penjelasan itu, dapat dipastikan bahwa

pemerintah akan tetap menyediakan BBM bersubsidi. Sejumlah opsi yang sedang dirancang semata-mata bertujuan meningkatkan efektivitas penyaluran BBM bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran. Penyaluran BBM subsidi yang efektif tidak akan mengganggu keseimbangan APBN. Boleh jadi, tidak ada lagi toleransi berlebihan terhadap mereka yang sesungguhnya tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi.

Subsidi negara termasuk subsidi energi kepada kelompok masyarakat yang berkekurangan tak akan pernah dihentikan. Subsidi atau jaring pengaman sosial dari negara untuk melindungi rakyat akan selalu ada. Selain karena fakta bahwa tidak sedikit warga yang masih berselimut kemiskinan, pemerintah pun menyadari bahwa hari-hari ini perekonomian semua elemen masyarakat belum sepenuhnya pulih dari kerusakan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang durasinya lebih dari dua tahun. Pemerintah diyakini tidak akan menerapkan kebijakan baru yang berdampak pada kenaikan biaya produksi.

Hari-hari ini, ketika harga minyak melambung di level 100 dolar AS per barel, penyaluran BBM subsidi harus efektif agar keseimbangan APBN tetap terjaga. Jangan lupa bahwa pengadaan atau belanja BBM subsidi itu melalui mekanisme impor.

Maka, kendati penyaluran BBM subsidi sulit dikendalikan dan diawasi, harus ada tekad untuk menghentikan toleransi berlebihan bagi mereka yang sesungguhnya tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi. □

Sidang Tahunan MPR 2022

Pandemi **Covid-19** Mereda, Sidang Tahunan MPR Dihadiri Mayoritas Anggota



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Setelah kerja keras, pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dapat mengatasi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia selama dua tahun lebih, Sidang Tahunan MPR akhirnya dapat dilaksanakan dengan dihadiri seluruh anggota MPR dan tamu undangan.

NUANSA merah putih mewarnai landscape di sekitar Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta. Bidang taman terbuka di depan air mancur ditanami bunga-bunga berwarna merah dan putih. Pun tanaman di sekitar pintu masuk Gedung Nusantara, tempat sidang paripurna, berwarna merah dan putih.

Karpet merah panjang digelar mulai dari tepi jalan aspal hingga masuk pintu utama di lobi Gedung Nusantara atau dikenal juga dengan Gedung Hijau atau Gedung Kura-Kura. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin serta tamu-tamu undangan yang mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD melewati bentangan karpet merah itu.

Nuansa serupa juga terlihat di lobi Gedung Nusantara. Di bagian muka dan dalam Gedung Nusantara tampak kental dengan hiasan bernuansa Hari Kemerdekaan dan Parliametary 20 (P20). Sidang Tahunan MPR 2022 ini mengusung tema Nusantara, yaitu batik kawung khas Yogyakarta yang ditampilkan di dalam lobi Gedung Nusantara. Gambar batik kawung menghiasi dinding di Lobi Gedung Nusantara.

Pada Selasa, 16 Agustus 2022, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Sidang Tahunan atau Sidang Paripurna MPR dengan agenda mendengarkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Sidang Tahunan MPR

dirangkai dengan Sidang Bersama DPR – DPD dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia menyambut HUT Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pidato kenegaraan itu, Presiden sebagai Kepala Negara juga menyisipkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara.

Suasana pada Selasa pagi, sejak pukul 06.00 WIB sudah terlihat kesibukan pengamanan Gedung MPR/DPR/DPD. Petugas keamanan sudah standby, terutama di pintu utama depan Jalan Gatot Subroto. Tampak mobil polisi mulai merapikan barisan parkir. Petugas pengamanan dalam (Pamdal) MPR/DPR/DPD berseragam hitam pun berkoordinasi dengan aparaturnya Polri. Pamdal didampingi aparaturnya Polri sudah mulai melakukan pemeriksaan di pagi itu.

Pejalan kaki yang masuk melalui pintu di depan Stasiun Palmerah tak luput dari pemeriksaan. Petugas keamanan berseragam hitam pun memeriksa kartu tanda pengenal (ID) setiap orang yang masuk ke kompleks Parlemen. Tanpa ID, tidak boleh masuk kompleks Parlemen. Begitu juga pemeriksaan terhadap awak media yang meliput. Ada ID khusus bagi awak media peliput Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR – DPD. ID untuk media pun sangat terbatas.

Memang, dibanding tahun-tahun sebelumnya, pengamanan Sidang Tahunan MPR kali ini lebih ketat. Gedung MPR/DPR sudah dijaga ketat aparat keamanan. Sejak pukul 07.45 WIB Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) terlihat bersiaga di kompleks parlemen. Sejumlah



aparatus keamanan dari kepolisian dan TNI juga ikut berjaga mulai dari lingkaran terluar hingga Ring 1 (dekat tempat Ruang Sidang Paripurna). Hanya orang dengan tanda pengenalan khusus diizinkan masuk ke dalam Gedung Kura-Kura.

Beberapa kendaraan khas militer terlihat terparkir di sejumlah lokasi, termasuk di sekitar Gedung Kura-Kura. Tampak sejumlah mobil huru-hara dan sejumlah kendaraan lapis baja dari TNI-Polri, seperti kendaraan taktis (Rantis) dan mobil Gegana Polri. Mobil Ambulance dari RSPAD juga disiagakan di lokasi. Tampak juga dua helikopter TNI Angkatan Udara (AU) yang sudah *stanby* di lapangan pendaratan (helipad) di sisi dekat lapangan bola kompleks Parlemen.

Menurut Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Komaruddin, sebanyak 4.642 personel gabungan TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk mengamankan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD. "Mereka diterjunkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pagi hari sampai dengan malam hari," kata Komaruddin ketika memimpin Apel Pengamanan Pidato

Kenegaraan RI di halaman Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, seperti dilansir *Antara*.

Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD kali ini memang berbeda dengan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 dan 2021, Sidang Tahunan MPR diselenggarakan di tengah kasus positif Covid-19 yang masih tinggi. Pada waktu itu, peserta Sidang Tahunan MPR, baik tamu undangan maupun anggota MPR, sangat dibatasi dan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dilaksanakan secara virtual atau daring. Suasana lebih lengang. Protokol kesehatan mulai dari tes PCR, memakai masker, dan menjaga jarak, secara ketat diterapkan pada peserta sidang yang hadir secara fisik.

Pada tahun 2022, pandemi Covid-19 sudah melewati puncak gelombang kedua. Pandemi mulai mereda. Pemerintah mulai memberi kelonggaran-kelonggaran. Masyarakat pun melakukan aktivitas seperti biasa. Pun dengan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR 2022. Kali ini, tak ada pembatasan kehadiran dalam Sidang Tahunan MPR. Seluruh anggota MPR dan para undangan

bisa hadir secara fisik mengikuti Sidang Tahunan MPR. Meski demikian, ada persyaratan untuk masuk dalam ruang sidang paripurna untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR.

"Mengingat pandemi Covid-19 yang sudah mereda, maka Sidang Tahunan MPR 2022 sekaligus Sidang Bersama DPR dan DPD dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota MPR dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Semua yang hadir, baik petugas sidang dan undangan, diwajibkan melakukan tes usap/swab PCR test dengan hasil negatif selama maksimal 2 x 24 jam," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo ketika mengikuti geladi resik pelaksanaan Sidang Tahunan MPR pada Senin, 16 Agustus 2022.

Kewajiban melakukan tes usap atau swab PCR test ini berlaku bagi tamu undangan yang hadir, antara lain pimpinan lembaga negara, mantan presiden dan wakil presiden, menteri kabinet Indonesia maju, Panglima TNI, Kapolri, duta besar negara sahabat, para mantan pimpinan MPR/DPR/DPD, serta tamu undangan lainnya.



Pakaian Adat

Sejak pukul 08.00 WIB sejumlah anggota dan tamu undangan mulai berdatangan ke Gedung Nusantara. Para duta besar negara sahabat terlihat sudah tiba di gedung tersebut pukul 09.45 WIB. Mereka yang sudah terlihat masuk gedung di antaranya duta besar dari Kanada, Amerika Serikat, Arab Saudi, Palestina, Australia, Singapura, Selandia Baru, dan Uni Eropa.

Sebelumnya, menteri Kabinet Indonesia Maju telah datang lebih dulu, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, dan sejumlah anggota MPR RI.

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin didampingi Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin tiba di Gedung Nusantara sekitar pukul 08.50 WIB. Mereka tampak serasi. Wapres mengenakan pakaian khas keraton Surakarta dan Ibu Wury mengenakan pakaian nasional kebaya berwarna hijau. Tahun lalu, ketika menghadiri Sidang Tahunan MPR, Wapres mengenakan busana adat Suku Mandar asal Sulawesi Barat, kali ini Wapres hadir dengan busana adat Solo, Jawa Tengah.

Pakaian Wapres berupa setelan Sikepan hitam dipadu dalam putih dengan hiasan rantai arloji di dada ditambah lambang kepresidenan. Wapres juga memakai Blangkon Trepes (rata bagian belakang). Adapun bawahannya, Wapres memakai kain jarik batik cokelat motif Sidomukti dan selop berwarna emas. Sementara, Ibu Wury juga tampak anggun mengenakan kebaya kartini bernuansa hijau dipadu dengan kerudung berwarna senada. Bawahannya memakai

kain batik ditambah selendang berwarna gelap.

Sekitar pukul 08.58 WIB, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana tiba di Gedung Nusantara. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia itu diiringi musik dari marching band Kepolisian Republik Indonesia. Presiden mengenakan pakaian adat daerah Bangka Belitung. Jokowi juga mengenakan masker coklat. Pakaian adat dari Bangka Belitung ini disebut juga baju Seting. Pakaian Seting yang digunakan Presiden berwarna hijau, lengkap dengan hiasan ikat pinggang dan hiasan bahu.

Pada bagian depan pakaian terdapat manik-manik berwarna keemasan yang dibordir menggambarkan unsur kebudayaan. Konon, pakaian Seting merupakan pakaian khas Bangka yang terbuat dari sutera atau beludru. Presiden Jokowi juga tampak gagah lengkap dengan topi khas adat Bangka Belitung.

Meski Presiden menggunakan pakaian adat, tidak demikian dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Ibu Iriana Jokowi mengenakan kebaya dominan merah muda. Ibu Iriana tampil simpel dan anggun dengan kebaya berwarna pink lengkap dengan selendangnya dan jarik khas Jawa.

Sebelum memasuki Gedung Nusantara, Presiden Jokowi sempat menyapa awak media. Di lobi Gedung Nusantara, kehadiran Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti. Wapres K.H. Ma'ruf Amin juga menyambut kedatangan Presiden dan Ibu

Negara.

Ketua DPR Puan Maharani tampak mengenakan kebaya Kutubaru berwarna terakota. Warna ini dipilih sebagai simbol optimisme dalam menyambut HUT Ke-77 Kemerdekaan RI. Baju Puan Maharani di desain oleh Didiet Maulana. "Kami memberikan warna terakota yang cerah untuk menggambarkan semangat optimisme, dan juga memberikan suatu warna yang segar dan fresh, cocok warna ankin berwarna merah hati yang terinspirasi motif klasik Jawa," kata sang desainer dikutip melalui rilis tertulis.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti mengenakan pakaian setelan jas hitam. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman juga mengenakan pakaian yang senada. Selanjutnya, mereka berfoto bersama sebelum memasuki ruang tunggu.

Di dalam ruang sidang paripurna tampak para anggota MPR dan tamu undangan sudah menempati tempat duduk masing-masing. Berdasarkan tayangan TVR Parlemen, tampak hadir Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Megawati duduk berada di sisi paling kanan dari deretan mantan presiden dan wakil presiden yang hadir dalam Sidang Tahunan MPR kali ini.

Berturut-turut duduk di sebelah kiri Megawati, yakni Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden Ke-9 Hamzah Haz, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden Ke-11 Boediono. Try Soetrisno, Jusuf Kalla, dan Boediono tampak



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

mengenakan jas warna hitam gelap, sedangkan Hamzah Haz mengenakan jas warna abu-abu terang.

Selain mantan presiden dan wakil presiden, sejumlah ketua umum partai politik juga menghadiri Sidang Tahunan MPR, antara lain Ketua Umum Partai Gerindra H. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tampak hadir juga pimpinan lembaga negara (MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY), para menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri.

Tepat pukul 09.28 WIB, Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MK, Ketua BPK, Ketua MA, Ketua BPK, dan Ketua KY mendampingi Presiden dan Wakil Presiden RI memasuki Ruang Sidang Paripurna. Anggota MPR dan tamu undangan yang hadir berdiri dan bertepuk tangan. Presiden dan Wakil Presiden berjalan menuju tempat duduk yang telah disediakan di sisi kanan dan kiri meja pimpinan sidang. Di meja pimpinan sidang hanya ada Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.

Masih dalam posisi berdiri, rangkaian sidang paripurna pun dimulai dengan diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi Gita Bahana Nusantara. Berikutnya, mengheningkan cipta dipimpin Ketua MPR. Usai mengheningkan cipta, hadirin dipersilakan duduk. Tepat pukul 09.38 WIB, Ketua MPR Bambang Soesatyo sebagai Pimpinan Sidang membuka secara resmi Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2022, sekaligus memberikan pengantar sidang.

Sidang Tahunan MPR dihadiri sekitar 61% anggota MPR. "Dari daftar hadir yang kami terima, sudah ada 435 anggota dari total 711 anggota MPR sehingga sudah memenuhi kuorum untuk dibuka," kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo. Agenda utama Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI adalah untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden menyambut HUT Ke-77 Kemerdekaan Indonesia.

Dalam pidato pengantarannya, Bamsoet mengawali dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Waa



Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, bangsa Indonesia diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas konstitusional masing-masing dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

"Rasa syukur yang mendalam juga patut kita persembahkan. Setelah lebih dari dua tahun dilanda pandemi Covid-19, berkat kerja keras Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa, kita dapat mengatasi pandemi secara baik. Kita bisa pulih lebih cepat, dan bangkit lebih kuat. Sehingga pada hari ini, kita pun dapat melaksanakan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, dihadiri oleh seluruh Anggota MPR/DPR/DPD, serta undangan lainnya," katanya.

Bamsoet juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, serta seluruh Pimpinan Lembaga Negara, atas kehadiran memenuhi undangan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD.

Dalam forum itu, Bamsoet mengingatkan tentang Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2022, bangsa Indonesia akan memasuki usianya yang ke-77 tahun. "Sudah sepatutnya kita memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pejuang bangsa, yang telah mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwanya, sehingga sampailah kita kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan

Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," tambahnya.

Bamsoet mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menggelorakan semangat kemerdekaan dan perjuangan para pahlawan bangsa. "Menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, setelah 77 tahun Indonesia merdeka, kita lahirkan generasi muda yang tangguh, unggul, bersatu, dan optimistis, sehingga memiliki kesiapan untuk mengambil alih estafet kepemimpinan nasional, guna mewujudkan cita-cita bangsa menuju era Indonesia Emas 2045," tandasnya.

Pada kesempatan itu Bambang juga memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang telah membawa pemulihan ekonomi sehingga bisa menggelar Sidang Tahunan dan Sidang bersama DPR DPD RI.

Bambang juga melantunkan pantun "Ada burung di atas dahan, dahanya ada di pohon beringin, saya ucapkan salam pembukaan kepada semua hadirin. Agustus bulan kemerdekaan gotong royong menjadi kekuatan agar RI sukses menyongsong kemerdekaan terus jaga persatuan dan kesatuan, Merdeka!"

Selesai menyampaikan pidato pengantar, rangkaian sidang paripurna dilanjutkan dengan Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR-DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian dilanjutkan Pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta Pidato HUT Ke-77 Republik Indonesia. □

DER/BSC

Sidang Tahunan MPR 2022

Ketua MPR: Ancaman Krisis Global Sudah di Depan Mata

Ada dua garis besar penting yang disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR. Dua hal penting itu adalah strategi Indonesia menghadapi ancaman (krisis) global dan urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MPR menggelar Sidang Tahunan MPR pada Selasa, 16 Agustus 2022, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Di tengah pandemi Covid-19 yang mereda, Sidang Tahunan MPR ini dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wapres RI ke-11 Budiono, para ketua umum partai politik, para menteri kabinet, pimpinan lembaga negara, dan para duta besar.

Ketua MPR Bambang Soesatyo membuka Sidang Tahunan MPR yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR-DPD. Dalam pengantar pada Sidang Tahunan MPR, Bambang Soesatyo menyampaikan banyak hal. Namun, ada dua garis besar penting yang disampaikan Bambang Soesatyo dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR. Dua hal penting itu adalah strategi Indonesia menghadapi ancaman (krisis) global dan urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, mengingatkan semua pihak terjadinya krisis

global akibat perang Ukraina dengan Rusia yang berdampak kepada sektor ekonomi Indonesia, termasuk ancaman inflasi nasional yang terus merangkak naik. "Kondisi global saat ini semakin tidak menentu. Semua negara sedang berupaya keras memulihkan ekonominya, pasca pandemi Covid-19. Namun, fase ini terganggu oleh dinamika global, seperti konflik Rusia-Ukraina, perang dagang dan teknologi Amerika Serikat-Tiongkok, ketegangan baru di Selat Taiwan, serta disrupsi rantai pasok yang berimplikasi pada fluktuasi harga komoditas pangan dan energi," kata Bamsoet mengawali pidatonya.

Menurut Bamsoet, perang dengan alasan apa pun, selalu membawa petaka, kehancuran, dan kesengsaraan, menghancurkan peradaban yang telah dibangun berabad-abad lamanya, membawa krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi. "Menurut Badan Pengungsi PBB, UNHCR, dalam kurun waktu kurang dari dua bulan sejak pasukan Rusia memulai perang di Ukraina, sebanyak 5 juta warga Ukraina telah meninggalkan negara mereka. Warga Ukraina kini merupakan kelompok pengungsi kedua terbesar di dunia, setelah

pengungsi Suriah yang jumlahnya mencapai 6,8 juta," kata mantan Ketua DPR ini.

Mengutip data IMF dan Bank Dunia, Bamsoet menyebutkan, perekonomian 66 negara diprediksi akan bangkrut dan ambruk. Pelambatan dan kontraksi pertumbuhan ekonomi global semakin diperburuk oleh tingginya kenaikan inflasi.

"Beruntung berdadasaarkan hasil survei Bloomberg, Indonesia dinilai sebagai negara dengan resiko resesi yang kecil, hanya tiga persen, jauh jika dibandingkan dengan rata-rata negara Amerika dan Eropa, yang mencapai 40 hingga 55%, ataupun negara Asia Pasifik pada rentang antara 20 hingga 25%. Namun demikian, kita tidak boleh lalai. Kenaikan inflasi dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional," tutur pengurus KADIN Indonesia ini.

Mengutip Badan Pusat Statistik, Bamsoet menyampaikan bahwa per Juli 2022, laju inflasi Indonesia berada di level 4,94%, dan pada bulan Agustus diprediksi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6%. "Bahkan pada bulan September 2022, kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiperinflasi, dengan angka inflasi pada kisaran

10 hingga 12%. Laju kenaikan inflasi, disertai dengan lonjakan harga pangan dan energi, semakin membebani masyarakat, yang baru saja bangkit dari pandemi Covid-19,” imbuh Bamsuet.

PPHN

Terkait PPHN, Bamsuet menegaskan, bangsa Indonesia membutuhkan peta jalan pembangunan guna menjamin ketahanan nasional serta merealisasikan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, peta jalan pembangunan diperlukan untuk lebih menjamin kesinambungan pembangunan, tanpa bergantung pada momen elektoral lima tahunan.

“Pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dipatuhi oleh pemerintahan periode-periode berikutnya, menjadi aspek krusial untuk mengarahkan pembangunan, khususnya untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Termasuk di dalamnya pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tidak boleh terhenti karena adanya penggantian kepemimpinan nasional,” paparnya.

Dia menjelaskan, hadirnya PPHN tidak akan mengurangi sistem presidensial yang telah disepakati bersama. Tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan PPHN kepada MPR. Adanya PPHN, justru akan menjadi payung ideologis dan konstitusional bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045.

“Jika PPHN disepakati oleh seluruh komponen bangsa maka calon Presiden dan calon Wakil Presiden, calon Gubernur, dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati/Walikota, dan calon Wakil Bupati/Walikota, tidak perlu menetapkan visi dan misinya masing-masing. Tetapi, seluruhnya memiliki visi dan misi yang sama, yaitu visi dan misi sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Bamsuet menerangkan, Badan Pengkajian MPR dengan mendasarkan pada aspirasi

masyarakat dan daerah telah menyelesaikan kajian substansi dan bentuk hukum PPHN. Hasilnya, telah disampaikan kepada Pimpinan MPR pada tanggal 7 Juli 2022, serta telah dilaporkan dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, pada tanggal 25 Juli 2022 yang lalu.

“Badan Pengkajian MPR merekomendasikan, untuk menghadirkan PPHN tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat urgensinya berkaitan dengan momentum lima tahunan, gagasan menghadirkan PPHN yang

memiliki peta jalan pembangunan, yang memberi arah pencapaian tujuan negara, dengan mempertemukan nilai-nilai Pancasila dengan aturan dasar yang diatur konstitusi,” pungkas Bamsuet.

Di akhir pidato pembuka, Bamsuet berkesempatan memberikan pantun dan menyinggung kontestasi Pemilu Serentak 2024. Dalam pantunnya, Bamsuet berpesan pada capres-cawapres agar tak terburu-buru unjuk diri, meniru pesan Jokowi sebelumnya.

“Kupu-kupu terbang bersama kumbang, hinggap di dahan pohonnya palsu. Para



diatur melalui Ketetapan MPR, cara menghadirkannya akan diupayakan melalui konvensi ketatanegaraan,” urai Bamsuet.

Dia menambahkan, dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, secara aklamasi menerima hasil kajian substansi dan bentuk hukum PPHN. Untuk menindaklanjuti kajian substansi dan bentuk hukum PPHN, pada awal bulan September akan datang, MPR akan menyelenggarakan Sidang Paripurna, dengan agenda tunggal pembentukan Panitia Ad Hoc MPR.

“Dengan kesepakatan Rapat Gabungan tersebut, kita memiliki harapan untuk menuntaskan Rekomendasi MPR tentang PPHN yang telah melewati dua periode keanggotaan MPR. Dan, yang paling utama, dengan adanya PPHN, maka Indonesia akan

capres-cawapres tak perlu bimbang, ingat pesan Presiden ojo kesusu,” kata Bamsuet yang disambut tepuk tangan hadirin.

Tak hanya itu, Bamsuet juga menyinggung koalisi pilpres dalam pantun lainnya. Ia berpesan kepada para tamu undangan agar tak terpecah belah pada pemilu mendatang. “Burung merpati terbang di atas sawah, purnama datang dari negeri sebelah. Koalisi masih bisa berubah, pemilu jangan sampai membuat kita terbelah,” tuturnya.

Bambang mengatakan, dua buah pantun itu ia sampaikan demi menggugah kesadaran semua pihak dalam berbangsa dan bernegara. Setelah menyelesaikan pidatonya, Bambang menyerahkan palu sidang kepada Ketua DPR Puan Maharani yang akan melanjutkan memimpin sidang. □

BSC

Sidang Tahunan MPR 2022

Presiden Jokowi Apresiasi MPR Telah Mengkaji Substansi dan Bentuk Hukum PPHN

Presiden mengapresiasi kinerja dan upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, serta menggagas kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan global.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PRESIDEN Joko Widodo menghadiri Sidang Tahunan MPR yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR-DPD di Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara atau Gedung Hijau atau Gedung Kura-Kura, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 16 Agustus 2022. Presiden memakai baju adat Bangka Belitung bernuansa hijau lengkap dengan aksesoris dan tutup kepala. Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2022 dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan RI.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengharapkan dukungan semua lembaga negara untuk membangun demokrasi dan memperkokoh ideologi bangsa. Dalam kaitan itu Presiden mengapresiasi kinerja dan upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, serta menggagas kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan global. "Saya mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan

membangun demokrasi di negeri tercinta ini untuk memperkokoh ideologi bangsa," katanya.

Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD ini dihadiri Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin, Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, Pimpinan DPD, Presiden Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri, para mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Hamzah Haz, Jusuf Kalla, dan Boediono, para duta besar negara sahabat, menteri kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan para Ketua Umum Partai Politik, dan 435 anggota MPR.

Sebelumnya, dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan, vaksinasi ideologi berupa sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau lebih dikenal istilah Empat Pilar MPR yang dimandatkan kepada MPR adalah tugas mulia yang harus dilakukan sepanjang hayat.

Selain itu, Bamsuet, sapaan Bambang Soesatyo, juga menyebutkan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD secara aklamasi

menerima hasil kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara. Sebagai tindaklanjutnya, pada awal September 2022, MPR akan menyelenggarakan Sidang Paripurna dengan agenda pembentukan Panitia Ad Hoc setelah mendengarkan pandangan umum fraksi dan kelompok DPD.

Presiden Jokowi mengapresiasi upaya MPR tersebut. "Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global," katanya.

Selain menyampaikan apresiasi kepada MPR, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi kinerja lembaga-lembaga negara lainnya. "Dukungan DPR dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian telah sangat membantu Pemerintah. DPR telah mendukung beberapa transformasi besar, antara lain UU IKN dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Presiden.

Sedangkan apresiasi kepada DPD, Presiden mengatakan, sesuai kewenangannya DPD telah ikut berperan dalam penyusunan beberapa rancangan undang-undang, terutama terkait dengan Otonomi Khusus dan pembentukan provinsi baru.

Presiden juga mengapresiasi Mahkamah Agung yang telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. "MA terus mengedepankan keadilan restorative. MA juga telah meningkatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat," ujarnya.

Sama halnya, Presiden menyebutkan MK juga telah meningkatkan pelayanan penegakan konstitusi secara efektif. "Sistem

peradilan berbasis elektronik semakin memudahkan akses masyarakat. Peran MK sebagai tuan rumah Kongres MK sedunia, juga patut diapresiasi,” tutur Presiden.

Apresiasi yang sama disampaikan untuk Komisi Yudisial yang telah memberikan layanan prima dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa. Penanganan laporan terkait lembaga peradilan telah mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Sedangkan apresiasi kepada BPK, Presiden menyebutkan, BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. “Ini sangat membantu pemerintah. Rencana penyelenggaraan Supreme Audit Institution (SAI)-20 juga semakin memperkokoh kepemimpinan Indonesia di G20,” kata Presiden.

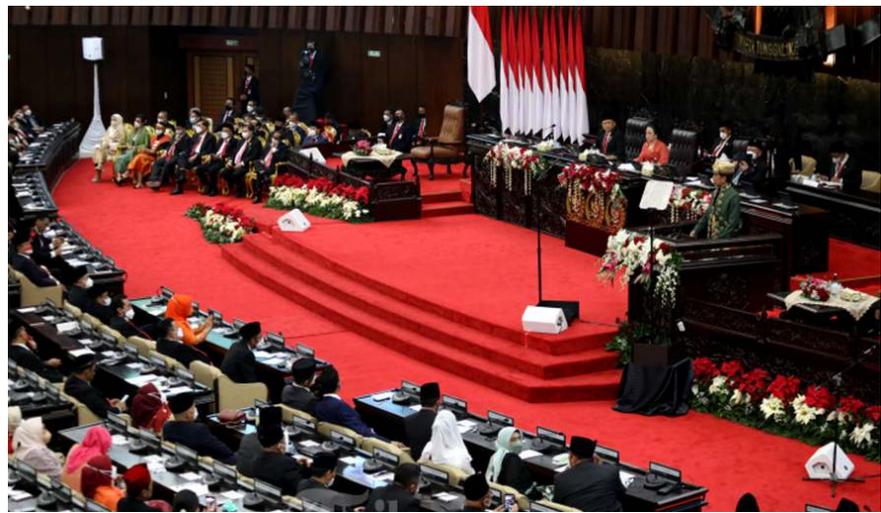
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga nasional yang lain, sesuai wewenang dan perannya. Terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia, kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, juga kepada Komnas HAM dan Lembaga-lembaga nasional lainnya,” imbuhnya.

Pada bagian lain, Presiden Jokowi menegaskan ada lima agenda besar yang menjadi komitmen pemerintah untuk terus dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju, dan membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. “Saya tegaskan kembali, agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan,” ujarnya.

Berikut ini rangkuman lima agenda besar yang ditekankan oleh Presiden Jokowi untuk terus dilaksanakan, dilansir dari situs resmi Setkab RI. *Pertama*, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Dalam hal ini Presiden Jokowi mencontohkan hilirisasi nikel yang dilakukan telah meningkatkan ekspor besi baja sebesar 18 kali lipat. Ekspor

besi baja meningkat dari sekitar Rp 16 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 306 triliun di tahun 2021.

“Di akhir tahun 2022 ini, kita berharap sudah bisa mencapai Rp 440 triliun. Itu hanya dari nikel, sekali lagi itu hanya dari nikel. Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil,”



ujarnya. Setelah nikel, tutur Presiden, pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi bauksit, tembaga, hingga timah.

Kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau. Presiden menyampaikan, persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove serta rehabilitasi habitat laut harus terus dilakukan, karena akan menjadi potensi besar pada penyerapan karbon. Presiden pun optimistis energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio akan menarik industri penghasil produk-produk rendah emisi. Upaya tersebut, kata Presiden, dapat langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio.

Ketiga, penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Presiden menyampaikan, pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal harus terus dijamin, dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu.

Secara khusus, Presiden menekankan

bahwa pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Presiden menambahkan, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. Selain itu, reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah juga harus terus dilanjutkan.

Keempat, melanjutkan digitalisasi ekonomi

agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia segera naik kelas. Presiden menyampaikan, sampai saat ini sebanyak 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital. Pemerintah pun menargetkan sebanyak 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024.

Terakhir, *kelima*, keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden menyampaikan, IKN bukan hanya untuk para aparatur sipil negara, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. “(IKN) bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80% investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi,” ujarnya.

Menutup pidatonya Presiden mengajak seluruh pihak untuk bahu-membahu mewujudkan agenda besar tersebut. □

BSC

Peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia

Bamsoet Ajak
**Seluruh Elemen Bangsa Wujudkan
 Tujuan Indonesia Merdeka**



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menyatakan, menuju Indonesia Emas tahun 2045, bangsa Indonesia akan menghadapi banyak perubahan yang mengandung peluang dan tantangan. Munculnya berbagai kecenderungan baru berskala global dengan daya dorong besar, menuntut watak politik yang lebih antisipatif dengan haluan berjangka panjang.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menghadiri upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara dengan mengenakan pakaian adat Bali. Bamsoet mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pejuang bangsa yang telah mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwanya dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan.

Dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Bamsoet mengajak seluruh elemen bangsa menggelorakan semangat mewujudkan tujuan Indonesia merdeka, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Serta melaksanakan amanah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, setelah 77 tahun Indonesia merdeka, kita harus terus melahirkan generasi muda yang tangguh, unggul, bersatu, dan optimistis. Sehingga memiliki kesiapan untuk meneruskan estafet kepemimpinan nasional, guna mewujudkan cita-cita bangsa menuju era Indonesia Emas 2045,” ujar Bamsoet usai menghadiri upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di Istana Negara, Rabu (17/8/22).

Turut hadir Presiden Joko Widodo sebagai Inspektur Upacara, Kolonel Laut (P) Andike Sry Mutia sebagai Komandan Upacara, serta Tim Paskibraka Pancasila Tangguh antara lain Komandan Paskibraka Rafly Tri Aditama, pembawa bendera Merah Putih I Dewa Ayu Firsty Meita Dewangi, pembentang bendera Merah Putih Mario Adhiyaksa Sihombing, dan pengerek bendera Merah Putih Bramantya Rizky Wiratama. Hadir pula Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin beserta para



menteri kabinet.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, menuju Indonesia Emas tahun 2045, bangsa Indonesia akan menghadapi banyak perubahan yang mengandung peluang dan tantangan. Munculnya berbagai kecenderungan baru berskala global dengan daya dorong besar, menuntut watak politik yang lebih antisipatif dengan haluan berjangka panjang.

“Berangkat dari kenyataan seperti itu, perlu ada pemikiran untuk mengingatkan serta menunjukkan peta jalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan. Jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional, dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi Negara Ke-

satunya Republik Indonesia. Sekaligus jalan pembangunan yang lebih menjamin kesinambungan pembangunan, tanpa bergantung pada momen elektoral lima tahunan, termasuk di dalamnya pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang tidak boleh terhenti karena adanya penggantian kepemimpinan nasional,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang. Guna mewujudkan IKN menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep smart, green, blue city, serta hub bagi perekonomian nasional dan regional, dibutuhkan haluan negara serta konsistensi lintas peme-

rintahan. Tidak hanya itu, pembangunan IKN diharapkan menjadi katalis, untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi.

“Pembentukan haluan negara yang dipatuhi oleh pemerintahan periode-periode berikutnya, menjadi aspek krusial untuk mengarahkan pembangunan, khususnya untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara tidak akan mengurangi sistem presidensial yang telah kita sepakati bersama. Tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan PPHN kepada MPR. Adanya PPHN, justru akan menjadi payung ideologis dan konstitusional bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045,” pungkas Bamsuet. □

Forum Tematik Bakohumas

Agar Humas Kementerian dan Lembaga Tidak Kalah dengan Buzzer

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, meminta humas kementerian dan lembaga harus bisa membangun narasi yang baik, bukan hanya menyampaikan berita atau hanya sekadar menyampaikan peristiwa.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo berharap banyak pada Bakohumas untuk menjalankan koordinasi peran dan fungsi sebagai humas kementerian dan lembaga yang jumlahnya cukup banyak. Tugas dan fungsi humas kementerian dan lembaga adalah menyampaikan fakta kepada publik atas keberhasilan-keberhasilan pembangunan, di kementerian dan lembaga masing-masing.

“Yang kita sama-sama rasakan dan saksikan, peran dan fungsi humas kementerian dan lembaga kadang kalah dengan para buzzer. Faktanya, humas kementerian dan lembaga selalu kalah dengan serangan udara dan serangan darat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat pemerintahan ini sukses,” kata Bambang Soesatyo ketika menyampaikan keynote speech dalam Forum Tematik Bakohumas MPR RI dengan tema “Sidang Tahunan MPR Sebagai Konvensi Ketatanegaraan” di Ruang Delegasi Lantai II, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Forum Tematik Bakohumas MPR RI ini dihadiri Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan dan Yandri Soesanto; Direktur

Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, S.Sos., M.Si.; Sekretaris Jenderal MPR, Dr. Ma'ruf Cahyono; Plt. Deputi Administrasi Setjen MPR, Siti Fauziah; dan Putri Viola, moderator diskusi.

Bamsuet, sapaan Bambang Soesatyo, mengungkapkan, pihak-pihak yang tidak ingin melihat pemerintahan ini sukses hanya menyampaikan atau menyajikan berita-berita bahwa rakyat sampai hari ini terus mengalami kemiskinan, pembodohan, dan ketidakadilan.

“Itu yang selalu digaungkan mereka. Sementara para menteri dan pimpinan lembaga telah bekerja mati-matian untuk mewujudkan harapan Indonesia sejahtera,” ujarnya.

Menurut Bamsuet, humas kementerian dan lembaga selalu kalah dengan para buzzer, antara lain karena humas kementerian dan lembaga terbiasa dalam birokrasi. “Humas kementerian dan lembaga kadang kurang adaptif, kurang responsif



terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Mereka (buzzer) sudah memakai berbagai platform, media sosial, sementara humas kementerian dan lembaga masih terjebak pada rilis-rilis dan berita-berita yang konvensional,” tambahnya.

Untuk menghadapi buzzer, lanjut Bamsoet, humas kementerian dan lembaga harus bisa membangun narasi yang baik, bukan hanya menyampaikan berita atau hanya sekadar menyampaikan peristiwa. “Tapi menyampaikan narasi-narasi yang bisa memengaruhi bawah sadar orang-orang yang membacanya. Itulah fungsi dari para humas lembaga dan kementerian dalam bidang kehumasan,” ujarnya.

“Karena itu, narasi yang baik tidak memerlukan kata-kata dan kalimat yang

panjang hingga satu halaman, tetapi cukup beberapa baris. Yang penting narasi itu mampu menggugah, mengubah konotasi, buah pikiran, persepsi, pada publik terhadap suatu peristiwa,” sambungnya.

Peran Bakohumas adalah menjalin koordinasi dengan humas kementerian dan lembaga agar bisa bersatu dan berjuang membangun narasi yang baik. “Bakohumas bekerja bukan untuk kepentingan sendiri tetapi kepentingan bersama. Itulah gunanya koordinasi, kolaborasi. Platform sudah banyak, mulai dari Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube, Twitter, tetapi perlu juga dibentuk antarindividual sehingga terbentuk komunitas-komunitas yang tugasnya membangun informasi untuk melawan informasi yang menyesatkan,” imbuhnya.

Bamsoet menambahkan, dengan anggaran yang cukup besar, humas kementerian dan lembaga seharusnya tidak boleh kalah dengan para buzzer yang kadang bekerja secara serabutan. “Masak kalah sama buzzer. Humas kementerian dan lembaga punya anggaran besar. Buzzer kadang-kadang kerja serabut, meski ada beberapa yang ‘dibayar’. Humas bisa memakai jasa-jasa mereka (buzzer) untuk meluruskan atau membenarkan satu informasi yang menyesatkan,” katanya.

“Yang penting humas kementerian dan lembaga tidak boleh kalah dengan buzzer-buzzer yang merugikan negara Indonesia, yang mengancam dan memiliki potensi pemecah belah bangsa, dan mengancam nilai-nilai Pancasila,” pungkasnya. □

Forum Bakohumas MPR

Ma'ruf Cahyono: Perlu Sinergi Insan Kehumasan

Bakohumas menjadi forum penting dalam rangka untuk melakukan diseminasi informasi kepada publik terhadap kegiatan-kegiatan persidangan dan agenda kenegaraan di MPR sebagai agenda penting ketatanegaraan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

FORUM Bakohumas MPR diselenggarakan setiap tahun menjelang Sidang Tahunan MPR. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal MPR, Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., saat memberi sambutan dalam Forum

Bakohumas yang bertema: 'Sidang Tahunan MPR Sebagai Konvensi Ketatanegaraan,' di Ruang Delegasi, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 4 Agustus 2022.

Hadir dalam forum itu, Ketua MPR H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.; Wakil Ketua

MPR, Prof. Syarifudin Hasan, MM., MBA.; Wakil Ketua MPR, H. Yandri Susanto S.Pt.; Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo selaku Ketua Umum Bakohumas, Usman Kansong S.Sos., MSi.; Pelaksana Tugas Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal MPR, Siti Fauziah SE., MM.; dan utusan kehumasan dari berbagai lembaga negara, kementerian, dan instansi lainnya.

Untuk menyukseskan acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2022, Sekretariat Jenderal MPR mengadakan Bakohumas dengan mengundang seluruh jajaran insan kehumasan dari lembaga negara, kementerian, dan instansi lainnya. “Jumlahnya kurang lebih ada 100 orang dari berbagai lembaga negara, kementerian, dan instansi lainnya,” ujarnya.

Menurut alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman itu, Bakohumas merupakan forum yang sangat strategis bagi MPR yang pada tanggal 16 Agustus 2022 lalu menyelenggarakan agenda ketatanegaraan, yakni Sidang Tahunan MPR dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dilanjutkan pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan Peringatan Hari Konstitusi. Acara ini dihadiri oleh Bapak Presiden.

Mengingat pentingnya agenda ketatanegaraan maka, menurut pria asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, itu Bakohumas menjadi forum penting dalam rangka untuk melakukan diseminasi informasi kepada publik terhadap kegiatan-kegiatan persidangan dan agenda kenegaraan di MPR

sebagai agenda penting ketatanegaraan. "Kita berharap, insan kehumasan dari berbagai lembaga negara dan kementerian serta instansi lainnya dapat bersinergi dan berkolaborasi agar informasi kegiatan MPR di tahun ini bisa sampai ke masyarakat," tuturnya.

Pria yang saat ini menempuh program Doktorat Kajian Strategi Global di Universitas Indonesia itu mengatakan, Sekretariat

Jenderal MPR berharap, insan kehumasan tidak hanya menyampaikan seremonial dari agenda ketatanegaraan tetapi juga memberikan pemahaman materi agenda ketatanegaraan sehingga masyarakat memahami substansi dan esensi sidang tahunan, yaitu laporan kinerja masing-masing lembaga negara. "Demikian pula dalam Peringatan Hari Konstitusi, masyarakat akan memahami tentang pelaksanaan peran dan fungsi konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," tambahnya.

Dia ingin Bakohumas yang digelar bisa berlanjut, tidak hanya pada agenda ketatanegaraan tetapi juga dalam memberikan informasi kepada publik terkait tugas dan wewenang MPR lainnya. "Kita berharap, agenda MPR yang lain informasinya juga sampai kepada publik," ucapnya. Dia menegaskan, harapan semua bahwa suksesnya penyelenggaraan Sidang Tahunan dan Peringatan Hari Konstitusi tidak hanya pada aspek penyelenggaraan, tetapi juga menimbulkan pemahaman kepada masyarakat, tetapi juga sebagai wahana untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. "Memberi manfaat yang besar kepada masyarakat, bangsa dan negara," ujarnya. □



Terima Delegasi DPP PGMI

Penolakan Penghapusan Istilah Madrasah dari RUU Sisdiknas Harga Mati

Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto, menegaskan, jika bangsa Indonesia mau menjadi bangsa yang mulia wajib hukumnya memuliakan madrasah. Sebaliknya, jika bangsa Indonesia menyingkirkan madrasah maka Indonesia juga akan menjadi bangsa yang tersingkir.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DI HADAPAN delegasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI), Wakil Ketua MPR RI, H. Yandri Susanto, S. Pt., menegaskan penolakannya terhadap rencana penghilangan istilah madrasah dari UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Bila penghilangan istilah madrasah itu diteruskan, tegas Yandri, draf RUU Sisdiknas itu tidak pantas masuk, apalagi sampai dibahas di DPR RI.

Madrasah dan Pondok Pesantren, menurut Yandri, memiliki jasa yang sangat besar bagi bangsa dan negara. Penghapusan istilah madrasah dari RUU Sisdiknas berarti menghapus jasa madrasah dari perjalanan sejarah bangsa, dan itu tidak boleh terjadi sampai kapanpun.

"Saat ini istilah madrasah masih ada dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003, itu saja banyak madrasah dan pondok pesantren yang perjalanannya terseok-seok. Apalagi, bila dihapuskan dari UU. Karena itu, penolakan terhadap rencana penghapusan istilah madrasah dari UU adalah harga mati," kata Yandri.

Jika bangsa Indonesia mau menjadi bangsa yang mulia, kata Yandri, wajib hukumnya

memuliakan madrasah. Sebaliknya, jika bangsa Indonesia menyingkirkan madrasah maka Indonesia juga akan menjadi bangsa yang tersingkir.

"Kita tidak boleh diam, jika tidak mau dianggap setuju. Karena itu, kita perlu terus mengingatkan semua pihak hingga rencana penghapusan istilah madrasah dari UU Sisdiknas itu benar-benar dibatalkan," katanya.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua

MPR RI, Yandri Susanto, saat menerima kunjungan DPP PGMI. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR DPR dan DPD RI Senayan Jakarta, Senin (8/8/2022). Delegasi DPP Persatuan Guru Madrasah Indonesia dipimpin oleh Ketua PGMI Drs. H. Syamsuddin, P., M.Pd.

Pada kesempatan itu, DPP PGMI menyampaikan hasil rekomendasi rakernas PGMI yang berlangsung pada 22-25 Juli 2022



di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Rekomendasi Rakernas itu, antara lain berisi penolakan PGMI terhadap rencana penghapusan istilah madrasah seperti tercantum dalam draf RUU Sisdiknas. Serta penolakan terhadap rencana penghapusan tenaga honorer, termasuk yang ada di madrasah.

Menyangkut rencana penghapusan tenaga honorer, Yandri Susanto yang juga Ketua Komisi VIII DPR RI, itu juga sepakat dengan PGMI agar pemerintah meninjau ulang rencana tersebut. Dikhawatirkan, jika rencana tersebut dilanjutkan akan menimbulkan berbagai resistensi dunia pendidikan, khususnya madrasah.

“Jumlah guru honorer itu sangat banyak. Jika semua dihilangkan, bagaimana nasib dunia pendidikan. Apakah pemerintah sudah menyiapkan guru pengganti. Karena, kalau tidak, banyak madrasah yang tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya dengan baik,” kata Yandri. □

AWG

Delegasi WNI Etnis Tionghoa

Berkontribusi Membangun Bangsa Hak dan Kewajiban Setiap Warga Negara

Wakil Ketua MPR RI, Syarif Hasan, menyatakan, semua warga bangsa sama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Hal ini menjadi modal besar bangsa ini menuju masa depan yang sama-sama kita cita-citakan” katanya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., atau biasa disapa Syarif Hasan, mengungkapkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat luar biasa. Selain luas dari sisi geografis, penduduknya juga sangat beragam, terdiri banyak suku dan etnis, termasuk etnis Tionghoa.

Namun, kemajemukan yang besar itu mampu dijalin oleh nilai-nilai luhur bangsa, sehingga menyatu erat dalam satu ikatan kuat tak tergoyahkan menjadi Bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, seluruh rakyatnya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam membangun negara.

“Jadi sebagai bangsa Indonesia semestinya tidak ada lagi ada yang merasa lebih besar atau merasa sebagai warga minoritas. Semuanya sama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadi modal besar bangsa ini menuju masa depan yang sama-sama kita cita-citakan” katanya.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini saat menerima kunjungan silaturahmi sekitar 20 warga negara Indonesia etnis Tionghoa yang tergabung dalam Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI). Delegasi yang dipimpin oleh Wilianto Tanta (Ketua Umum) dan Henry Husada (Waketum) diterima di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR Syarif Hasan, Gedung Nusantara III, Lantai 9, Kompleks

Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).

Diterimanya warga Indonesia etnis Tionghoa di Gedung Rakyat MPR RI, lanjut Syarif Hasan, adalah salah satu bentuk implementasi penghormatan persamaan hak setiap warga negara Indonesia oleh MPR RI. “Gedung ini adalah rumah rakyat, siapapun dia. Di sinilah rakyat menyampaikan aspirasinya, kami dengarkan, kami olah dan kami kaji atau kami sampaikan aspirasi itu kepada pemerintah atau lembaga negara lainnya sesuai dengan aspirasi yang disampaikan,” kata Syarif Hasan.

Baik pribadi maupun sebagai salah satu Pimpinan MPR, Syarif Hasan memberikan apresiasi yang besar kepada delegasi

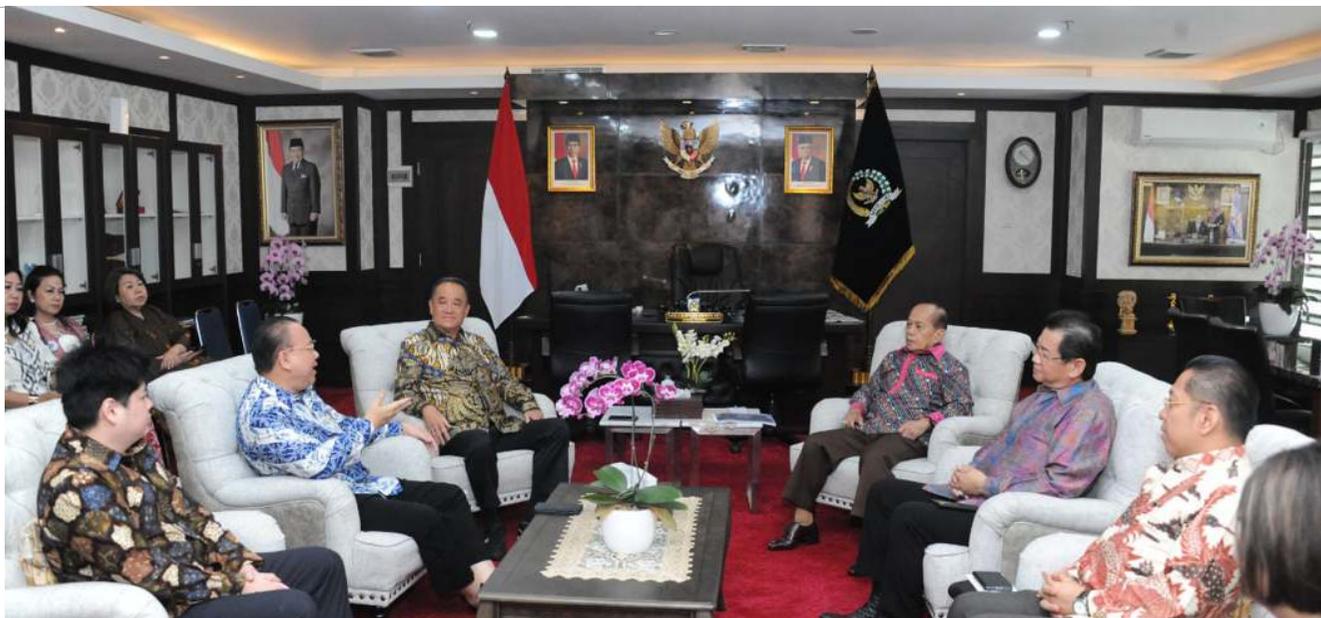


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PSMTI ini, yang datang ke rumah rakyat untuk bersilaturahmi dan menyampaikan aspirasi. “Mudah-mudahan akan berdampak baik untuk semua,” tambahnya.

Profesor Bidang Ilmu Strategi Manajemen Koperasi dan UMKM dari Universitas Negeri Makassar (UNM) ini menambahkan, silaturahmi untuk membangun sinergi sangat penting, apalagi bangsa Indonesia dua tahun lagi, atau tepatnya 2024, akan menghadapi pesta demokrasi lima tahunan, yakni pemilihan umum (Pemilu). Eratnya hubungan antarseluruh elemen bangsa sangat diperlukan saat itu dan pasca pemilu.

“Di tahun politik 2024 bangsa ini harus memiliki kesamaan visi dan misi. Untuk itu, silaturahmi, komunikasi, dan saling tukar pikiran antaranak bangsa harus lebih sering dilakukan. Hingga diakhir 2024, Indonesia

akan mempunyai satu tujuan bersama, menuju Indonesia sejahtera,” ujarnya.

Perbincangan itu sendiri berjalan mengalir, lancer, dan penuh keakraban. Syarief Hasan serius mendengarkan berbagai aspirasi dan pendapat yang diungkapkan pimpinan dan anggota delegasi PSMTI. Salah satunya soal wacana memberikan kontribusi untuk membangun negara dengan ikut terjun ke dunia politik atau bergabung di partai politik.

Ketum PSMTI, Wilianto Tanta, mengatakan, pada dasarnya organisasi PSMTI bergerak dalam bidang sosial dan budaya, itu menjadi landasan aktifitas organisasi untuk berkontribusi buat negara. “Namun, banyak anggota kita yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia ingin agar lebih luas lagi untuk melakukan kiprahnya demi bangsa dan negara, salah satunya di bidang politik.

Sebagai Pimpinan, kami tidak melarang dan tidak juga mengarahkan ke sisi politik tertentu, itu hak mereka untuk memilih,” katanya.

Merespon hal itu, Syarief Hasan sangat menghargai. “Saya sambut baik wacana itu. Seperti yang saya katakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama, termasuk di politik. Memang organisasi ini dasarnya adalah kegiatan sosial budaya, namun tidak berarti harus buta politik,” katanya.

Menurut Syarief Hasan, semua elemen bangsa harus melek dan berwawasan politik. Hal ini penting agar, di 2024 tidak asal pilih, tapi memilih dengan wawasan dan kebijakan. Mau terjun langsung menyalurkan talenta politiknya atau tidak, yang penting adalah di parpol manapun kita berada silahkan dengan komitmen masing-masing. Tetapi harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memikirkan kesejahteraan seluruh rakyat tanpa kecuali.

Di Partai Demokrat sendiri, lanjut Syarief Hasan, membuka pintu lebar-lebar untuk setiap warga negara tidak ada perbedaan. Jadi, “Siapapun yang ingin berkontribusi dan mengabdikan kepada bangsa dan negara melalui Demokrat, akan kami sambut. Di Demokrat bermacam etnis ada, termasuk Tionghoa. Jadi, pada intinya saya berpesan, berkiprahlah di manapun, keluarkan potensi politik yang ada dengan tetap berpegang dan berpanduan kepada nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan perbedaan politik menjadi kekuatan untuk menyongsong Indonesia jaya,” pungkasnya. □



Rencana Meningkatkan Harga BBM subsidi

Menaikkan Harga BBM Bersubsidi Adalah Logika yang Keliru

Rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jelas suatu kejanggalan. Kenaikan harga BBM punya efek domino yang dapat menggerak inflasi. Jika harga BBM naik, harga barang-barang juga akan ikut naik, daya beli rakyat melemah.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan menyoroti rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis pertalite. Rencana ini dinilai janggal di tengah klaim pemerintah yang menyatakan APBN surplus sepanjang semester I 2022. Kementerian Keuangan merilis pada semester I 2022, APBN surplus Rp 73,6 triliun, atau pendapatan negara sepanjang paruh pertama tahun ini mencapai Rp1.317,2 triliun, naik signifikan ketimbang belanja negara yang baru terealisasi Rp 1.243,6 triliun. Ini menunjukkan bahwa penerimaan negara jauh lebih besar dibandingkan belanja negara.

“Jika melihat proporsi penerimaan negara, dengan kenaikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 281 triliun pada semester I 2022 (tumbuh 35,8%), sektor hulu migas menyumbang Rp 140 triliun. Artinya, negara juga mendapatkan untung dari naiknya harga energi. Oleh karena itu, rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jelas suatu kejanggalan. Padahal BBM bersubsidi punya efek domino yang

dapat menggerak inflasi. Jika harga BBM naik, harga barang-barang juga akan ikut naik, daya beli rakyat melemah. Ini harusnya dipikirkan oleh pemerintah,” tandas politisi senior Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini mencatat, subsidi BBM bukanlah hal baru dan lazim dilakukan oleh berbagai pemerintahan. Sebagai bahan pokok dan strategis, subsidi BBM jelas intervensi negara dalam menjaga stabilitas kebutuhan mendasar rakyat. Ini bentuk kehadiran negara dalam memastikan ketercukupan dan keterjangkauan kebutuhan pokok. Karena itu, jika subsidi dicabut, sama saja negara menyerahkan hajat hidup rakyat pada mekanisme pasar. Subsidi adalah ejawantah dari negara kesejahteraan (welfare state) guna memastikan perlindungan ekonomi dan sosial rakyat.

Menurut Syarif, membahas subsidi harus beranjak dari cara dan tujuan bernegara. Jika kita sepakat bahwa negara mesti melindungi segenap warganya, memastikan ketercukupan dan keterjangkauan kebutuhan pokok,

mestinya tidak ada yang keliru dengan subsidi. Tugas pemerintah memastikan anggaran negara teralokasi dengan tujuan menyejahterakan rakyatnya. Jika kebutuhan mendasar rakyat dipinggirkan oleh program ambisius, mercusuar, dan minim kebermanfaatannya, tentu ada yang salah dengan logika berpikir pemerintah. Kalau negara hanya gemerlap infrastruktur, namun rakyatnya kelaparan, untuk siapa pembangunan dilaksanakan?

“Rencana menaikkan harga pertalite adalah logika yang janggal dan keliru. Selain karena pemerintah juga menikmati manfaat dari naiknya harga energi, yang artinya penerimaan negara ikut melonjak, mencabut atau mengurangi subsidi berarti merampas kesejahteraan rakyat. Jika pemerintah tetap memaksakan kehendaknya, inflasi jelas akan semakin tidak terkendali. Padahal pemerintah sangat mungkin melakukan realokasi fiskal, proyek-proyek mercusuar yang menyita dana negara dapat ditangguhkan dulu. Bahkan pengerjaannya dapat dievaluasi. Ini adalah perkara keberpihakan dan kehendak politik belaka,” tutup Syarif. □

Menerima Pelajar Muhammadiyah

Bamsoet Ajak Generasi Milineal Kembangkan Kewirausahaan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong agar organisasi kepemudaan bisa mentransformasikan diri, sehingga tidak hanya menjadi kekuatan sosial, melainkan juga menjadi kekuatan ekonomi. Salah satunya turut terlibat dalam berbagai kegiatan kewirausahaan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa kapitalisme bukan hanya mengancam sistem ekonomi nasional, melainkan juga telah mengancam sistem politik demokrasi. Demokrasi Pancasila yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kini mulai terancam

dengan demokrasi kapitalis, dengan corak utamanya money politic (politik uang).

“Penelitian disertasi Burhanuddin Muhtadi di Australia National University (ANU) maupun berbagai penelitian sejenis lainnya, dengan gamblang memotret kenyataan politik Indonesia yang dibangun atas praktik politik uang dan patronase. Kita tidak boleh menutup

mata terhadap kenyataan ini. Melainkan harus mulai memperbaikinya, agar jangan sampai demokrasi Indonesia yang bercirikan Pancasila, justru tergerus oleh kekuatan modal,” ujar Bamsoet usai menerima Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM), di Jakarta, Kamis (25/8/22).

Pengurus IPM yang hadir, antara lain, Ketua Umum Nashir Efendi, Sekretaris Jenderal Hilal Fathurrahman, Bendahara Umum Hanifa Syafina, Ketua Bidang Organisasi Irgan Kastela, Ketua Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan Riandy Prawita, Ketua Bidang Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga M Faris Hamdan, serta Ketua Bidang Kesehatan Fitri Febrianti.

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, ini mendorong organisasi kepemudaan agar bisa mentransformasikan diri, sehingga tidak hanya menjadi kekuatan sosial, melainkan juga menjadi kekuatan ekonomi. Salah satunya dengan turut terlibat dalam berbagai kegiatan kewirausahaan.

“Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2020 lalu rasio tingkat kewirausahaan (UMKM) terhadap jumlah penduduk di Indonesia belum optimal, baru mencapai 3,5%. Tertinggal jika dibandingkan negara tetangga seperti Singapura 8,7% dan Malaysia 5%. Padahal kewirausahaan menawarkan potensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi dengan terciptanya lapangan pekerjaan,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Presiden Joko Widodo sudah menargetkan untuk melahirkan 1 juta wirausaha baru. Sebagaimana tertuang



dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kewirausahaan Nasional, yang secara tegas ingin menggapai percepatan pencapaian target kewirausahaan 3,95% pada akhir tahun 2024.

“Semangat Presiden Joko Widodo dalam melahirkan wirausahawan baru, salah satunya tercermin dengan menghadirkan program Reforma Agraria dan Redistribusi Aset. Presiden Joko Widodo secara terbuka terus menerus mengajak siapapun untuk menyiapkan proposal yang jelas, yang bisa memanfaatkan hutan dan sumber daya alam

untuk kemakmuran rakyat. Organisasi kepemudaan harus bisa memanfaatkan momentum ini,” terang Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila sekaligus Wakil Ketua Umum FKPP/Kepala Badan Bela Negara FKPP ini memaparkan, Presiden Joko Widodo juga telah melakukan terobosan progresif dalam sejarah bangsa dengan mencabut 2.078 Izin Usaha Tambang; 192 sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare; serta Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare. Ini menunjukkan betapa banyaknya peluang

usaha yang bisa digarap dari berbagai izin usaha yang sudah dicabut lantaran tak dimanfaatkan.

“Mahasiswa maupun pelajar sebagai kaum terdidik yang memiliki kreatifitas dan inovasi tanpa batas, harus bisa merumuskan program usaha dalam pemanfaatan hutan dan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Tidak perlu membuat korporasi atau perusahaan yang besar, kalangan pelajar dan mahasiswa bisa memulainya dengan membentuk koperasi, UMKM, maupun Kelompok Usaha Bersama,” pungkas Bamsuet. □

Diskusi KPID Jakarta dan Universitas Al Azhar Indonesia

HNW Ingatkan Pentingnya Siaran Pemberitaan yang Sehat

Wakil Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., berharap, Komisi Penyiaran Indonesia terus meluaskan pengawasannya agar jurnalis media lebih profesional, untuk menghadirkan siaran berita yang baik dan benar kepada masyarakat.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KOMISI Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta bekerjasama dengan Universitas Al Azhar Indonesia, Senin (22 Agustus 2022), di Jakarta, menyelenggarakan Diskusi dan Deklarasi Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran. Acara Diskusi dan Deklarasi Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran ini menampilkan

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., sebagai keynote speaker.

Dalam kesempatan itu, HNW sapaan akrabnya, mengapresiasi kerjasama ini karena pengawasan terhadap berita tidak lagi diperlukan hanya terhadap TV maupun

Radio, tetapi seharusnya juga perlu diberikan kewenangan untuk menjamah media sosial sekaligus penguatannya. Pasnya, saat ini berkembang fenomena di mana media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk mengoreksi pemberitaan yang dilakukan oleh media mainstream, seperti TV dan Radio.

HNW memaparkan pentingnya media untuk mempraktikkan dengan disiplin kode etik jurnalistik agar selalu menghadirkan siaran pemberitaan yang sehat, karena rakyat Indonesia sudah semakin cerdas dalam menyikapi setiap peristiwa yang terjadi di masyarakat. Apalagi di saat bangsa sudah memasuki tahun-tahun politik yang sangat sensitif terkait dengan penyebaran berita yang benar maupun yang hoax. Maka, HNW berharap, jangan sampai berulang kembali terjadinya pembelahan bangsa sebagaimana terjadi pada Pilpres 2019, sebagai akibat dari berita yang membelah yang tidak diawasi dan tidak diberikan sanksi yang menjerakan.

Ia menjelaskan, salah satu contoh yang bisa menjadi bahan pembelajaran soal

pemberitaan yang bermasalah adalah kasus kematian Brigadir J. “Kalau diikuti dari siaran pemberitaan awal, seolah-olah yang bersalah adalah Brigadir J. Ada kejahatan seksual. Lalu, ada blaming terhadap korban,” ujarnya. Namun, belakangan terbukti siaran pemberitaan tersebut salah dan berasal dari sumber yang berbohong. “Hal ini terbongkar setelah masyarakat atau netizen gaduh dan pengacaranya bersikukuh karena melihat banyaknya kejanggalan,” tuturnya.

HNW menambahkan, seharusnya KPID terus meluaskan pengawasannya agar jurnalis media lebih profesional tidak hanya sekedar mengutip pernyataan dari sumber

bisa menjadi pilar demokrasi dan tidak malah dibiarkan partisan, condong menjadi juru kampanye bagi pihak tertentu dengan mengambil alih hak rakyat untuk mendapat berita yang benar dan seimbang,” ujarnya.

HNW berharap, para pemangku kepentingan, termasuk Komisi Penyiaran Indonesia baik di tingkat pusat dan daerah, agar dapat meningkatkan kinerja dan kolaborasi kampus maupun pihak-pihak lainnya guna mengawasi siaran pemberitaan yang tidak berpihak kepada kebenaran dan kemanfaatan yang diperlukan oleh masyarakat. Apalagi, ketentuan soal hal tersebut dituangkan ke

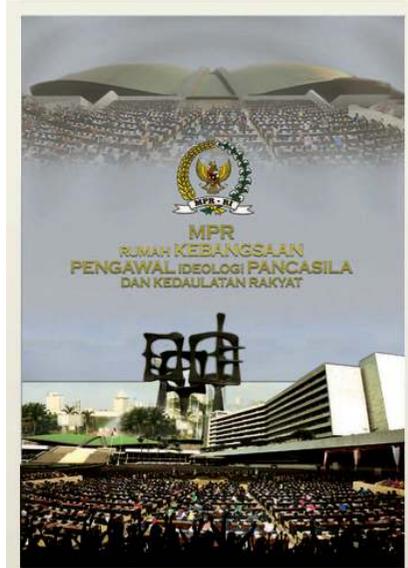


yang ada, tetapi melakukan investigasi yang memadai untuk menghadirkan siaran berita yang baik dan benar kepada masyarakat. “Ini bagian penting untuk kita semua agar berhati-hati. Siaran yang sehat dan cerdas untuk masyarakat harus terus diupayakan hadirkan, karena rakyat yang makin kritis dan cerdas akan menghukum media atau pemberitaan yang justru membohongi rakyat dengan penyebaran berita bohong atau partisan,” tukasnya.

Karenanya, HNW mengapresiasi sikap masyarakat yang bisa mengkritisi informasi melalui sosial media dan mengoreksi pemberitaan media mainstream yang tidak tepat. Oleh karenanya, media juga harus terus berbenah diri, apalagi di tahun-tahun politik. Agar media benar-benar diawasi agar

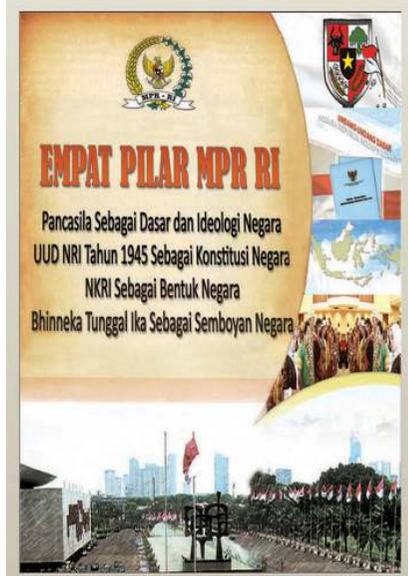
dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Yaitu, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

“Dari ketentuan tersebut, kita perlu memahami bahwa memperoleh informasi yang sehat melalui siaran pemberitaan merupakan hak dasar rakyat yang dijamin oleh konstitusi dan dipenuhi oleh negara. Karenanya, mengawasinya menjadi kewajiban bagi pemenuhan HAM yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945,” pungkasnya. □



Implementasi Sila-sila Pancasila

-  - Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur
-  - Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.
-  - Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan
-  - Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah
-  - Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi



Menerima Profesor Charles University Ceko

Bamsoet Dorong Optimalisasi Swakelola Dana Desa

Ketua KAHMI Eropa Raya, Choirul Anam, sedang melakukan penelitian disertasi di Charles University Ceko. Penelitiannya tentang manfaat dana desa terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Belum lama ia diterima oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Dewan Pakar KAHMI Bambang Soesatyo mengapresiasi kiprah Ketua KAHMI Eropa Raya dan mantan Ketua PPI Dunia 2020-2021, Choirul Anam, yang sedang melakukan penelitian disertasi di Charles University, Ceko. Penelitiannya tentang manfaat dana desa terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dia melakukan penelitian di sekitar 15 ribu desa selama kurun waktu 3 tahun, dan hasil penelitiannya ini akan sangat bermanfaat, baik untuk melihat manfaat dana desa maupun untuk mengevaluasi pelaksanaannya agar ke depannya menjadi semakin baik. Hasil penelitiannya menunjukkan hubungan yang bagus antara dana desa dan penurunan kemiskinan.

Di Ceko juga menerapkan sistem desentralisasi. Mereka memiliki sekitar 6 ribu desa dengan jumlah penduduk setiap desa rata-rata sekitar 100 orang. Di sana desentralisasi diberikan menyesuaikan kebutuhan setiap desa, sehingga jumlah besaran alokasinya tidak disamaratakan. Hal ini berbeda dengan Indonesia, yang hampir

menyamarkan jumlah besaran alokasi dana desa, yang rata-rata mencapai Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar di setiap desa.

“Walaupun masih dalam tahap penelitian, disertasi Choirul Anam sudah menemukan hal yang menarik. Salah satunya terkait pandangan bahwa sumber pemasukan maupun pengelolaan dana desa kedepannya jangan terlalu bergantung

kepada pusat. Melainkan swakelola desa harus diperkuat, sehingga desa menjadi semakin mandiri dalam mengelola keuangan desanya dan mendorong kemandirian ekonomi desa. Begitupun dengan besaran alokasi dana desa yang didorong agar menyesuaikan kebutuhan setiap desa, sehingga tidak disamaratakan jumlahnya di seluruh desa,” ujar Bamsoet usai menerima



Ketua KAHMI Eropa Raya, Choirul Anam, bersama supervisor penelitian Prof. Michal Placek, di Jakarta, Kamis (25/8/22).

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Indonesia merupakan 'the biggest library for social science'. Berbagai kebijakan publik yang ada di Indonesia selalu mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Terkait dana desa, misalnya, sebanyak 12 negara di Asia Pacific sudah mengungkapkan ketertarikannya untuk meniru Indonesia menaikkan anggaran dana desa. Mereka menganggap program ini cukup berhasil mendorong ekonomi pedesaan.

"Tidak heran jika nantinya hasil penelitian

disertasi Choirul Anam tentang dana desa di Indonesia bisa jadi akan mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Sebagai catatan, Indonesia memiliki 83.381 desa/kelurahan yang tersebar di 514 kabupaten/kota (416 kabupaten dan 98 kota) di 34 provinsi. Dalam Pagu Dana Desa tahun 2022, Dana Desa ditetapkan sekitar Rp 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia," jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, dalam R-APBN 2023, Presiden Joko Widodo berencana menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp 71 triliun.

Semakin menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran, perbatasan, dan desa.

"Secara keseluruhan, sejak pertama kali disalurkan pada tahun 2015 hingga di tahun 2022 ini, jumlah dana desa yang tersalurkan sudah mencapai sekitar Rp 400,1 triliun. Antara lain digunakan untuk membangun 227.000 Km jalan desa, 4.500 embung, 71.000 unit irigasi, 1,3 juta meter jembatan, 10.300 pasar desa, 57.200 Bumdes, 6.100 tambat perahu dan 62.500 penahan tanah. Walaupun sudah berjalan dengan baik, namun tidak ada salahnya pemerintah senantiasa melakukan evaluasi terhadap tata kelola dana desa sehingga kedepannya bisa semakin baik," pungkas Bamsuet. □

Menara Syariah di Pantai Indah Kapuk

Bisa Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengapresiasi pembangunan Menara Syariah di Pantai Indah Kapuk. Kehadiran menara ini menunjukkan eratnya persahabatan dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia.

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah mengapresiasi kiprah Agung Sedayu Group, Salim Group, serta Matrix Concepts Holdings Berhad dari Malaysia, yang telah membangun Menara Syariah, sebagai bagian dari Islamic Financial District yang dibangun di lahan seluas 23,5 hektar di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), Jakarta.

Menara Syariah memiliki dua tower yang terdiri dari 29 lantai, dengan daya tampung mencapai 5.000 orang. Perbankan, asuransi, serta berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan syariah lainnya akan hadir di sini. Keberadaan Menara Syariah menunjukkan eratnya persahabatan dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia, yang juga merupakan negara dengan pemeluk agama islam sekaligus ekonomi dan keuangan syariah terbesar di dunia.

"Global Islamic Economy Report 2020/2021 melaporkan pada tahun 2019 saja



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

tercatat 1,9 miliar muslim di berbagai penjuru dunia membelanjakan USD 2,02 triliun untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap berbagai produk yang sesuai prinsip syariah. Menunjukkan betapa besarnya potensi

pasar ekonomi syariah dunia. Indonesia dan Malaysia bisa bekerjasama menjadikan Menara Syariah sebagai pusat ekonomi syariah dunia," ujar Bamsuet usai menyaksikan topping off Menara Syariah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, di kawasan PIK 2, Jakarta, Selasa (23/8/22).

Selain dihadiri Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, acara itu juga dihadiri Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wakil Ketua MUI Marsudi Syuhud, Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma, serta Direktur Utama Agung Sedayu Group Nono Sampono.

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Global Islamic Economy Report 2020/2021 mencatat peran Indonesia dalam tujuh sektor ekonomi syariah dunia sangat kuat. Misalnya, pada sektor Makanan Halal, dari total USD 1,17

triliun yang dikeluarkan oleh 1,9 miliar penduduk muslim dunia, sebesar USD 144 miliar di antaranya berputar di Indonesia.

"Dari USD 66 miliar ekonomi syariah pada sektor Kosmetika Halal, sebesar USD 4 miliar di antaranya berputar di Indonesia. Ditambah dari sekitar USD 2,88 triliun Industri Keuangan Syariah dunia, sebanyak USD 99,2 miliar di antaranya berputar di Industri Keuangan Syariah Indonesia," jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, laporan Global Islamic Economy 2020/21 juga mencatat potensi ekonomi syariah Indonesia mencapai Rp 2.937 triliun. Hal ini tidak lepas dari jumlah

pemeluk Islam yang mencapai 87,2% dari populasi penduduk Indonesia. Terlebih Indonesia juga telah naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia untuk pengembangan keuangan syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Sementara aset keuangan syariah di Indonesia menempati peringkat 7 dunia dengan total aset mencapai USD 99 miliar.

"Sedangkan menurut Global Islamic Fintech Report 2021, Indonesia berada dalam posisi kelima market size transaksi fintech syariah setelah Arab Saudi, Iran, Persatuan Emirat Arab, dan Malaysia, dengan nilai transaksi yang dicatatkan Indonesia mencapai USD 2,9 miliar pada tahun 2020 lalu," pungkaskan Bamsuet. □

Konstitusi dan Proses Akulturasi Bangsa Indonesia

Konstitusi Harus Mampu Mengantisipasi Dampak Proses Akulturasi

Konstitusi harus mampu mengantisipasi perkembangan budaya sebagai dampak proses akulturasi yang terjadi, demi membangun masa depan yang lebih baik.

DUNIA terus berubah dan kita mesti memperbarui diri agar nilai-nilai kebangsaan tidak luluh dalam inovasi teknologi yang menawarkan segala sesuatu secara cepat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutannya pada diskusi daring bertema: 'Konstitusi dan Proses Akulturasi Bangsa Indonesia,' yang digelar Forum

Diskusi Denpasar 12 bersama Center for Prehistory and Austronesian Studies, Rabu (24/8).

Dalam diskusi tersebut hadir Dr. Drs. Bahtiar, M.Si., (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI/Dirjen Polpum Kemendagri); Prof. Dr. Harry Widiyanto (Ahli Arkeologi Prasejarah); Dr. Andriyati Rahayu. S.S.,

M.Hum., (Peneliti Arkeologi Universitas Indonesia); dan Udaya Halim (Peneliti Budaya Tionghoa-Indonesia) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Prof. Dr. Truman Simanjuntak (Center for Prehistory and Austronesian Studies/CPAS), Dr. I Made Geria, M.Si., (Peneliti Ahli Utama BRIN), dan Abdul Kohar (Direktur Utama Lampung Post) sebagai penanggung.



Menurut Lestari, proses akulturasi adalah dinamika yang luar biasa sehingga pada 5-10 tahun terakhir kita kaget dengan munculnya berbagai masalah yang tumbuh akibat mempersoalkan perbedaan, sehingga seperti menafikan kebhinnekaan yang dimiliki negeri ini.

Proses akulturasi, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, bisa dalam bentuk nilai-nilai intelektual dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi milik bersama.

Konstitusi, ujar Rerie, secara umum memuat tata aturan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pembentukan, pembagian wewenang, cara kerja berbagai lembaga negara dan hak asasi manusia.

Artinya, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah

itu, nilai budaya dan kehidupan berbangsa dan bernegara termuat secara utuh dalam konstitusi, UUD NRI Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, menjadi pedoman untuk menjamin, menata kehidupan berbangsa dan bernegara serta merumuskan cita-cita yang sudah, sedang, dan akan dicapai melalui penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Konstitusi di Indonesia, ujar Rerie, diharapkan memberi ruang yang memadai dalam mengantisipasi perkembangan budaya dan diharapkan mampu mengantisipasi perkembangan zaman.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI Kemendagri, Bahtiar, berpendapat, proses akulturasi

membentuk negeri ini memiliki keberagaman, tetapi ada persamaan yang mengikatnya, salah satunya adalah bahasa Indonesia. Namun, ujar Bahtiar, bahasa saat ini juga banyak dipengaruhi dampak akulturasi yang terjadi di dunia.

Bahtiar menilai, konstitusi kita cukup menjamin berlangsungnya kehidupan berbangsa dan jati diri anak bangsa. Namun, ujarnya, untuk tetap memperkuat jati diri bangsa secara operasional harus kita cek kembali dukungan aturan yang ada.

Karena, tegas Bahtiar, proses akulturasi terjadi setiap saat dan setiap waktu akibat interaksi warga bangsa dengan warga dunia yang lebih intens lewat pemanfaatan teknologi.

Pada kondisi ini, menurut Bahtiar, pentingnya peran negara untuk melakukan pemeliharaan dan penguatan agar setiap warga negara tetap memiliki jati diri bangsa yang tinggi.

Bahtiar berharap, kepala daerah terpilih pada Pemilu serentak pada 2024 nanti memiliki visi kebudayaan yang baik.

Ahli Arkeologi Prasejarah, Harry Widiyanto mengungkapkan, keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, seperti beragamnya bahasa dan etnis, merupakan modal penting.

Etnis yang berkembang di Indonesia, menurut Harry, terbentuk dari proses migrasi ras Mongoloid dari Taiwan menuju kawasan Pasifik yang merupakan migrasi terakhir ke Kepulauan Nusantara pada ribuan tahun lalu.

Peneliti Arkeologi Universitas Indonesia, Andriyati Rahayu, mengungkapkan, proses akulturasi bangsa Indonesia berlangsung sejak abad ke-4 sampai sekarang.

Berdasarkan penelitian terhadap prasasti yang ada, menurut Andriyati, terjadi akulturasi kebudayaan India di Nusantara lewat kehadiran aksara dan agama Hindu serta Budha.

Andriyati mengungkapkan, di masa lalu bangsa Indonesia punya kepandaian asli, antara lain kemampuan berlayar dan mengenal arah angin, bersawah, dan bercocok tanam, mengenal prinsip dasar pertunjukan wayang, mengenal alat musik gamelan, kepandaian membuat barang dari logam, menggunakan alat ukur, mengenal alat tukar, dan sistem perbintangan, serta telah terbentuk susunan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

masyarakat yang teratur.

Peneliti Budaya Tionghoa-Indonesia, Udaya Halim, mengungkapkan bahwa nama Indonesia saja dicetuskan bukan oleh etnis yang ada di Nusantara, tetapi James Richardson Logan, warga Skotlandia dan George Windsor Earl pada 1849.

Menurut Udaya, Indonesia lahir sebagai negara bangsa dibangun atas dasar kesadaran berbangsa dan bernegara.

“Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sukses mempersatukan bangsa,” ujar Udaya. Dia berpendapat, kebangsaan itu berada dalam pikiran, bukan pada warna kulit dan etnis.

Peneliti Center for Prehistory and Austronesian Studies, Truman Simanjuntak, berpendapat, akulturasi merupakan topik yang selalu menarik untuk dibahas.

Migrasi yang terjadi ribuan tahun lalu di Nusantara, ujar Truman, mendorong terjadinya akulturasi. Gelombang migrasi ke Nusantara, tambahnya, hampir pasti membawa kebudayaan pendatang lewat aksi beri dan ambil sehingga menghasilkan berbagai keragaman.

Peneliti Ahli Utama BRIN, I Made Geria, berharap, nilai kearifan lokal dalam menghadapi produk akulturasi jangan sampai hilang agar jati diri bangsa tetap terjaga.

Menurut I Made Geria, akulturasi terjadi harus ada toleransi dalam kesetaraan. Negara Indonesia meski berbeda tetap rukun dengan jembatan toleransi.

Direktur Utama Lampung Post, Abdul Kohar, berpendapat, meski saat ini banyak upaya anak bangsa untuk mendorong tumbuhnya toleransi di tengah

keberagaman, tetapi masih ada juga sekelompok orang yang mempraktikkan upaya disintegrasi.

Padahal, tegas Abdul Kohar, bangsa ini punya sejarah panjang untuk mempersatukan setiap anak bangsa.

Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat, akulturasi hanya bisa terjadi jika kita memiliki pikiran terbuka, hati yang terbuka, dan dada yang lebar.

Hanya saja, ujar Saur, konstitusi kita masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan pernikahan beda agama di tanah air. Jadi, tegas Saur, masih panjang jalan untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul di masa datang.

Selain itu, Saur berpendapat, dalam proses akulturasi juga perlu rasa humor agar tidak mudah tersinggung. □

Terima Ketua HIPMI, Anggawira

Bamsoet Ajak HIPMI Dukung Wujudkan Sejuta Wirausaha Baru

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo berharap, Musyawarah Nasional XVII HIPMI yang rencananya digelar pada Oktober/November 2022, harus bisa memajukan HIPMI menjadi mitra strategis pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian nasional.

KETUA MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo Bambang Soesatyo mengajak para calon yang maju dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2022-2025 untuk bersaing secara sehat. Siapapun yang terpilih dalam Musyawarah Nasional XVII HIPMI yang rencananya akan digelar pada Oktober/November 2022, harus bisa memajukan HIPMI menjadi mitra strategis pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian nasional.

Global Entrepreneurship Index (GEI) sebagai patokan untuk melihat negara dunia mengalokasikan sumber daya dalam mempromosikan kewirausahaan, menempatkan Indonesia di urutan ke-75 dari 137 negara yang disurvei. Untuk menaikkannya, Indo-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

nesia perlu melahirkan lebih banyak lagi wirausaha baru. Presiden Joko Widodo, sebagaimana tersirat dalam Perpres Nomor

2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, menargetkan lahirnya sejuta wirausaha baru



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

hingga tahun 2024.

“Presiden Joko Widodo melalui berbagai kementerian/lembaga telah menggulirkan berbagai kebijakan afirmatif. Antara lain, pembiayaan lewat KUR serta perbankan dinaikkan hingga 30% untuk UMKM; serta mengalokasikan 40% belanja negara untuk belanja produk UMKM, yang targetnya mencapai Rp 500 triliun. HIPMI bisa memanfaatkan berbagai kebijakan tersebut untuk membantu Presiden Joko Widodo melahirkan sejuta wirausaha baru hingga tahun 2024. Karenanya, selain memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke berbagai daerah, HIPMI juga harus melebarkan sayap hadir di berbagai kampus/perguruan tinggi.

Sehingga bisa mengajak para mahasiswa untuk bergerak di sektor entrepreneurship,” ujar Bamsuet usai menerima Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan HIPMI periode 2019–2022 Anggawira, di Jakarta, Senin (15/8/22).

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengingatkan, sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia juga tak lepas dari pengaruh dan landscape ideologi, politik, dan ekonomi global yang berkembang dinamis, yang saat ini sedang dalam suasana muram. Beragam faktor yang memengaruhi, antara lain melambungnya harga komoditas global, kebijakan moneter

negara maju yang mulai agresif, masih berlangsungnya konflik Rusia - Ukraina, serta kemungkinan peningkatan ketegangan di Taiwan.

“Hasil survei Bloomberg memang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat resiko resesi yang kecil, hanya 3%. Sangat jauh jika dibandingkan rata-rata negara Amerika dan Eropa (40 hingga 55%) ataupun negara Asia Pasifik (pada rentang antara 20 hingga 25%). Namun, kita tetap harus waspada, mengingat menurut IMF dan Bank Dunia, perekonomian 66 negara (diluar Indonesia) diprediksi akan bangkrut dan ambruk. Jika terjadi, pasti akan membuat kondisi ekonomi global semakin suram, sehingga harus diwaspadai oleh Indonesia dari sejak dini,” tandas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum SOKSI ini menjelaskan, konflik Rusia - Ukraina saja sudah memicu krisis pangan dan krisis energi global. Menyebabkan terhambatnya pasokan gandum dunia sebanyak 30 hingga 40%. Harga gas alam di Eropa meningkat 60% dalam dua pekan, semakin memperburuk krisis energi yang ditandai kenaikan harga minyak mentah yang mencapai 350% hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Proyeksi Energy Information Administration (EIA) pada awal April 2022 lalu memperkirakan harga minyak mentah Brent untuk keseluruhan di tahun 2022 bisa mencapai USD 98 per barel, jauh di atas asumsi APBN 2022 sebesar USD 63 per barel.

“Secara blak-blakan di berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menyatakan, beban subsidi untuk BBM, Peralite, solar, dan LPG sudah mencapai Rp 502 triliun. Untuk menekan subsidi, HIPMI bisa berperan dengan membantu percepatan migrasi kendaraan dari berbahan bakar minyak ke bermotor listrik. Setiap migrasi satu unit kendaraan, diperkirakan bisa menghemat subsidi mencapai Rp 22,9 juta per tahun. HIPMI juga bisa lebih banyak terjun ke green economy. Secara global, studi World Economic Forum 2020 mengestimasi transisi ke ekonomi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai USD 10 triliun, dan membuka 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030,” pungkas Bamsuet. □





H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI

Antisipatif dan Kehati-hatian di Tengah Ketidakpastian Global

INDONESIA bersama komunitas global, mau tak mau, harus mengantisipasi dampak buruk lanjutan dari konflik Rusia dengan Ukraina, serta memuncaknya ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan. Ketidakpastian global yang tereskalasi akibat dua konflik itu akan memperburuk kinerja perekonomian dunia dan Indonesia.

Sangat penting bagi semua elemen masyarakat untuk menyadari bahwa kecenderungan dinamika global saat ini benar-benar sedang tidak kondusif. Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung. Pada aspek ekonomi global, eksekusi dari konflik ini nyata karena memicu lonjakan harga energi dan beberapa komoditas bahan pangan.

Seperti masyarakat di banyak negara di Eropa yang mengeluh karena minimnya pasokan dan mahalannya harga gas, masyarakat Indonesia pun sudah merasakan eksekusi dari konflik Rusia-Ukraina itu ketika Pemerintah melalui Pertamina terpaksa harus mengatur lagi mekanisme jual-beli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Membengkaknya nilai belanja impor BBM yang disubsidi memaksa pemerintah mengatur ulang jual-beli agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Tahun ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalokasikan Rp 520 triliun untuk subsidi energy, meliputi BBM, LPG, dan listrik.

Ketika eksekusi lanjutan dari konflik Rusia-Ukraina terus dihitung dan coba diantisipasi, faktor memuncaknya ketegangan Tiongkok dengan Taiwan

mau tak mau juga harus diperhitungkan dan diantisipasi. Kedua negara sudah unjuk kekuatan persenjataan masing-masing. Bahkan, masyarakat Taiwan sudah memperkirakan keadaan terburuk. Tempat parkir, pusat belanja, dan stasiun bawah tanah di Taiwan telah dipersiapkan sebagai tempat perlindungan dari serangan udara.

Wajar jika para pemimpin negara dan lembaga-lembaga multilateral menyuarakan kecemasan. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo pun sudah menyuarakan kekhawatiran itu. Senin (8/8) lalu, giliran Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, mengingatkan bahwa ketegangan Tiongkok dengan Taiwan bisa saja berkepanjangan, karena faktor keterlibatan Amerika Serikat (AS). Pemimpin Singapura itu mencemaskan potensi salah penghitungan saat Tiongkok dan Taiwan saling unjuk kekuatan persenjataan.

Baik Presiden Joko Widodo maupun Perdana Menteri Singapura memperingatkan bahwa situasi global yang tidak kondusif seperti sekarang ini akan berlanjut hingga tahun 2023. Artinya, dalam skala lebih luas, dunia sedang menyongsong resesi karena ketidakpastian yang tereskalasi dan berlarut-larut. Momentum pemulihan ekonomi global dari kerusakan akibat dua tahun lebih Pandemi Covid-19 terlewatkan begitu saja karena konflik yang melibatkan sejumlah negara.

Untuk meminimalisir eksekusi ketidakpastian itu, Indonesia dan banyak negara lain harus antisipatif.

Mengandalkan sumber daya yang tersedia, perekonomian nasional harus dikelola dengan sangat berhati-hati untuk meminimalisir efek dari resesi global itu. Situasinya memang menuntut kehati-hatian dan kearifan, agar resesi global tidak menimbulkan kesulitan bagi semua elemen masyarakat.

Masyarakat Indonesia patut bersyukur karena perekonomian nasional masih tumbuh impresif di tengah ketidakpastian saat ini. Per kuartal I-2022, ekonomi Indonesia tumbuh 5,01%. Para ekonom pemerintah memperkirakan kuartal II-2022 akan tetap tumbuh di atas 5%. Menguatnya konsumsi rumah tangga, meningkatnya mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekspor serta efektivitas pengendalian Covid-19 menjadi faktor penggerak pertumbuhan. Nilai ekspor Indonesia tahun 2021 mencapai 88,29 miliar dolar AS, naik 43,56% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan yang impresif itu hendaknya tidak membuat masyarakat lengah. Dinamika global tahun mendatang belum tentu lebih baik dari tahun ini. Sebagaimana sudah dikemukakan Presiden, pemerintah terus membarui perhitungan atas APBN tahun 2023, dan berharap ada tambahan kekuatan untuk menambah dana bagi program jaring pengaman sosial yang diwujudkan dengan subsidi BBM, LPG, dan listrik.

Sebagai bagian dari langkah antisipatif, Presiden pun telah menginstruksikan ekonom pemerintah melakukan uji ketahanan atau stress test terhadap APBN 2023. Stress test perlu dilakukan dengan asumsi dinamika global masih berselimut ketidakpastian. Stress test bertujuan mengukur daya tahan sistem keuangan menghadapi skenario yang buruk.

Stress test APBN 2023 itu pun hendaknya dipahami semua elemen bangsa untuk bersiap menghadapi situasi dunia yang semakin tidak menentu pada 2023 mendatang, utamanya saat menyikapi mahalannya

harga komoditas pangan dan harga BBM.

Awal April 2022 lalu, Energy Information Administration (EIA) memperkirakan harga minyak mentah Brent sepanjang tahun 2022 ini bisa mencapai 98 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN 2022 yang 63 dolar AS per barel.

Jika kenaikan harga minyak dunia semakin tinggi, kemampuan fiskal yang memang sudah cukup terbatas untuk menyediakan tambahan subsidi guna meredam laju inflasi, menjadi semakin berat. Untuk mengantisipasi kemungkinan itu, pemerintah perlu mempertimbangkan perubahan skema pemberian subsidi energi. Misalnya, kalau selama ini subsidi berbasis pada komoditas dan bersifat terbuka, diubah menjadi subsidi langsung kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Acuanannya adalah laporan BPS yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin per September 2021 sekitar 26,5 juta orang.

Memang, mengacu pada hasil survei Bloomberg, tingkat risiko resesi Indonesia relatif kecil, hanya tiga (3) persen. Jelas jauh lebih kecil dibandingkan risiko yang dihadapi negara lain. Risiko AS mencapai 40%, Selandia Baru 33%, Korea Selatan 25%, Jepang 25%, dan Tiongkok 20%. Kendati risiko yang dihadapi Indonesia relatif kecil, antisipasi potensi krisis ekonomi tetap perlu dipersiapkan sejak dini.

Ketidakpastian global saat ini diperparah oleh dampak buruk atau efek perubahan iklim. Beberapa negara bahkan sudah menerapkan kebijakan yang protektif di sektor pangan dan energi. Menghadapi kecenderungan itu, sektor pertanian tanaman pangan dalam negeri hendaknya segera diperkuat dengan kebijakan yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada impor. Misalnya, meningkatkan luas tanam sorgum di dalam negeri sebagai pengganti gandum impor. □

Kiat Agar **Pertalite dan Solar** Bersubsidi Tepat Sasaran

Sejak bangsa ini merdeka, berbagai kebijakan dicetuskan agar rakyat hidup sejahtera, makmur, dan bahagia. Untuk itulah berbagai subsidi diberikan agar harga-harga kebutuhan pokok menjadi terjangkau. Seiring tumbuhnya kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera maka subsidi yang diberikan oleh pemerintah mulai dievaluasi dan dikurangi. Selama ini diakui dan dikatakan subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran. Orang-orang yang semestinya tidak berhak atas subsidi, di lapangan mereka secara diam-diam dapat atau menggunakan siasat agar tepat mendapatkan subsidi.

Wakil rakyat bisa dikatakan setuju dengan adanya pengurangan dan pembatasan subsidi, namun mereka tetap ingin agar proses pemberian subsidi diatur dan diawasi secara ketat agar pemberian yang dilakukan tepat sasaran, gampang diakses, dan mudah didapat.

Rencana pembatasan pembelian Pertalite dan Solar Bersubsidi merupakan berita yang ramai di masyarakat. Bagaimana menanggapi masalah yang demikian? Berikut pendapat wakil rakyat yang paham masalah tersebut.

Herman Khaeron Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat

Harus Efektif Tepat Sasaran

INDIKASI selama ini terjadinya rembesan atau ketidakefektifan terhadap penerimaan sasaran dari subsidi Pertalite maupun Solar Subsidi ini yang harus diefektifkan. Bagaimana cara mengefektifkannya, ya salah satunya dengan menggunakan aplikasi *MyPertamina*. Masyarakat harus mendaftarkan diri bila mau menikmati subsidi itu, namun di sana ada ketentuan apakah masuk kategori atau tidak dari kebijakan yang ditentukan.

Dalam program wawancara live dengan CNBC Indonesia TV (2022) itu, Herman Khaeron menegaskan, masalah subsidi harus didalami betul. Jangan sampai kita ingin sasarannya tepat kepada yang berhak menerima, sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, namun pada akhirnya tidak efektif sebab tidak sampai kepada yang benar-benar berhak menerima karena yang berhak menerima tidak bisa menggunakan aplikasi



MyPertamina. Selain dengan *MyPertamina* bisa lewat website, namun hal ini jauh dari kemampuan masyarakat. Ada pula lewat cara

ketiga, yakni dengan pendaftaran.

Pada tahun 2018, saat jadi Pimpinan Komisi VII, kita juga mengevaluasi terhadap

pelaksanaan subsidi BBM. Ada salah satu perusahaan swasta yang menyalurkan solar sudah menggunakan pembayaran yang teregistrasi. Setiap kali pembelian teregistrasi pada akhirnya pembeli di SPBU akan menjadi rutin. Seseorang akan membeli di SPBU tertentu secara rutin. Nah, ini yang diharapkan ke depan bahwa apakah subsidi terbuka efektif dengan pembatasan seperti itu atau juga bisa dilakukan subsidi tertutup

dengan cara langsung sampai kepada personal, misalnya dengan kartu dengan masing-masing memiliki besaran kisaran tertentu. Ke depan harus diawasi betul. Kami di Panja Migas akan mendalami sejauh mana sebetulnya keefektifan subsidi terhadap rakyat yang membutuhkan, dan sejauh mana sistem yang digunakan oleh Pertamina dalam rangka membatasi keefektifan penyaluran subsidi BBM.

Herman Khaeron menyebut, ketika di lapangan seseorang ingin membeli bahan bakar minyak kerap memilih. Orang yang mampu pun akan memilih yang lebih murah, Ptalite, kalau dulu memilih Premium. Pasca dihapusnya Premium dan diberlakukan Ptalite, orang memilih Ptalite, padahal semestinya untuk yang tidak disubsidi itu ada Pertamax. □

AWG

Rudi Hartono Bangun Anggota MPR Fraksi Nasdem

Sosialisasikan Kebijakan Secara Massif

RENCANA pembatasan pembelian Ptalite dan Solar Bersubsidi harus didahului dengan sosialisasi aturan yang ada. Rudi Hartono Bangun menegaskan, Pertamina harus melakukan sosialisasi massif ke daerah, karena pemakai Solar dan Ptalite adalah orang-orang menengah ke bawah dan tata cara pendaftaran aplikasi MyPertamina harus juga disosialisasikan, bagaimana cara mengaksesnya. Jadi ketika aturan pembelian dengan aplikasi MyPertamina diberlakukan, orang-orang di daerah tidak protes dan tidak bingung, (Bisnis.com, 4/8/2022).

Sosialisasi penting, sebab nantinya ada pembatasan golongan pembeli Solar dan Ptalite. Diharap Pertamina bisa menjelaskan ke rakyat di bawah. Hal demikian penting dan sekaligus sebagai pengingat jangan nanti terjadi keributan dan rakyat protes, tidak terima, karena dibeda-bedakan dalam hal pembelian Solar dan Ptalite. Soal aplikasi MyPertamina, bila aplikasi itu tidak



bisa diakses rakyat maka harus ada opsi lain. Meski diakui aplikasi MyPertamina mempunyai data base bagi orang-orang yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Pemerintah tidak bisa kaku dan petugas ngotot melarang pembelian Solar dan Ptalite, karena ini masalah hajat hidup dan

kebutuhan orang banyak.

Opsi lain, selain MyPertamina, dengan memanfaatkan kartu PKH atau surat keterangan miskin dari desa. Dengan demikian nantinya masyarakat tidak susah dalam membeli BBM subsidi ini. □

AWG

Kunjungan Delegasi Universitas Al Quds Jerusalem

Indonesia Dukung Universitas Al Quds Jerusalem

Dua orang tamu dari Universitas Al Quds Jerusalem berkunjung ke MPR dan diterima oleh Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. Maksud kedatangannya, menyampaikan program kerjasama internasional untuk keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan melalui Universitas Al Quds.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menerima Prof. Dr. Orwa Sabri, guru besar dan dekan di Universitas Al Quds Jerusalem, dan Nurullah Sahid, Ketua Lembaga Wakaf untuk Universitas Al Quds, di Ruang Kerjanya Gedung Nusantara III, Lt. 9, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/8/2022). Kedatangan kedua tamunya adalah untuk menyampaikan program kerjasama internasional untuk keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan melalui Universitas Al Quds di Jerusalem.

"Lembaga pendidikan ini sangat diperlukan oleh warga Palestina yang berada di Jerusalem. Lembaga ini memerlukan dukungan dari umat Islam di seluruh dunia agar mereka bisa eksis dan menjalankan peran-peran kependidikannya," kata Hidayat Nur Wahid, usai pertemuan kepada pers.

Hidayat menyebutkan, Prof. Dr. Orwa Sabri dan Nurullah Sahid menyampaikan bahwa Universitas Al Quds merupakan universitas resmi. Semua kegiatan di universitas ini diakui oleh pemerintah Palestina, dan karenanya tidak terkait dengan apa yang disebut dengan terorisme dan radikalisme.

"Mereka mengharapkan dukungan, bukan hanya dari Indonesia tetapi juga dukungan seluruh dunia, karena mereka bukan kelompok politik. Mereka juga bukan kelompok

militer, tetapi mereka adalah kelompok intelektual untuk kerja-kerja pendidikan dan diakui oleh pemerintah Palestina. Karena itu, jauh dari apa yang dituduhkan terkait hal-hal yang membuat orang kemudian tidak memberi bantuan," jelasnya.

Universitas Al Quds adalah universitas Palestina, dan satu-satunya universitas di dunia yang terletak di dekat tembok pemisah. Didirikan pada tahun 1984, kampus utama universitas terletak di Abu Dis dengan empat kampus lebih lanjut di Yerusalem, Sheikh Jarrah, Beit Hanina dan Rammalh (al-Bireh). Universitas Al Quds menyediakan pendidikan tinggi dan layanan masyarakat di wilayah Jerusalem serta kota-kota tetangga, desa dan kamp pengungsi di Tepi Barat.

Kepada tamunya, Hidayat menegaskan bahwa berdasarkan konstitusi di Indonesia, secara prinsip sikap Indonesia dari dulu adalah membela kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel. Bahkan, sudah ditegaskan sejak Presiden Soekarno (Bung Karno), dan Presiden Joko Widodo pun menyatakan sikap dan dukungan terhadap Palestina merdeka dan menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki utang sejarah pada Palestina karena satu-satunya negara yang belum merdeka adalah Palestina. "Sehingga sikap Indonesia memang sangat jelas mendukung Palestina

merdeka," ujar Hidayat.

Terakit dengan wakaf dan kerjasama dalam bidang pendidikan, Hidayat Nur Wahid menganjurkan agar mengomunikasikan langsung dengan lembaga resmi di Indonesia, dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia, BAZNAS, atau dengan dua Ormas terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang juga membidangi terkait zakat dan wakaf, serta kerjasama internasional.

"Mereka menyambut baik usulan itu. Tentu sebagaimana dahulu, sebelum Indonesia merdeka, para Bapak Bangsa mempersiapkan sumberdaya manusia dengan mendirikan universitas-universitas. Ada yang kemudian menjadi ITB, kemudian menjadi UI, IAIN. Itu semua disiapkan sebelum Indonesia merdeka. Peran kependidikan Universitas Al Quds untuk kemudian bisa menjaga masjid Al Aqsa sebagai bagian dari solusi terhadap permasalahan di Palestina, sebagaimana disepakati untuk hadirnya Palestina merdeka dengan ibukota Jerusalem, di mana di situ ada Al Quqs dan masjid Al Aqsa," kata Hidayat.

"Saya berharap bahwa memang kita bisa mempunyai peran untuk kemudian memastikan tentang Palestina merdeka dengan ibu kota Jerusalem. Tadi saya sampaikan sikap Indonesia adalah mendukung. Tetapi agar mereka bisa bekerja secara efektif, saya menyarankan untuk bertemu dengan Badan Wakaf, BAZNAS, atau dengan NU dan Muhammadiyah. Akan lebih baik bila Badan Wakaf, BAZNAS, NU, atau Muhammadiyah membantu Universitas Al Quds dengan sikap pemerintah Indonesia yang secara prinsip mendukung Palestina merdeka. Itu hal yang bisa dikolaborasikan," imbuhnya.

Hidayat mengungkapkan, NU atau Muhammadiyah memiliki hubungan (kerjasama) internasional. Kedua Ormas terbesar itu juga membuka beberapa cabang NU dan Muhammadiyah di luar negeri. Bahkan, Muhammadiyah mempunyai Universitas Muhammadiyah di Malaysia dan Australia. □



Fashion Indonesia **Diawali dari Kebaya**

Perkembangan fashion di Indonesia berjalan setapak demi setapak, dipengaruhi oleh tren fashion yang populer di luar negeri. Kemajuan teknologi dan kemapanan ekonomi memengaruhi geliat fashion. Fashion tak lagi sebatas pakaian, namun sudah menjadi industri besar. London, Milan, Paris, dan New York menjadi pusat mode dunia. Ada keinginan Indonesia menjadi pusat mode hijab dunia.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KEDATANGAN bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara pada waktu itu tidak hanya ingin mencari rempah-rempah hingga berujung pada kolonialisme, namun juga memperkenalkan apa yang biasa digunakan dan dipakai. Entah bagaimana *fashion*, mode, atau pakaian masyarakat Nusantara sebelum Abad XV, menurut berbagai pustaka yang ada, mulai tercatat pada Abad XV, di mana saat kedatangan Bangsa Portugis. Kaum pendatang itu memperkenalkan suatu pakaian yang disebut dengan nama Kebaya atau Kabaya.

Dalam *hubstler.com*, dijelaskan, Kebaya berasal dari bahasa Arab “Kaba” yang artinya “pakaian”. Kebaya ini diperkenalkan oleh Portugis ketika mendarat di Asia Tenggara. Pakaian ini juga bisa diartikan sebagai jenis pakaian (atasan/blouse) yang pertama kali dipakai oleh wanita Indonesia pada kurun waktu Abad XV atau Abad XVI Masehi, terutama oleh perempuan Jawa.

Dalam perjalanan waktu, Kebaya rupanya menjadi tren dan sangat digemari oleh kaum perempuan hingga Abad XVIII. Pakaian itu tidak hanya dikonsumsi oleh perempuan bangsawan, namun juga oleh kaum perempuan dari kalangan bangsa Eropa dan perempuan Cina keturunan. Kebaya dirasa cocok di iklim tropis oleh kaum perempuan dari Eropa. Tren Kebaya pada masa itu yang sangat populer membuat adanya kreasi dari pengguna sehingga muncul berbagai model. Disebut ada dua jenis model pada masa itu, yaitu: Kebaya Encim, yakni model busana yang dikenakan perempuan Cina keturunan; dan Kebaya Kutubaru, model busana bergaya tunik pendek berwarna-warni dengan motif yang cantik.

Dari sinilah selanjutnya *fashion* di Nusantara, Indonesia, berkembang dengan berbagai bentuk, gaya, dan model. Dalam *Wikipedia* diungkapkan, tren mode dipengaruhi banyak faktor, seperti iklim, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Faktor yang ada disebut dengan analisis PEST. Faktor politik yang bisa memengaruhi model, dalam web itu diceritakan, Ibu Negara Jacqueline Kennedy (istri Presiden Amerika



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Serikat John F. Kennedy) merupakan ikon modis di awal 1960-an yang memimpin tren berpakaian formal. Dengan mengenakan setelan *chanel*, gaun shift struktural Givenchy, atau mantel Cassini warna lembut dengan kancing besar, itu menciptakan penampilan yang elegan dan memimpin tren yang halus.

Saat Perang Vietnam, rupanya petaka itu juga memengaruhi mode di Amerika. Anak-anak muda di Amerika membuat gerakan yang memengaruhi seluruh negara dengan mode ber-tren penuh dengan warna-warna

neon, pola cetakan, celana jeans pendek, rompi berpunggung, dan rok. Tren yang disebut *Hippie* itu sebagai cara protes atas terjadinya Perang Vietnam.

Pengaruh-pengaruh di atas hanya membentuk mode sebagai sebatas pakaian pribadi. Mode akan menjadi tren ketika ia 'viral' atau diketahui oleh banyak orang. Nah, di sinilah pentingnya media menjadi perantara kepada masyarakat. Di awal Abad XX disebut sudah banyak beredar majalah *fashion*. Dalam majalah dipajang berbagai foto dan desain mode yang ada. Majalah mode





yang populer di masa-masa awal, seperti *La Gazette du Bon Ton*. Media yang dirintis oleh Lucien Vogel itu mulai beredar pada tahun 1912 hingga 1925. Jauh sebelum *La Gazette* terbit, disebut ada *Vogue*. Media yang beredar di Amerika ini muncul pada tahun 1892.

Dari perkembangan mode, tidak hanya sebatas pakaian yang menarik, namun mode menjadi suatu industri besar. Pelaku usaha ingin meraup keuntungan dari kebutuhan berpakaian yang semakin gaya. Dari di sinilah tumbuh pelaku-pelaku usaha mode di kota-kota, seperti London, Paris, Milan, dan New York City. Atas dasar itulah kota-kota itu disebut sebagai Kota Mode Dunia.

Menurut sejarah yang ada, silih berganti kota-kota di Eropa dan Amerika menjadi kota mode. Pada masa pencerahan, Italia disebut sebagai pusat mode. Hal demikian bisa jadi karena geliat budaya dan ekonomi di kota-kota yang ada di negara itu, seperti di Florence, Milan, Roma, Naples, Genoa, dan Venesia.

Pusat mode bergeser ke London di awal Abad XVI. Bergeser ke London bisa terjadi sebab ada pengaruh Ratu Inggris, Elizabeth. Satu abad kemudian, pusat mode bergeser ke Paris, Perancis. Faktor kekuasaan Louis XIV sangat berpengaruh terhadap bergesernya pusat mode ke Paris. Geser menggeser ini pun juga sampai ke New York

City dan ke berbagai kota dan negara. Meski geser-menggeser, empat kota di atas disebut sebagai empat besar kota mode dunia.

Di Indonesia perkembangan *fashion*, mode, pun seiring dengan kemajuan zaman, waktu, ekonomi, dan geliat kehidupan kota dan masyarakat. Dari pustaka-pustaka yang ada, sejarah dari *fashion* di Indonesia dimulai pada tahun 1950-an. *Fashion* di masa setelah lima tahun Indonesia merdeka itu, gaya busana yang tren dengan ciri busana klasik yang elegan. Gaya ini dijuluki *New Look*. Seperti dikatakan di atas bahwa faktor ekonomi sangat memengaruhi mode maka untuk membuat *New Look* tidak murah. Disebut untuk membuat satu baju membutuhkan kain sepanjang 23 meter. Dari sinilah mode ini dikatakan kebalikan dari sikap ekonomis.

Sepuluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1960-an, ada perubahan mode di Indonesia. Pada dasawarsa ini dikatakan mode Indonesia menggeliat pesat, selain ditandai dengan munculnya mode baru juga hadirnya *desainer* Adriana Paula Adeline Kawilarang dan Peter Sie. Pada masa ini gaya mode yang ada lebih berwarna, bervariasi, elegan, dan chic ala Jackie O. Gaya pakaian dari Ibu Negara Jacqueline Kennedy yang jauh di Amerika berpengaruh di sini.

Perkembangan *fashion* di Indonesia di tahun 1970-an semakin semarak dan bervariasi. Hal demikian bisa terjadi sebab pada masa itu lahir banyak *desainer* di Indonesia. Mereka seperti Irwan Tirta, Poppy Dharsono, Harry Dharsono, Prajudi, dan Ramli. Karya mereka tidak hanya dipamerkan di Indonesia, namun juga di luar negeri. Apa yang telah ditunjukkan oleh *desainer* anak bangsa itu menunjukkan bahwa ada dunia mode di tanah air.

Sumber lain mengungkapkan, pada masa ini mode yang ada identik dengan gaya *hippies* dan gaya *disco* dengan dominasi celana bell bottom dan kemeja pas badan dengan kerah super lebar.

Seperti dipaparkan di atas bahwa perkembangan mode dunia bisa viral karena adanya media, maka di Indonesia juga demikian. Munculnya majalah *Femina* pada



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

tahun 1972, semakin mempercepat perkembangan mode di tanah air. Majalah itu tidak hanya menyajikan berita, namun juga mendorong maju dan tumbuhnya mode. Dari majalah itu digagas lomba *fashion desainer*. Lomba yang digelar pada tahun 1979 itu mampu melahirkan *desainer* muda yang penuh talenta, seperti Chossy Latu, Edward Hutabarat, dan Samuel Watimena.

Dalam berbagai pustaka yang ada, di tahun 1980-an diungkapkan tidak ada munculnya *desainer* baru seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Di masa ini hanya diceritakan mode dengan gaya 'powerful women'. Gaya busana dengan siluet besar,

padding yang menonjol di bagian bahu, besar, dan cenderung longgar juga permainan detail dan aksesoris berukuran besar seperti kancing serta warna yang kontras.

Seiring perkembangan teknologi maka perkembangan mode di Indonesia semakin tumbuh. Di tahun 1990-an, zaman sudah semakin maju, teknologi dan media pun semakin beragam. Hal ini semakin menumbuhkan mode hadir di tengah berbagai lapisan masyarakat. Tak hanya itu, di masa ini juga hadir *desainer* seperti Sebastian Gunawan, Biyan, Adjie Notonegoro, dan Eddy Betty.

Dalam *riraclotthing.com* diceritakan tahun 1990-an merupakan masa di mana gaya in-

dividual terlihat semakin berani. *Desainer* yang ada hadir dengan keunikan sendiri yang mencerminkan karakter masing-masing. Ada yang menampilkan gaya busana serba tumpuk ber-aura vintage, ada yang bergaya maskulin. Ada juga yang bergaya cantik, terkesan mewah dan elegan hingga yang bergaya unik.

Seiring semakin majunya zaman serta banyaknya sekolah mode baik di dalam dan luar negeri, bahkan di SMK pun ada jurusan tata busana, maka di tahun 2000-an lahir banyak *desainer* baru dan muda, tidak hanya di Jakarta namun juga di kota-kota lainnya di Indonesia. Hadirnya *desainer* tersebut tentu memperkaya produksi mode. Mereka memadukan berbagai unsur yang ada, baik dari luar dan dalam negeri. Unsur-unsur budaya yang sebelumnya diabaikan, menjadi terangkat kembali setelah *desainer* itu menjadikan sebagai dari karyanya.

Dalam *www.academia.edu*, disebutkan pihak yang berperan dalam perkembangan desain busana di Indonesia adalah APPMI (Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia). Mereka yang di asosiasi ini adalah perancang, pengusaha, dan pihak-pihak yang bergerak dalam *fashion* retail dan ekspor. APPMI memiliki program tahunan, *Fashion Tendance*, yang diadakan sejak tahun 1993 dan masih berlangsung hingga saat ini. Dalam *Fashion Tendance* ditampilkan *fashion show* di mana menampilkan prediksi trend *fashion* di tahun yang akan datang dengan tujuan untuk memberikan suatu arahan komprehensif mengenai beberapa konsep rancangan terkini untuk versi APPMI kepada masyarakat yang luas.

Pendiri APPMI, Poppy Dharsono, mengatakan, setiap tren yang ditampilkan pada *Fashion Tendance* merupakan hasil kombinasi dari inspirasi *fashion* manca negara, terutama Eropa dan karakteristik masyarakat Indonesia. Di mana hal ini akan menjadi sebuah acuan *fashion* yang menjadi paling digemari adalah dari benua Eropa, seperti Paris dan Milan. Selain karena desain yang cukup sederhana namun juga klasik. □

AWGI dari berbagai sumber



Poppy Dharsono



Revolusi Gaya Busana dari Citayam Fashion Week

Kesan fashion yang terbangun sebagai ruang yang glamour, mewah, dan hanya bisa dinikmati kalangan atas, menjadi buyar setelah sekelompok anak muda berlenggak-lenggok di kawasan Stasiun Dukuh Atas, Jakarta. Aktivitas mereka yang selanjutnya disebut Citayam Fashion Week mampu merevolusi terhadap anggapan dunia fashion. Fashion rupanya bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

JALAN Tanjung Karang dan Jalan Blora, Jakarta, awalnya adalah laluan bagi pengguna kendaraan bermotor untuk berputar balik arah dari Jl. Jenderal Sudirman ke arah Bundaran Hotel Indonesia atau sebaliknya. Sebagai laluan putar balik, setiap hari, terutama jam-jam kerja, di sepanjang jalan terjadi kepadatan. Apalagi di kawasan itu ada Stasiun Sudirman. Ditambah dengan trotoar yang lebarnya tak lebih dari 2 meter membuat suasana di sana menjadi tak nyaman, bising, dan macet.

Ketika pembangunan MRT usai, di Jl. Tanjung Karang, di atas stasiun MRT yang berada di bawah tanah dibangun ruang terbuka hijau. Tak hanya itu, terowongan penghubung kedua jalan, yang disebut Terowongan Kendal atau Terowongan Dukuh Atas, ditutup dari arus lalu lintas. Hal demikian membuat suasana di sana menjadi berubah drastis. Ruang yang ada, terutama di terowongan dan Jl. Tanjung Karang menjadi lengang, nyaman, dan bebas atau berkurang dari pergerakan kendaraan bermotor. Kondisi seperti itu membuat ruang terbuka hijau dan terowongan yang ada menjadi ajang berkumpul, bersosialitas, dan berkreasi masyarakat.

Dari waktu ke waktu, terowongan, ruang terbuka Stasiun MRT, dan Jl. Tanjung Karang, menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda dari berbagai tempat, selain dari Jakarta, datang dari Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang bahkan dari Cikarang hingga Lebak. Di sana anak-anak muda, terutama pada hari libur, Sabtu, dan Minggu, kongkow-kongkow. Sambil kongkow-kongkow, mereka juga membikin video, foto, atau swafoto.

Suasana di sana semakin viral setelah ada unggahan di tiktok atau media sosial lainnya yang menayangkan anak-anak muda ber-*fashion show* di atas zebra cross. Anak-anak yang disebut berasal dari Citayam, Depok, dan Bojonggede itu rupanya membuat revolusi *fashion*. Tempat yang awalnya difungsikan sebagai ruang terbuka hijau dan Terminal Transjakarta berubah menjadi tempat ajang adu mode. Viral mereka di media sosial membuat arena di sana disebut Citayam Fashion Week (CFW).

Apa yang mereka buat, awalnya bisa jadi suatu keisengan atau mengisi waktu luang menjadi suatu gerakan *fashion* yang massal, masif, dan menjalar ke berbagai tempat, kota, dan daerah bahkan disebut hingga Thailand.

Akhirnya mereka yang berlenggak-

lenggok di sana tidak hanya anak-anak yang berasal dari daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, terutama Citayam, Bojonggede, dan Depok, namun dari berbagai tempat. Tak hanya itu, mereka yang berada di sana, tidak hanya masyarakat biasa namun sudah tergolong artis, selebritis, selebgram, bahkan hingga Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Bila anak-anak muda awalnya berlenggak-lenggok bak model hanya menggunakan pakaian yang dibeli di pasar-pasar tradisional, pasar loak, bahkan barang pinjaman dari saudara, teman, atau kerabat, selanjutnya mereka yang berlenggak-lenggok di sana sudah menggunakan pakaian-pakaian yang ber-merk. Mereka yang tampil di sana tidak lagi secara alamiah atau spontan, namun sudah dirancang oleh para fotografer atau videografer profesional.

CFW yang mereka buat dan diunggah ke media sosial secara masif oleh banyak pihak menciptakan dunia *fashion* jalanan di Indonesia. Setiap hari, terutama di awal-awal tren, berbagai televisi menyiarkan aktivitas di sana. Tayangan yang ada memicu dan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

memacau masyarakat menjadi ingin tahu dan paham dunia *fashion*. Dari aktivitas itu dunia *fashion* semakin memasyarakat. Istilahnya mem-*fashion*kan masyarakat dan memasyarakatkan *fashion*.

CFW tidak berhenti di kawasan yang berlokasi di Dukuh Atas. Kegiatan itu menular di berbagai daerah, tidak hanya di kota-kota besar seperti Yogyakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Malang, namun juga hingga Madiun, Ponorogo, bahkan di daerah-daerah kecil di luar Jawa. Di Makassar, Sulawesi Selatan, anak-anak muda di sana melakukan seperti anak-anak muda di Jakarta di kawasan yang disebut *Center Point of Indonesia* (CPI). Di zebra cross, anak muda, baik perempuan atau laki-laki, berlenggak lenggok secara bergantian. Seorang warga di sana menyebut, "di Jakarta ada Slebew, di Makassar ada Pakintaki, rong".

Masifnya kegiatan tersebut rupanya membuat pemerintah daerah kewalahan.

Tingginya animo masyarakat untuk mencoba dan menikmati dunia *fashion* membuat mereka turun tangan untuk mengelola. Tidak hanya masalah lahan atau tempat yang disediakan, namun juga agar bagaimana potensi yang ada menjadi daya dorong meningkatnya sektor perdagangan, ekonomi, UMKM, dan pariwisata.

Dari aktivitas yang awalnya dilakukan oleh anak-anak muda yang berasal dari kawasan penyangga Jakarta, akhirnya membuat pemerintah daerah peduli dan memfasilitas dunia *fashion* yang rupanya juga digemari oleh warga, terutama anak-anak muda. Mereka yang awalnya tidak peduli atau hanya menyerahkan masalah ini pada swasta, akhirnya menjadi peduli.

Buktinya, Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai imbas dari CFW, menggelar acara serupa yang disebut dengan *Surabaya Fashion Street* atau *Mejeng Nang Suroboyo*. Dalam *detik.com*, 9/8/2022, diberitakan kegiatan *Mejeng Nang*

Suroboyo merupakan wadah dari Pemerintah Kota Surabaya sebagai bentuk kreativitas masyarakat dalam bidang *fashion*. Diadakan di Balai Pemuda, Alun-Alun Ponorogo, agar tidak menjadikan zebra cross di jalan sebagai *catwalk* agar menimbulkan kemacetan. Lebih lanjut diberitakan, pemerintah kota juga menyediakan *red carpet* untuk warga yang ingin tampil *kece* dengan *style fashion* masing-masing. Tidak hanya model profesional saja yang bisa ikut, tetapi juga warga secara umum.

Aktivitas yang dilakukan di Dukuh Atas, CFW, mampu membalikkan anggapan masyarakat terhadap dunia *fashion* selama ini. Stigma masyarakat terhadap dunia *fashion* selama ini adalah merupakan dunia yang glamour, mahal, mewah, dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan atas atau yang punya banyak duit. Untuk menjadi *desainer* pun, mereka harus belajar ke Paris, Milan, London, New York, dan di kota-kota lainnya di Eropa dan Amerika Serikat. Dan, untuk pentas *fashion show* harus dilakukan di gedung, hotel, atau tempat-tempat yang mewah dan *lux*. Untuk menonton acara itu tentu harus mengeluarkan biaya yang tidak murah. Jadi dunia ini hanya bisa dinikmati kalangan tertentu.

Setelah sosok Bonge, Kurma, Mujair, dan Blender tampil di CFW, pikiran masyarakat berubah total. Rupanya *fashion* bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. □

AWGI/dari berbagai sumber





Dari Jember Menuju **Fashion Dunia**

Keinginan untuk menghadirkan pentas fashion di jalanan di Jember mendapat penolakan dari pemerintah setempat. Alasannya, pakaian yang diunjukkan dan kegiatan seperti itu bukan gaya atau mode masyarakat setempat. Sang penggagas pun terus maju walau mendapat tantangan semacam itu. Dalam perjalanan waktu, akhirnya kegiatan yang disebut JFC itu mampu menjadi daya tarik Jember bagi masyarakat luas, terutama desainer, model, dan masyarakat penyuka busana. Pemerintah setempat yang awalnya menolak sekarang menjadi pendukung penuh acara. Bahkan, mereka menggunakan acara itu sebagai upaya membawa Jember ke fashion dunia.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KABUPATEN Jember merupakan suatu wilayah yang berada di Jawa Timur. Letak kabupaten ini diukur dari Ibu Kota Jawa Timur, Surabaya, terbilang sangat jauh. Bila menggunakan kendaraan roda empat, jarak tempuhnya sekitar 6 jam. Dengan perjalanan menggunakan kereta api, waktu tempuhnya lebih cepat apalagi menggunakan pesawat terbang, kurang dari 1 jam. Jadi, banyak cara untuk menuju ke kabupaten yang terkenal dengan produksi tembakau itu. Bisa naik kendaraan roda dua, roda empat, kereta api, dan pesawat terbang.

Kabupaten yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia atau Laut Selatan itu memiliki banyak potensi, mulai dari potensi alam, budaya, wisata, dan pendidikan. Dari sektor perkebunan, Jember tidak hanya sebagai gudang tembakau, namun juga ada kopi. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Jember, dari tahun 2008 hingga 2010, ada peningkatan luas lahan kopi serta produksinya. Pada masa itu, bertambahnya lahan sebesar 9 hektar, mampu membuat produksi kopi di sana meningkat hingga 13,67%. Jenis kopi yang cocok dibudidayakan di sana adalah jenis robusta, cocok dengan iklim di Jember.

Sebagai daerah yang dilingkupi gunung dan berbatasan dengan laut membuat kabupaten seluas 3.092,34 kilometer persegi itu memiliki beragam flora dan fauna. Nah, kekayaan alam itu dapat dinikmati di tempat-tempat wisata yang ada. Salah satu dari tempat wisata di sana adalah Taman Nasional Meru Betiri. Di taman nasional yang wilayahnya beririsan dengan Kabupaten Banyuwangi ini terhampar Pantai Bandealet, pantai Rajegwesi, Pantai Teluk Hijau, Pantai



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Sukamade, dan Pantai Batu.

Taman nasional seluas 58.000 hektare merupakan lokasi untuk penangkaran berbagai jenis penyu, seperti penyu belimbing, sisik, hijau, dan lekang. Tak hanya fauna langka ada di sana, di taman itu juga tumbuh flora yang dilindungi, yakni *Rafflesia Zollingeriana*. Flora ini merupakan flora endemik wilayah itu.

Sebagai kabupaten yang terbilang jauh dari Surabaya, Jember juga merupakan tujuan pelajar dari berbagai daerah untuk menimba ilmu. Di kabupaten ini banyak perguruan tinggi negeri yang siap menampung pelajar dari berbagai daerah, tidak hanya dari Jawa Timur namun juga dari seluruh Indonesia. Perguruan tinggi negeri

yang ada di sana adalah Universitas Negeri Jember, Politeknik Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, IKIP Jember, dan Institut Agama Islam Negeri Jember. Di samping perguruan tinggi negeri juga ada perguruan tinggi swasta, seperti Universitas Muhammadiyah Jember dan Universitas Islam Jember.

Daya tarik salah satu kota besar di Jawa Timur itu bertambah ketika di sana setiap tahun rutin digelar *Jember Fashion Carnival* (JFC). Carnival tersebut, berdasarkan berbagai sumber yang ada, disebut bermula dari keberadaan rumah mode yang didirikan oleh Dynand Fariz. Setelah melalui berbagai proses, JFC kali pertama digelar pada 1 Januari 2003



bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Jember.

Dalam perjalanan waktu, JFC yang awalnya kurang direspon oleh pemerintah kabupaten, akhirnya menjadi suatu kegiatan yang mendapat sambutan luar biasa, tidak hanya dari masyarakat setempat namun juga masyarakat luar dan kalangan mode. JFC akhirnya menjadi salah satu daya tarik orang untuk pergi ke Jember. Kegiatan itu pun saat ini mendapat dukungan dan perhatian penuh dari pemerintah setempat.

Dengan semakin terkenalnya JFC membuat Bupati Jember, Hendy Siswanto, mencanangkan JFC sebagai karnaval dunia. Pencanangan tersebut dilakukan setelah JFC terselenggara selama 20 tahun. Dalam satu berita online pada 6 Agustus 2022, Hendy Siswanto mengatakan, dirinya mencanangkan JFC sebagai karnaval fesyen (*fashion*) dunia di Kabupaten Jember. Dia mengapresiasi JFC yang telah melakukan peragaan busana di jalan selama 20 tahun terakhir. Kegiatan tersebut diakui telah memberi inovasi yang spektakuler dalam karnaval tidak hanya di Indonesia, namun juga dunia. Kegiatan tersebut diakui mampu mendongkrak sektor perekonomian masyarakat, terutama UMKM.

Dalam berita yang beredar, JFC 2022 menyuguhkan peragaan busana terbaik yang pernah digelar dari 2011 sampai 2019. Tak hanya itu, banyak pentas busana yang bertajuk Poseidon, Madurase, Mahabharata, Betawi, Majapahit, Garuda, Sriwijaya, Kujang, Aztecs, dan Sasando.

Dalam perjalanan waktu, JFC mampu mengundang para desainer, para model, dan artis untuk datang ke Jember dan menunjukkan karyanya atau menjadi model di sana. Desainer Anne Avantie pada JFC 2019 juga hadir dalam acara itu. Dalam fashion yang digelar, karya Anne didominasi warna hitam yang terdiri dari kebaya dengan ekor dramatis hingga jumpsuit bermotif batik. Di kepala model diberi aksesoris dilengkapi payung hitam. Selain Anne yang pernah tampil di sana, ada pula Putri Indonesia 2019 Frederika Alexis Cull dan Cinta Laura. □

AWGI dari berbagai sumber

Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya

Ketum PHDI

Konstitusi Muncul dari Kepekaan dan Kejeniusan Pendiri Bangsa

NI suatu kehormatan buat saya pribadi dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) umumnya. Peringatan Hari Konstitusi ini membawa kita pada jejak sejarah puluhan tahun lalu, di mana para Bapak Bangsa, pendiri negara kita, meletakkan satu pondasi bernegara yang kuat tanpa melihat perbedaan.

Konstitusi Indonesia itu bukan hasil pemikiran yang sembarangan. Itu muncul dari kepekaan dan kejeniusan para pendiri bangsa. Coba lihat dalam pembukaannya saja, di alinea keempat itu sarat panduan mau kemana tujuan negara ini ke depan, yang berbunyi: 'Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia'.

Ditambah lagi, di dalam alinea keempat itu terdapat sila-sila Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Dengan Pancasila, bangsa ini bisa direkatkan. Perbedaan yang sangat kompleks di Indonesia berhasil disatukan dalam wadah NKRI, dan sudah terbukti dengan Pancasila kita mampu menghadapi semua tantangan bangsa.

Konstitusi sebagai dasar hukum bangsa Indonesia harus dijunjung tinggi. Untuk itu, kita sebagai rakyat harus menghormati konstitusi dalam bentuk mematuhi dan menegakkan semua aturan turunan dari konstitusi dalam bentuk UU sampai peraturan di tingkat pusat dan daerah.

Saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk saling bekerjasama, berkolaborasi untuk menjaga dan menjalankan konstitusi dan semua hal baik yang ada didalamnya.

Momen Peringatan Hari Konstitusi inilah kesempatan bersama untuk saling bersinergi, saling berpegangan tangan, saling instropeksi dan saling mengisi untuk membangun negeri ini sesuai dengan tema besar Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-77 Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat. □



DER

Prof. Dr. Sofian Effendy

Pakar Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

PPHN Adalah Wujud Pelaksanaan Pancasila



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PPHN adalah pelaksanaan dari Pancasila, salah satunya sila kelima, karena tujuan negara dibentuk adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PPHN adalah alat untuk mencapai keadilan tersebut.

Untuk menyusun haluan negara itu perlu dukungan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sebagai lembaga yang menjadi representasi kedaulatan rakyat, MPR adalah lembaga yang tepat untuk menyusun PPHN dengan TAP MPR menjadi instrumen untuk menghidirkannya.

Kenapa melalui TAP MPR, sebab yang memegang kekuasaan konstitutif negara ini adalah MPR. Jadi intinya, jika PPHN ini adalah pelaksanaan dari kedaulatan rakyat maka harus dihadirkan lewat TAP MPR. □

DER

Perjuangan Rudi Bacok

Perintis Penanaman Mangrove Berbuah

Kalpataru Bidang Lingkungan

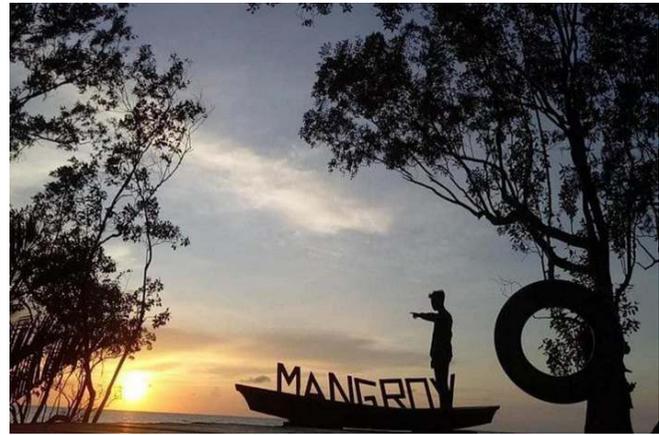


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PENERIMA penghargaan Kalpataru tahun 2022 adalah seorang pemuda berusia 27 tahun warga Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan. Rudi Hartono alias Rudi Bacok, nama pemuda berprestasi kelahiran 1995 itu. Pada Juli silam, Rudi mendapat penghargaan Kalpataru kategori perintis lingkungan. Dari sekian banyak penerima Kalpataru yang pernah ada sebelumnya, Rudi termasuk penerima penghargaan Kalpataru paling muda.

“Yang muda yang berprestasi,” itu sebutan yang tepat diberikan kepada Rudi. Usia mudanya tak disia-siakan. Dia berbuat sesuatu untuk kemajuan desanya, terutama dalam hal memperbaiki ekosistem kawasan pesisir di ujung Sungai Kapuas. Berawal dari keprihatinannya terhadap bencana banjir rob dan terjangannya angin ribut yang selalu merusak pemukiman penduduk. Rob dan angin ribut ini menjadi penyebab terjadinya kerusakan sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di Desa Sungai Kupah.

Dari analisa Rudi, kerusakan yang terjadi di Desa Sungai Kupah itu disebabkan oleh rusaknya ekosistem di kawasan pesisir di ujung Sungai Kapuas. Satu-satunya cara

untuk mengatasinya adalah dengan memperbaiki ekosistem di kawasan itu. Maka, mulai tahun 2017, Rudi pun merintis penanaman pohon mangrove. Untuk itu, dia melakukan penyadaran dan mengedukasi masyarakat dalam hal perbaikan ekosistem dengan menanam mangrove, terutama penanaman mangrove berbasis digital di Indonesia.

Rudi juga mengajak masyarakat setempat untuk melakukan pembibitan mangrove, memanfaatkan sabut kepala, daun nipah dan

daun pandan untuk anyaman. Serta menginisiasi penyadaran masyarakat untuk mengelola sampah. Dan, Rudi melakukan semua itu, karena dia sadar betul pemerintah setempat tidak memiliki cukup anggaran untuk memperbaiki sarana infrastruktur yang rusak.

Berkat kerja keras Rudi dan kawankawan, kawasan pesisir di ujung Sungai Kapuas itu bukan hanya dapat melindungi kawasan itu dari bahaya rob dan angin ribut, namun juga menjadi tempat yang nyaman





buat habitat hewan Bekantan, sejenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna cokelat kemerahan. Bekantan ini merupakan hewan endemic pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau dan hutan pantai. Maka, tak heran, hewan bekatan ini menjadi salah daya tarik kaum wisatawan berkunjung ke sana.

Sebenarnya, ada empat kegiatan utama yang dilakukan Rudi dan kawan-kawan, dalam pemberdayaan lingkungan. Selain pemanfaatan teknologi terkait penanaman mangrove digital, juga pemanfaatan limbah sabut kelapa dijadikan cocopeat dan coco fiber, pemanfaatan limbah plastik untuk dijadikan paving block. Terakhir pemanfaatan limbah daun nipah untuk dijadikan polibag sebagai bahan pengganti plastik.

Apa yang dilakukan Rudi dan kawan-kawan ini ternyata melambungkan namanya di tingkat nasional. Rudi sempat menjadi juara kedua Pemuda Pelopor tingkat nasional tahun 2020. Berbekal keberhasilan tersebut, kelompok pemuda Karang Taruna Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, kemudian mengusulkan Rudi untuk menjadi penerima anugerah Kalpataru Bidang Lingkungan tahun 2022. Harapan tersebut terasa makin dekat untuk diraih, setelah ia berhasil masuk dalam 20 besar nominasi seluruh Indonesia.

“Setelah itu, ada penjurian lewat zoom. Saya mempresentasikan kegiatan kami di Sungai Kupah. Kemudian Mei 2022 ada tiga orang wakil dari Kementerian Lingkungan Hidup datang meninjau ke tempat kami selama tiga hari. Mereka juga menanyai Kepala Desa, Ketua RT, dan warga setempat untuk memverifikasi kebenaran data yang telah kami berikan,” kata Rudi.

“Berkat program itu, saya berhasil masuk 10 besar dan menerima penghargaan Kalpataru 2022 bersama Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Bupati Lumajang,” tutur Rudi Hartono.

Rudi Bacok

Rudi Hartono atau yang lebih dikenal dengan sapaan Rudi Bacok, memulai usahanya merintis perbaikan ekosistem mangrove di Desa Sungai Kupah penuh halangan dan rintangan. Tahun 2017, Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Tanjungpura itu menyampaikan niatnya merintis perbaikan ekosistem mangrove kepada 40 orang temannya, yang sebagian di antaranya teman sejak kecil.

Tetapi, hanya sebagain kecil yang terketuk dan mendukung rencana Rudi Bacok. Tersisa enam orang temannya yang tergerak untuk bersama-sama mendukung serta merealisasikan gagasan perbaikan ekosistem mangrove. Rudi tidak patah

arang, ia tetap menjalankan niatnya merintis perbaikan ekosistem mangrove. Di awal langkahnya itu banyak orang dekat dan temannya yang mencibir. Mereka mengatakan, tidak akan ada orang yang berkenan datang, kecuali monyet.

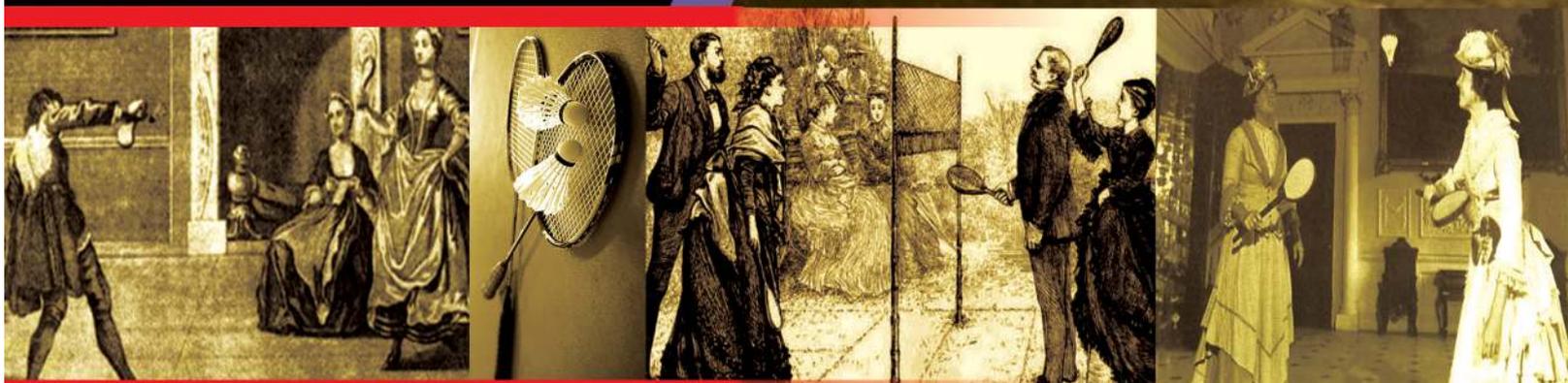
Setelah bersusah payah dan melakukan berbagai perjuangan, kerja keras Rudi Bacok dan teman-temannya itu mulai tercium pemerintah setempat. Tahun 2019 Rudi dan teman-temannya mendapat bantuan pembangunan lintasan mangrove atau pembuatan jalan dari kayu dan juga pendirian gazebo. Juga beberapa fasilitas lainnya.

Saat ini, hutan mangrove seluas 15 hektar yang diberdayakan Rudi Bacok, makin dikenal masyarakat. Tempat tersebut dikenal dengan nama Kawasan Ekowisata Telok, berdiri di Sungai Kupah Kubu Raya Kalbar. Tepatnya berada di pesisir pulau Kalimantan berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan.

Nama Kawasan Ekowisata Telok pun terus menjadi buah bibir. Banyak wisatawan datang untuk menikmati ketenangan dan suasana alam mangrove. Apalagi, kegiatan yang dilakukan di sana selalu mendapat respon baik dari berbagai kalangan. Termasuk pengakuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada penggagas Kawasan Ekowisata Telok, Rudi Bacok. □

MBO

Sejarah Olahraga Bulutangkis



Berkat Tentara dan Bangsawan Inggris

Saat membangun koloni di berbagai belahan dunia, Inggris memasyarakatkan badminton kepada penduduk setempat. Proses hingga terwujud olahraga ini setelah dimodifikasi oleh tentara dan keluarga bangsawan Inggris. Sebutannya berubah-ubah dari poona, battledore, hingga akhirnya bernama badminton.

Meski jauh dari Inggris, badminton mendarah daging pada masyarakat Indonesia. Dari kampung hingga kota, terlihat lapangan-lapangan badminton di tengah masyarakat. Indonesia mengukir prestasi di cabang olahraga ini. Di pesta olahraga dunia, Olimpiade, badminton merupakan salah satu tambang emas.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ENTAH apa yang dirasakan oleh pasangan ganda bulutangkis Indonesia, Greysia Polii dan Apriyani Rahayu, saat diterima Presiden Joko Widodo, 13 Agustus 2021, di Istana Presiden Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Sebagai rakyat Indonesia, masuk Istana Bogor tentu merupakan kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri, sebab tidak setiap orang bisa menginjakkan kakinya di istana yang sudah berumur ratusan tahun itu.

Kebahagiaan yang dirasakan oleh dua srikandi bulutangkis (badminton) pada hari itu tak hanya berkesempatan menghirup udara segar di istana, namun keduanya menerima bonus masing-masing Rp 5,5 miliar. Bonus sebesar itu diberikan kepada pasangan ganda putri Indonesia ini atas kesuksesan mereka meraih medali emas dalam Olimpiade Tokyo 2020. Dalam olimpiade yang berlangsung pada tahun 2021 itu, Greysia/Apriyani mampu mengalahkan ganda Cina, Qing Chen Chen/Yi Fan Jia. Kemenangan itu membuat Kontingen Indonesia mampu meraih satu-satunya medali emas.

Bulan Agustus tahun ini, bisa jadi Greysia/Apriyani merupakan orang kaya baru (OKB) di Indonesia. Bonus yang diterima tidak hanya dari Presiden Joko Widodo. Gubernur Jakarta Anies Baswedan, serta berbagai pihak yang lain pun mengganjar bonus untuk mereka berdua, nilainya *wooo...* bikin orang iri, sehingga sampai ada yang mengatakan, "mending saya jadi atlet bulutangkis saja". Bagaimana orang tidak iri, bonus yang mereka diterima hanya berupa uang yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah, namun juga bonus rumah, apartemen, dan makan gratis di restoran seumur hidup.

Orang lain boleh kepingin atau iri pada bonus yang diterima oleh Greysia/Apriyani, namun kedua srikandi bulutangkis itu memang berhak menerima semuanya. Perjuangan yang mereka lakukan di negeri Matahari Terbit selama olimpiade itu penuh dengan cucuran keringat dan menguras tenaga. Berkat perjuangan yang mereka lakukan di lapangan badminton, membuat nama Indonesia terangkat dalam *ranking* perolehan medali.



Greysia dan Apriyani bersama Presiden Jokowi

Greysia/Apriyani meraih emas dan menerima guyuran bonus bukan dengan cara *sim salabim*. Sebelum berangkat ke Tokyo, mereka terlebih dahulu harus menjalani berbagai macam latihan dan pertandingan yang pastinya melelahkan. Air mata, cucuran keringat, dan cedera pasti pernah mereka rasakan. Buah kerja keras dan kesabaran itu hingga akhirnya mencapai puncak kesuksesan, medali emas.

Badminton merupakan salah satu cabang andalan Indonesia untuk meraih medali dalam *Asian Games* maupun Olimpiade. Sejak Olimpiade Barcelona, Spanyol, hingga Tokyo, Jepang, olahraga ini satu-satunya tambang emas bagi Indonesia. Oleh pemerintah pastinya tradisi ini terus dijaga dan dirawat hingga nanti.

Badminton di Indonesia merupakan kegiatan olahraga yang populer, selain sepakbola. Di setiap rukun tetangga di Jakarta, memiliki lapangan bulu tangkis. Pun demikian di berbagai sudut kampung dan lingkungan di seluruh Indonesia. Biasanya masyarakat demam bermain bulutangkis selepas atlet dan tim Indonesia meraih prestasi yang membanggakan, misalnya selepas meraih *Thomas Cup*.

Meski olahraga ini sangat populer, merakyat, dan bahkan sudah menjadi bagian hidup masyarakat, namun asal usul badminton bukan dari Indonesia. Olahraga ini memiliki sejarah yang panjang hingga wujudnya bisa seperti saat ini.

Cikal bakal olahraga yang konon sudah dipertandingkan orang lebih dari 2000 tahun

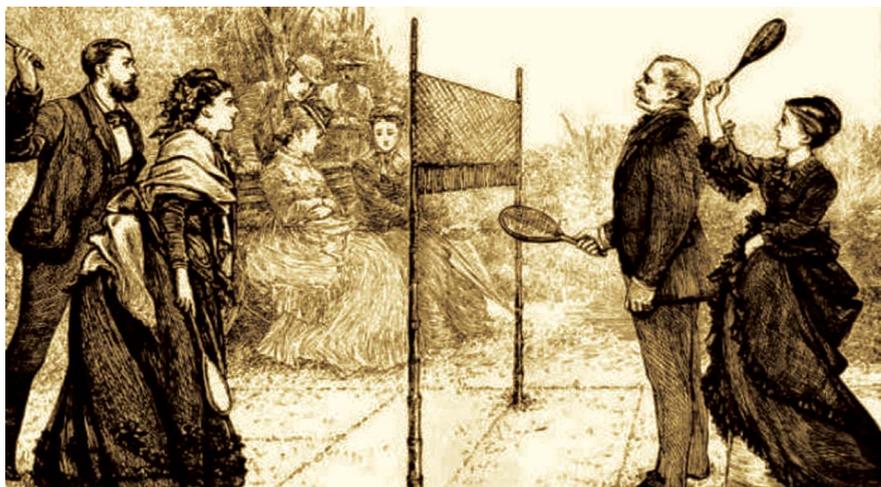


FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

lamanya. Aparatur dan birokrat Inggris silih berganti datang dan pergi di India untuk pergantian tugas. Tentara Inggris yang mengkreasikan *battledores* menjadi *poona* pun membawanya kembali ke negaranya ketika mereka ditarik pulang (1850).

Terkait soal pemasangan net yang memisahkan pemain *battledores* ada versi lain. Di Inggris pada masa itu hiduplah keluarga kaya nan bangsawan, Duke of Beaufort VII. Ia tinggal di Gloucester-shire, 200 kilometer, sebelah barat London. Keluarga bangsawan itu memiliki 11 anak, 7 laki-laki dan 4 perempuan. Sebagai keluarga kaya, rumah mereka memiliki halaman dan bangunan yang luas. Di halaman dan di dalam rumah, anak mereka kerap bermain *battledores*. *Saking* kerapnya bermain, sampai-sampai mereka bosan sendiri. Agar mereka tidak bosan bermain *battledores*, di antara anak itu membentangkan tali yang memisahkan

mereka. Cara bermain pun berubah, kok yang ada harus dilewatkan atau melewati tali.

Duke of Beaufort tidak hanya memfasilitasi anak mereka bermain *battledores*, namun pada 1840 dan 1850 sering mengadakan pertandingan. Jadi keluarga ini sebagai 'sponsor' perkembangan permainan itu pada masanya. *Saking* cintanya terhadap permainan itu dan sambutan masyarakat yang masif, keluarga itu membangun suatu gedung yang dinamakan *Badminton House*. Isaac Spratt, penyedia peralatan olahraga dan permainan, 1860, menulis dalam koran dengan judul: *Badminton Battledore—a new game*. Dari sinilah awalnya *poona* atau *battledores* selanjutnya bernama *badminton*. Nama itu melekat hingga saat ini.

Dari waktu ke waktu, badminton mendapat perhatian masyarakat. Agar permainannya jelas, pada 1877, insan badminton di Inggris membuat aturan. Jangkauan pemain pun

semakin meluas hingga pada 1893 dibentuklah *Badminton England*. Organisasi ini merupakan organisasi resmi pemerintah Inggris yang menaungi badminton.

Ketika badminton berkembang di seluruh penjuru negeri, untuk memacu prestasi maka digelarlah *All England Open Badminton Championships* atau populer dengan *All England*, 1899. Kali pertama pertandingan itu diperuntukkan bagi bangsa Inggris sendiri, namun dalam perjalanan waktu akhirnya semua pemain dari seluruh negara boleh berpartisipasi. Sebagai gelaran resmi pertandingan badminton pertama di dunia, *All England* merupakan pertandingan bulutangkis paling bergensi dan populer. Semua pemain ingin menjadi juara di sana.

Bagaimana badminton berkembang di Indonesia? Sebagaimana diceritakan di atas, ketika Inggris membangun koloni di berbagai belahan dunia, di sana mereka juga 'memasyarakatkan' badminton. Malaya adalah wilayah koloni Inggris. Sebagai wilayah koloni, Inggris mengembangkan badminton di negeri yang sekarang bernama Malaysia itu. Malaysia adalah negara yang dekat dengan Kota Medan, Sumatera, Hindia-Belanda (Indonesia). Karena dekat itulah maka badminton masuk ke Indonesia lewat Medan, 1930.

Olahraga ini rupanya juga digemari oleh masyarakat di sini sehingga berkembang pesat, buktinya pada 1933, di Batavia (Jakarta) terbentuk *Bataviase Badminton Bond* dan *Bataviase Badminton League*. Setahun kemudian, 1934, di Jawa banyak dipertandingkan badminton. □

AWG/dari berbagai sumber





Badminton, Indonesia Jagonya

Ketika masuk ke Indonesia, badminton mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Berbagai klub sudah muncul pada 1933. Dari 1958, Indonesia sudah menjadi salah satu negara kekuatan badminton dunia. Dan, bertahan hingga di Olimpiade Tokyo 2020.

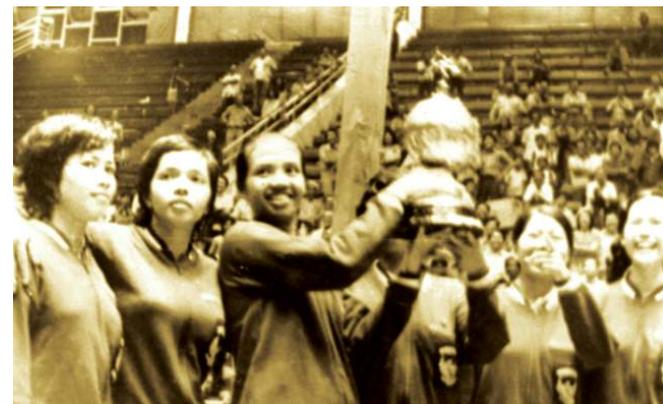


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SEPERTI sepakbola, badminton (bulutangkis) merupakan olahraga yang populer di tanah air. Kepopularan badminton di Indonesia disebabkan karena atlet-atlet nasional yang berlaga atau bertanding di berbagai kancah antarbangsa dan bergengsi mampu meraih dan mempertahankan prestasi.

Prestasi yang diraih para pemain bulutangkis Indonesia disiarkan secara langsung oleh TVRI dan selanjutnya oleh televisi-televisi swasta, itu mampu mendorong gairah masyarakat untuk mengenal, mencoba, berolahraga, bahkan ingin serius menjadi atlet badminton.

Kali pertama olahraga tepok bulu ini masuk ke Hinda-Belanda (Indonesia) pada 1930. Olahraga ini menyeberang masuk ke Medan dari Malaya. Karena memang badminton lebih dulu memasyarakat di sana, sebab Malaya adalah koloni Inggris. Saat menguasai koloni, terutama di Asia, Inggris memperkenalkan badminton pada masyarakat. Mereka membawa kebiasaan hidup di negaranya, termasuk badminton, ke seluruh wilayah koloninya.

Begitu masuk ke Indonesia, badminton mendapat respon baik dari masyarakat, terbukti tiga tahun setelah berada di tanah air, pada 1933, sudah ada perhimpunan



penggemar badminton, seperti *Bataviase Badminton Bond* dan *Bataviase Badminton League*. Satu tahun kemudian tercetak puluhan bahkan ratusan atlet badminton. Buktinya, pada 1934 sudah banyak pertandingan digelar, terutama di Bandung.

Meski pada saat itu sudah banyak klub atau perhimpunan badminton, namun ada di antara mereka bergerak sendiri-sendiri, sebatas bermain, dan berlatih serta menggelar kejuaraan antarklub. Apa tujuan nasional mereka, saat itu belum terpikirkan. Hal demikian menjadi keprihatinan bagi seorang pebulutangkis, Dick Sudirman. Pria kelahiran Pematangsiantar, Sumatera Utara, 1922, itu ingin klub-klub yang ada mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama.

Ia bersama pebulutangkis yang lain mengirim surat kepada klub-klub untuk menghimpun diri dan mempunyai langkah, gerak, tujuan, serta cita-cita yang sama. Surat yang diterima oleh klub disambut baik.

Mereka bersepakat untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan diadakan pada 5 Mei 1951 di Bandung. Di kota yang dijuluki *Paris Van Java* inilah lahir PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia).

Tidak hanya terbentuk wadah pebulutangkis secara nasional, namun juga tersusun pengurus. Susunan pengurus yang disepakati terdiri dari: Ketua Umum A. Rochdi Partaatmadja, Ketua I Dick Sudirman, Ketua II Tri Tjondrokoesoemo, Sekretaris I Amir, Sekretaris II E. Soemantri, Bendahara I Rachim, Bendahara II Liem Soei Liong. Kegiatan pada saat itu akhirnya disebut sebagai Kongres I PBSI.

Ketika PBSI belum terbentuk, negar-negara di dunia yang memiliki badan badminton sudah mengadakan kejuaraan *Thomas Cup*. Kejuaraan ini adalah pertandingan antarnegara yang terdiri dari tim putra. Kejuaraan itu kali pertama digelar pada 1949. Sebagai kejuaraan tingkat internasional pertama kalinya, pesertanya terbilang sudah banyak. Sepuluh negara berpartisipasi, yakni Kanada, Denmark, Inggris, Prancis, Irlandia, Bosnia, Amerika Serikat, India, Malaya, dan Swedia. Indonesia meski sudah merdeka, namun belum berpartisipasi dalam kejuaraan itu.

Kali pertama digelar, Malaysia sebagai



Rudy Hartono

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

juara, mengalahkan Denmark. Kejuaraan berikutnya pada 1952 dan 1955, Malaysia mampu mempertahankan piala. Saat itu bisa dikatakan negeri jiran itu sebagai jagonya.

Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan dalam urusan tepok bulu angsa ketika mampu menjadi juara pada gelaran yang diadakan di Singapura pada 1958. Setelah itu Indonesia kerap mempertahankan dan meraih piala serupa. Dari kali pertama digelar hingga saat ini, menurut *Wikipedia*, Indonesia tercatat merebut Thomas Cup sebanyak 13 kali, sedang Cina saingan berat Indonesia, baru 10 kali.

Bila di tim putera ada *Thomas Cup*, maka di bagian putri ada yang namanya *Uber Cup*. Kejuaraan ini kali pertama digelar pada 1957 di Preston Inggris. Tim putri Indonesia sudah beberapa kali merebut piala ini, yaitu pada 1975, 1994, dan 1996. Menurut catatan *Wikipedia*, Cina negara tersering meraih *Uber*

Cup, yakni 14 kali, disusul Jepang 6 kali.

Tidak hanya dalam kejuaraan beregu Indonesia terbukti jagonya. Dalam kejuaraan perorangan, atlet badminton pun mampu unjuk gigi. Tolok ukur sebuah negara bisa sebagai kekuatan dunia di bidang olahraga bulutangkis adalah *All England*, kejuaraan tertua dan terengsi.

Sejak digelar pada 1899, beberapa nama atlet badminton dari Indonesia mengukir namanya di kejuaraan All England ini. Mereka adalah Rudy Hartono, Tan Joe Hok, Liem Swie King, Ardy Wiranata, dan Hariyanto Arbi. Dari nama-nama itu bahkan nama-nama pemain dunia lainnya, Rudy Hartono merupakan nama yang paling sering menjadi juara untuk nomer tunggal putera. Tercatat, Rudy meraih 8 kali menjuarai gelaran itu, dan hebatnya juara berturut-turut dari 1968 sampai 1974.

Di nomer ganda putera, atlet badminton dari

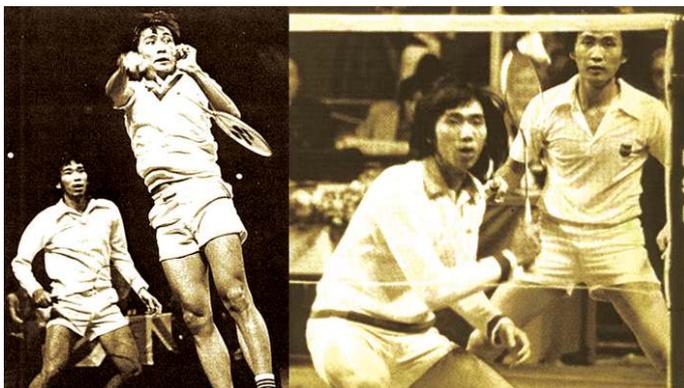
Indonesia pun beberapa kali memancarkan sinarnya di sana. Pada kejuaraan 1972 dan 1973, pasangan Christian Hadinata dan Ade Chandra menjadi pemenang. Pada 1974 dan 1975, pasangan Tjun Tjun dan Johan Wahyudi meraih prestasi yang sama. Pada 1981, giliran Rudy Heryanto dan Hariamanto Kartono. Tahun 1994, giliran pasangan Rudy Gunawan dan Bambang Suprianto. Selanjutnya pada 1995 dan 1996, pasangan Ricky Subagja dan Rexy Mainaky, sebagai top di kejuaraan. Dan, masih banyak ganda lainnya yang mampu menunjukkan bahwa Indonesia memang jago di nomor ganda.

Untuk tunggal puteri, nama atlet dari Indonesia, baru tercatat Susi Santi. Susi tercatat 4 kali menjadi juara All England, yaitu 1990, 1991, 1993, dan 1994. Bagian ganda puteri, nama atlet dari Indonesia pun beberapa kali menjadi pemenang, mereka adalah pasangan Minarni Sudaryanto dan Retno Koestijah meraih juara pada 1968, pasangan Verawaty dan Imelda Wiguna pada 1979.

Sedang untuk nomer ganda campuran, atlet dari Indonesia juga beberapa kali menjadi pemenang. Mereka adalah pasangan Christian Hadinata dan Imelda Wiguna pada 1979, dan pasangan Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir pada 2013, serta pasangan Praveen Jordan dan Melati Daeva Oktavianti pada 2020.

Tradisi menjadi juara dan pemenang ini juga terjadi pada berbagai macam kejuaraan dari tingkat SEA Games, Asian Games, Olimpiade, hingga berbagai kejuaraan di negara-negara lainnya yang sifatnya *open*. □

AWG/dari berbagai sumber



Tjun Tjun dan Johan Wahyudi



Minarni Sudaryanto dan Retno Koestijah



Mereka yang Abadi dengan Badminton

Badminton berkembang ke seluruh dunia, berkat kepedulian dan sentuhan dari orang-orang yang memiliki jiwa sportif dan mengutamakan kepentingan umum. Berkat mereka, lahir kejuaraan-kejuaraan yang menjadi ukuran prestasi dan kebanggaan bangsa. Mereka adalah Thomas, Uber, dan Sudirman. Dua dari Inggris, satu dari Indonesia.

Thomas, Tuan Badminton Dunia

Dalam badminton (bulutangkis) ada kejuaraan tim beregu putra yang sangat populer, namanya *Thomas Cup* atau Piala Thomas. *Thomas Cup* yang mempertandingkan kejuaraan bulutangkis antarnegara, mulai digelar pada 1949. Nama yang melekat pada piala itu Thomas sebagai wujud penghormatan pada pria yang nama panjangnya Sir (Tuan) George Alan Thomas.

Siapakah Thomas itu? Meski berdarah Inggris, namun ia lahir di Istanbul, Turki, pada 14 Juni 1881. Dalam riwayat hidupnya, Thomas merupakan sosok yang gemar berolahraga. Ia suka badminton, tenis, dan catur. Kegemarannya itu tidak hanya untuk berekreasi, namun juga berprestasi. Dalam tenis, *sabetan* raketnya sangat luar biasa. Thomas pernah lima kali berlaga dalam ajang kejuaraan tenis bergensi, Wimbledon, dari 1907 hingga 1921. Di Wimbledon dia tidak hanya datang dan kalah, namun mampu mencapai babak semifinal pada nomor ganda putra, di tahun 1907 dan 1912.

Dalam catur, Thomas pun juga berprestasi. Olah pikir dalam menggerakkan pasukannya di papan catur mampu mengantarkan dia menjadi pecatur nomor satu di Inggris, pada 1923 dan 1934. Setahun kemudian, 1935, Thomas merebut gelar di *Hastings Inter-*



Sir George Alan Thomas

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

national Chess Congress 1935. Berbagai prestasi yang diraih itu membuat dia dihormati dalam dunia olahraga catur di Inggris. Buktinya, pada 1950, ia dianugerahi gelar *Internasional Master* (IM) dari Federasi Catur Internasional (FIDE). Saat ini IM disebut dengan *Grand Master* (GM).

Thomas merupakan pria yang pandai membagi waktu untuk bermain tenis, catur, dan badminton. Ketiga olahraga itu bisa dilakukan bersama dalam perjalanannya. Di badminton, prestasi Thomas sangat luar biasa. Sejak kejuaraan bulutangkis paling bergensi digelar pada 1899, *All England*,

nama Thomas disebut sebagai atlet yang paling berprestasi. Gelar yang diraih di *All England* adalah juara empat kali pada nomor tunggal putra, sembilan ganda putra, dan delapan ganda campuran.

Thomas tidak hanya jago di lapangan, di luar lapangan ia juga mampu membuat langkah-langkah yang penting. Pada 1934, Thomas membentuk Federasi Bulutangkis Internasional (*International Badminton Federation*, IBF) yang selanjutnya menjadi *The Badminton World Federation* (BWF). Organisasi ini menghimpun induk olahraga badminton negara-negara di dunia. Kali



pertama terbentuk, ada 9 negara yang tercatat, yakni Kanada, Denmark, Inggris, Prancis, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Skotlandia, dan Wales. Saat ini anggota BWF mencapai 165 negara. Dia terpilih menjadi Presiden BWF dari 1934 hingga 1955.

Sebagai orang nomor satu di dunia perbadminton-an, Thomas tidak hanya duduk-duduk di kantor. Saat itu ia melihat dalam tenis ada kejuaraan bergengsi, *Davis Cup*. Dalam sepakbola ada *World Cup*. Lalu dalam badminton apa? Akhirnya ia menggagas kejuaraan beregu putra. Kejuaraan itu dinamakan *The International Badminton Championship Cup*. Saat itu, Eropa sedang dilanda Perang Dunia II namun kejuaraan itu tetap digelar pada 1939.

Usai Perang Dunia II, *The International Badminton Championship Cup* diubah menjadi *Thomas Cup*. Piala itu diperebutkan sejak 1949 hingga saat ini. Nama Thomas disematkan dalam piala itu sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya dalam mengembangkan dan memasyarakatkan badminton. □

Uber, Sosok Peduli pada Perempuan

Kalau kita melihat sejarah para pemenang *All England*, dari 1930 hingga 1949, akan menemukan nama Betty Uber. Atlet badminton dari Inggris itu pada masanya berjaya dalam kejuaraan itu, dari nomor tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Dari berbagai nomor pada kejuaraan *All England*, perempuan kelahiran 2 Juni 1906 itu mampu mengoleksi 13 gelar juara.



Betty Uber



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Sebagai atlet, ada jiwa sportifitas dan peduli pada diri Uber. Dengan segudang prestasi yang diraih, ia tidak menjadi egois dan memikirkan dirinya sendiri. Uber juga berpikir agar bagaimana atlet badminton di kalangan perempuan juga berkembang, seperti kaum adam. Untuk itu ia menggagas kejuaraan beregu putri. Gagasan yang disampaikan pada 1950 itu mendapat dukungan dari rekannya dari Selandia Baru, Nancy Fleming.

Tidak mudah untuk merealisasikan ide itu. IBF pada masa itu tidak sepekat dengan keinginan Uber. Namun, IBF akhirnya berubah sikap, pada 1953, gagasan itu disetujui. Meski sudah diijinkan kejuaraan beregu putri namun pelaksanaannya baru terjadi pada 1957 di Lancashire, Preston, Inggris. Sebelas negara berpartisipasi dalam kejuaraan itu.

Uber dalam kejuaraan itu tidak hanya sebagai penggagas, namun dirinya juga menjadi penyumbang trofi (piala). Kali pertama, kontingen Amerika Serikat mampu menjadi pemenang setelah mengalahkan Denmark. Dari catatan sejarah, kejuaraan yang digelar sejak tahun 1957, tercatat Cina menjadi juara 14 kali, Jepang 5 kali, Amerika Serikat 3 kali, Indonesia 3 kali, dan Korea Selatan 1 kali.

Dalam dunia badminton, Uber merupakan sosok yang dihormati, itu dibuktikan dengan dilantiknya dirinya menjadi anggota *World Badminton Hall of Fame*. Seperti Thomas, namanya diabadikan dalam piala yang diperebutkan oleh tim beregu putri dari berbagai negara, *Uber Cup*. □

Untuk Mengenang Pria Asal Pematangsiantar

Sebagai negara yang jago dalam badminton, PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia) tidak mau pasif dalam mengembangkan olahraga ini. Pada 1986, PBSI menggagas kejuaraan yang bisa dikatakan menggabungkan antara Thomas Cup dan Uber Cup, yakni kejuaraan beregu campuran, dengan mempertandingkan nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.

Sama dengan perjalanan *Thomas Cup* dan *Uber Cup*, untuk merealisasikan kejuaraan beregu campuran itu memerlukan waktu. Usul digagas pada 1986, terealisasi pada 1989. Kejuaraan beregu campuran itu dinamakan dengan *Sudirman Cup* atau Piala Sudirman. Nama Sudirman disematkan pada



Dick Sudirman

kejuaraan beregu campuran sebagai tanda penghormatan kepada Dick Sudirman. Dick Sudirman adalah atlet badminton asal Pematangsiantar, Sumatera Utara, yang merupakan pendiri PBSI dan sebagai Ketua Umum PBSI Periode 1952-1963 dan 1967-1981. Sudirman juga pernah sebagai Wakil Presiden IBF/WBF pada 1975.

Kali pertama *Sudirman Cup* digelar, 24-29 Mei 1989, di Istana Olahraga, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dan Indonesia mampu menjadi juara setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2. Selanjutnya, berturut-turut memboyong piala itu adalah Korea Selatan, dan Cina. Cina merupakan negara paling sering meraih piala ini, 11 kali. Sedangkan Korea Selatan 4 kali, dan Indonesia 2 kali. □

AWG/dari berbagai sumber

Ronny Gosal, M.Si

Warek Universitas Sam ratulangi

Rakyat Indonesia Harus Junjung Tinggi Toleransi

BANGSA Indonesia adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Setiap daerah pasti memiliki tradisi atau karakter yang sangat baik, seperti daerah Sulawesi Utara memiliki petuah luar biasa yang dibawa oleh Pahlawan Nasional Sam ratulangi.

Filosofinya adalah 'Si tou timou tumou tou,' yang artinya: 'Manusia baru dapat disebut manusia jika sudah dapat memanusikan manusia. Tentu di daerah lain juga pasti memiliki flosofi yang sama.

Jika saja karakter ini dipersatukan maka akan menjadi satu kekuatan yang hebat untuk menangkal ancaman disintegrasi bangsa. Karakter bangsa ini juga akan menjadi kekuatan yang bisa membuat rakyat Indonesia bertahan dari situasi pandemi Covid-19.

Maka saya sangat berharap agar seluruh rakyat bersatu padu melawan segala permasalahan bangsa, agar kita bisa keluar dari hal tersebut dan ke depannya bisa sejahtera bersama-sama. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Adam Wahyu

Ketua RT Sukamaju, Cianjur

Rakyat Kecil Butuh Bantuan



PANDEMI Covid-19 ini betul-betul menyengsarakan rakyat, terutama rakyat kecil. Seperti di lingkungan saya, kebanyakan dari mereka menggantungkan hidupnya menjadi pedagang kecil di pasar, pengemudi ojek, buruh, di masa pandemi ini makin terhimpit dengan adanya kebijakan PPKM.

Praktis banyak warga masyarakat yang tidak melakukan kegiatan sehingga berdampak buruk pada kegiatan rakyat kecil dalam mencari nafkah. Saya paham bahwa kebijakan itu bermaksud baik agar virus tidak banyak menyebar, namun kesusahan rakyat ini, terutama dari sisi perekonomiannya, mesti dipikirkan.

Salah satunya dengan memberi bantuan kepada mereka, seperti sembako, pinjaman ringan untuk modal dagang dan lainnya. Saya apresiasi mereka yang memberikan banyak bantuan, baik dari pemerintah, pribadi, parpol dan lainnya. Saya harap hal ini terus berlangsung untuk menjaga agar rakyat kecil bisa bertahan. □

DER

Kang Emon

Korbankan **Sepeda** untuk Tangkap *Pembegal*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PANDEMI Covid-19 masih menjadi topik menarik. Tiap hari media-media main stream, juga medsos, ramai-ramai memberitakan kabar seputar virus corona beserta imbasnya. Mulai dari kabar penularan, penderitaan akibat Covid, kesembuhan, kebutuhan akan plasma konvalesen, hingga kematian akibat Covid-19, terus memenuhi halaman berbagai media.

Padahal, bagi sebagian orang kabar-kabar itu sudah mulai membosankan. Banyak orang lelah karena bosan dengan bermacam persoalan akibat Covid-19. Terlebih karena masalah ekonomi dirasa lebih menghimpit dibanding corona.

Di tengah kondisi sulit seperti itu, awal Agustus lalu, jagad pemberitaan dikagetkan

dengan munculnya berita seputar heroisme kang Emon. Tanpa rasa takut dan mengharap pamrih apapun, pedagang keliling mainan anak ini berhasil menggagalkan aksi begal di Kampung Balong Poncol, Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat pagi, 6 Agustus 2021.

Pagi itu, seperti lazimnya, Wangga Sari (35) alias Emon berangkat untuk mengais rezeki. Dengan mengendarai sepeda, Emon ke luar masuk kampung menjajakan mainan anak-anak. Tetapi, hari itu Emon mengalami peristiwa yang tidak diduga-duga.

Saat berada di Kampung Balong Poncol, Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, tiba-tiba telinga Emon mendengar teriakan seorang perempuan

meminta tolong karena sepeda motornya dirampas dan dibawa kabur dua orang begal. Perempuan itu bernama Nursih (45). Dia adalah seorang pedagang soto.

Ceritanya, pagi itu, pukul 06.00 WIB, Nursih dipepet dua pemuda pembegal bernama Syarif Hidayatullah (21) dan Nur Syaid (21). Untuk memuluskan rencana jahatnya, merampas sepeda motor korban, kedua begal itu mengancam dengan sebilah clurit. Karena takut, Nursih pun membiarkan sepeda motornya dibawa kabur para begal.

Namun, begitu kedua begal itu beranjak jauh, Nursih berteriak minta tolong. Dan, itu membuat masyarakat sekitar tersadar bahwa ada tindak kejahatan. Nah, Emon yang kebetulan saat itu berada tak jauh dari





tempat kejadian, seketika itu pula melompat dari sepeda yang ditunggangi. Ia menutup jalan si pembegal menggunakan sepedanya. “Seingat saya begal itu menabarak sepeda saya, kemudian mereka jatuh tersungkur di sawah. Masyarakat yang sudah berlarian mengejar langsung menangkapnya,” kata Emon. Setelah massa berkumpul makin banyak, petugas kepolisian datang ke tempat kejadian, dan Emon segera mengambil sepedanya. Tapi nahas, velg roda depan sudah berupa bentuk, tak utuh lagi. Begitu pula barang dagangannya banyak yang sudah tak utuh lagi. Bahkan, sebagian mainan anak-anak hilang, karena terlempar saat ditabrak.

Lalu, dengan menggotong sepedanya dia kembali ke rumah.

Meski dia harus menanggung kerugian, tapi Emon bersyukur bisa membantu sesama. Ia tidak menyesal sedikitpun meski sepeda dan barang dagangannya rusak dan hilang. Emon percaya, Allah akan menolong hambanya yang rela meringankan beban sesamanya.

Emon juga tidak mengharap pamrih apapun atas pengorbanannya menolong Nursih. Karena yang dia lakukan adalah serta merta, setelah mendengar orang minta tolong. Jadi berkat peristiwa itu Emon



mendapat banyak apresiasi, dia sangat bersyukur dan tidak pernah memikirkan, apalagi berharap.

Sepeda Baru

Keberanian Emon membantu menangkap Begal itu ternyata menuai banyak pujian. Terlebih karena Emon juga berani mempertaruhkan sepeda ontel beserta barang dagangannya. Artinya, demi menolong orang lain, Emon rela mempertaruhkan harta dan jiwanya.

“Dalam pikiran saya, yang terbayang adalah bagaimana menolong orang yang tengah terhimpit kesulitan. Hanya itu yang saya pikir dan ingat,” tutur Wangga Sari

tentang peristiwa itu.

Berkat keberaniannya menghadang begal, Wangga Sari mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat. Ia mendapatkan sepeda baru dan modal usaha dari Kepala Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Mulyadi Fernando. Sepeda yang diberikan Mulyadi diharapkan dapat menggantikan sepeda Emon yang rusak akibat ditabrak sepeda motor hasil rampasan.

Dengan sepeda barunya, Emon tentunya bisa kembali berdagang mainan anak-anak keliling kampung. Selain sepeda, Emon juga mendapatkan modal usaha dari hasil donasi para netizen sebesar Rp 1,3 juta. Bahkan, Kapolsek Tambelang, AKP Miken Pendriyanti, juga memuji keberanian Emon. Miken berharap, aksi heroik yang dilakukan Emon dapat menginspirasi warga lainnya untuk berbuat baik. Namun, Miken juga berharap, tidak gegabah, harus melihat situasi dan kondisi, jangan mengabaikan keselamatan sendiri.

Sebagai bentuk apresiasi kepada Emon, jajaran Polsek Tambelang memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai. Bantuan itu diharapkan dapat membantu kehidupan keluarga Emon yang cukup terdampak pandemi corona. □

MBO



Peringatan **Hari Konstitusi** dan HUT Ke-77 MPR

Peringatan Hari Konstitusi bertema: 'Konstitusi Sebagai Landasan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi,' sekaligus HUT Ke-77 MPR RI digelar MPR RI secara luring dan daring, Kamis (18/8/2022), di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PERINGATAN dua agenda besar bangsa yang dihadiri Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin, tersebut diselenggarakan di tengah kondisi yang sangat diharapkan dan diimpikan seluruh rakyat Indonesia, yakni melandainya pandemi Covid-19. Betapa tidak, pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama dua tahun lebih itu telah menyengsarakan rakyat dengan jatuhnya banyak korban jiwa, serta merontokkan perekonomian masyarakat.

Namun, walaupun pandemi telah melandai, untuk mematuhi anjuran pemerintah bahwa semua elemen bangsa harus tetap mewaspadaai penyebaran virus, pihak penyelenggara bekerjasama dengan Sekretariat Wakil Presiden RI, secara ketat mengedepankan protokol kesehatan. Dari pantauan di lokasi acara, seluruh petugas dan tamu undangan mematuhi prokes yang ditetapkan, salah satunya kewajiban memakai masker.

Meskipun digelar dengan protokol ketat, Peringatan Hari Konstitusi tahun ini menarik minat dan antusiasme banyak elemen masyarakat untuk menyemarakkan momen penting bangsa tersebut. Apalagi, penyelenggara juga menyediakan perangkat tayangan langsung atau *streaming live* di berbagai media sosial. Sehingga rakyat yang tidak bisa hadir secara langsung, bisa turut menikmati kemeriahan dan khidmatnya acara.

Meskipun acara baru dimulai pukul 10.00 WIB, namun para tamu undangan sudah memenuhi Ruang Pustakaloka sejak pukul 09.30. Terlihat hadir Ketua DPR Dr. (HC). Puan Maharani dan para Wakil Ketua DPR H. Lodewijk F. Paulus, Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., Pimpinan DPD RI Dr. Nono Sampono, M.Si., Dr. H. Mahyudin, ST., MM., dan Sultan Bachtiar Najamudin, S.Sos., M.Si., Pimpinan dan anggota Fraksi serta Kelompok DPD MPR, Pimpinan Badan Sosialisasi MPR, Pimpinan Badan Pengkajian MPR, Pimpinan Badan Penganggaran MPR, dan Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR

Selanjutnya, turut hadir Ketua BPK RI Dr. Ir. Isma Yaton; Ketua Mahkamah Agung, Prof. DR. H. Muhammad Syarifuddin; Ketua Mahkamah Konstitusi, DR. Anwar Usman; Ketua Komisi Yudisial, Prof. DR. Mukti Fajar Nur Dewata; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendy.

Serta hadir pula Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS); Pimpinan Ormas Keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI); Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI); Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) dan perwakilan Parisada Hindu Dharma



Indonesia (PHDI); para mahasiswa perwakilan beberapa perguruan tinggi, antara lain Univeristas Indonesia, Universitas Trisakti, dan Universitas Pancasila.

Tepat pukul 09.57 WIB, Ketua MPR RI H. Bambang Soesatyo, SE., MBA., bersama para Wakil Ketua MPR RI DR. Ahmad Basarah, SH., MH.; H. Ahmad Muzani; Dr. Lestari Moerdijat, SS., MM.; Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA.; Prof. Dr. H. Syarifuddin Hasan, MM., MBA.; Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA.; H. Yandri Susanto, S.Pt.; DR. H. Arsul Sani, SH, M.Si., Pr.M., dan Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, serta para Ketua lembaga negara mendampingi Wapres RI memasuki ruangan acara.

Usai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi paduan suara Gita Bahana Nusantara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menaiki podium untuk menyampaikan kata sambutan. Dalam

sambutan, Bamsoet menyatakan, sebagai insan yang beriman, ia mengajak seluruh tamu undangan untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha



KH. Ma'ruf Amin

Esa. Karena, hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita semua dapat hadir, mengikuti Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-77 MPR, dalam suasana bahagia dan sehat wal'afiat.

Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-77 MPR kali ini, lanjut Bamsoet, terasa sangat istimewa, karena dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Prof. DR. K.H. Ma'ruf Amin, serta para pimpinan lembaga negara lainnya. "Untuk itu, atas nama Pimpinan dan Anggota MPR, kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden, dan para pimpinan lembaga negara atas perkenanannya hadir memenuhi undangan kami, di tengah kesibukan Bapak/Ibu menjalankan tugas-tugas kenegaraan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bamsoet mengingatkan bahwa pada bulan Agustus, setidaknya terdapat tiga peristiwa bersejarah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

yang bangsa ini peringati. *Pertama*, setelah dicengkeram penjajahan selama berabad-abad, tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, dengan satu tekad menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas menentukan nasibnya sendiri, bangsa yang mandiri, berani bersikap dan bertindak secara berdaulat, bebas dari paksaan dan intervensi pihak-pihak lain.

Kedua, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Ketiga*, untuk melaksanakan amanat Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk Komite

Nasional Indonesia Pusat sebagai sebuah badan perwakilan, yang menjadi cikal bakal dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat.

“Untuk itu, izinkan kami atas nama Pimpinan dan Anggota MPR menyerukan kepada kita semua, kepada seluruh rakyat Indonesia, Merdeka !!!,” serunya seraya mengepalkan tangan. Selanjutnya dia mengucapkan: “Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Konstitusi Indonesia, Dirgahayu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.”

Kemarin tanggal 17 Agustus 2022, lanjut Bamsoet, bangsa Indonesia telah memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke-77. Hari ini, tanggal 18 Agustus 2022, bangsa Indonesia memperingati Hari Konstitusi. Bamsoet berharap, peringatan hari-hari besar kenegaraan tersebut tidak boleh

dimaknai hanya sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi tanggung jawab sejarah bagi semua anak bangsa untuk meneguhkan arah cita-cita Indonesia merdeka.

“Jadikan momen peringatan ini menjadi momen terbaik untuk melakukan refleksi diri, sekaligus proyeksi ke depan. Melalui proses refleksi dan proyeksi ini diharapkan: *Pertama*, kita dapat mengenali apa kelebihan dan kekurangan kita sebagai bangsa. Pelajaran baik di masa lalu yang harus kita pertahankan, dan pengalaman buruk yang harus kita tinggalkan. *Kedua*, kita dapat mengetahui ke mana kita akan menuju. Kita harus senantiasa terbuka atas perkembangan terbaik kehidupan umat manusia, guna memperkaya mutu kemanusiaan, dan mutu peradaban kita,” pungkasnya. □



Pidato Ketua MPR, Bambang Soesatyo

Ajak Elemen Bangsa Teguhkan Arah Cita-Cita Indonesia Merdeka

Pelajaran baik di masa lalu harus kita pertahankan, dan pengalaman buruk yang harus kita tinggalkan. Selain itu, kita dapat mengetahui ke mana kita akan menuju.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan peringatan hari-hari besar kenegaraan tidak boleh dimaknai hanya sebagai kegiatan seremonial semata. Tetapi, harus dijadikan bentuk tanggungjawab bagi seluruh elemen bangsa untuk meneguhkan arah cita-cita Indonesia merdeka. Dijadikan momen terbaik

untuk melakukan refleksi diri, sekaligus proyeksi ke depan.

“Melalui proses refleksi dan proyeksi ini diharapkan kita dapat mengenali apa kelebihan dan kekurangan kita sebagai bangsa. Pelajaran baik di masa lalu yang harus kita pertahankan, dan pengalaman buruk yang harus kita tinggalkan. Selain itu,

kita dapat mengetahui ke mana kita akan menuju. Kita harus senantiasa terbuka atas perkembangan terbaik kehidupan umat manusia, guna memperkaya mutu kemanusiaan dan mutu peradaban kita,” ujar Bamsoet dalam Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-MPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (18/8/22).

Turut hadir antara lain Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mewakili Presiden Joko Widodo; Ketua DPR RI Puan Maharani; Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Yandri Susanto, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad; serta Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus.

Hadir pula Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yaton; Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin; Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman; Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata; serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah menunaikan tugas sejarahnya dengan baik. Tugas sejarah tersebut adalah ketika pada tanggal 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 yang menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari lahir Pancasila. Sejak saat itulah, bangsa Indonesia dapat mengetahui dan sekaligus memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi negara.

“Dalam bagian ‘menimbang’ huruf (c), (d) dan (e), Keppres Nomor 24 Tahun 2016 tersebut, ditegaskan bahwa Pancasila sejak kelahirannya tanggal 1 Juni 1945 melalui Pidato Bung Karno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan



Kemerdekaan (BPUPK), dan mengalami perkembangan dalam Naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan, hingga disepakati menjadi rumusan final oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, yang dimaknai sebagai suatu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, oleh para Pendiri Bangsa,” kata Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indone-

sia ini menerangkan, dasar pertimbangan historis dan yuridis yang disusun dalam Keppres tersebut, sejalan dengan kesepakatan MPR RI tentang sejarah lahirnya Pancasila.

Sejarah lahirnya Pancasila tersebut kemudian dikonseptualisasikan dalam dokumen Buku Empat Pilar MPR RI yang menjadi materi baku dalam pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini dilaksanakan sejak periode kepemimpinan almarhum H.M. Taufiq Kiemas, sebagai Ketua MPR tahun 2009-

2013, hingga saat ini.

“Dengan demikian, Keputusan Presiden Joko Widodo Nomor 24 Tahun 2016 tersebut telah melengkapi dokumen kenegaraan Keputusan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono Nomor 18 Tahun 2008 yang menetapkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi. Atas dasar pertimbangan historis dan yuridis itulah pada hari ini lembaga MPR RI menyelenggarakan Peringatan Hari Konstitusi setiap tanggal 18 Agustus di Gedung Parlemen ini,” pungkas Bamsuet. □

Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah

Peringatan Hari Konstitusi Satu Tarikan Nafas Dengan Proklamasi dan Hari Lahir Pancasila

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, mengatakan, peringatan Hari Konstitusi ke-77 tidaklah dapat dipisahkan dari Hari Lahir Pancasila. Kedua momentum itu meski berbeda dari sisi historis dan juga yuridis, namun saling melengkapi dalam satu tarikan nafas.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

HAL mendasar yang penting sekali untuk kita pahami bahwa Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2008 menetapkan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi. Konsideran menimbang huruf (a) Keppres tersebut menyebutkan pada 18 Agustus 1945, PPKI telah menetapkan UUD Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indo-

nesia (NKRI). Sementara Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) yang bersifat meta yuridis (meta legal) memiliki kedudukan di atas norma hukum, seperti UUD 1945. Sehingga, tempat Pancasila sebagai dasar negara jelas bukan berada di dalam Pembukaan UUD 1945 tetapi berada di atas UUD 1945. Sehingga Hari Lahir Pancasila jelas bukan pada tanggal 18 Agustus 1945,”

kata Basarah saat menghadiri peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR Ke-77 yang jatuh tanggal 18 Agustus 2022 di Jakarta.

Pengakuan yuridis bahwa Pancasila tidak bisa disejajarkan dengan Undang Undang Dasar 1945 juga sudah dinyatakan tegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang Undang Dasar 1945, yang pada intinya MK dalam pertimbangan hukumnya menegaskan Pancasila sebagai dasar negara kedudukannya tidak bisa disejajarkan dengan UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selama ini, kata Basarah, ada beberapa pihak yang masih berpandangan bahwa hari lahir Pancasila di momentum tanggal 18 Agustus 1945. Padahal pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu, PPKI menetapkan hanya dua hal, yaitu: *Pertama*, menetapkan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI

untuk pertama kalinya; dan *kedua*, mengesahkan UUD 1945.

“Bukti bahwa pada 18 Agustus 1945 PPKI hanya mengesahkan UUD 1945 dan bukan mengesahkan lahirnya Pancasila, yaitu ditetapkannya Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi yang kita peringati hari ini” ujar Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ini.

Basarah menambahkan, setelah sekian lama bangsa Indonesia dibuat tidak tahu kapan hari lahir Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, kita patut bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, yang telah menunaikan tugas sejarahnya dengan baik. Tugas sejarah tersebut adalah ketika pada tanggal 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, yang menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari lahir Pancasila. Sejak saat itulah, bangsa Indonesia dapat mengetahui dan sekaligus dapat memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi negara.

Dalam bagian “menimbang” huruf (c), (d) dan (e), Keppres Nomor 24 Tahun 2016 tersebut, ditegaskan bahwa Pancasila, sejak kelahirannya tanggal 1 Juni 1945 melalui Pidato Bung Karno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), dan mengalami perkembangan dalam Naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan, hingga disepakati menjadi rumusan final oleh Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, dimaknai sebagai suatu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, oleh para Pendiri Bangsa.

“Dasar pertimbangan historis dan yuridis Keppres Nomor 24 Tahun 2016 tersebut sejalan dengan kesepakatan MPR RI tentang sejarah lahirnya Pancasila, yang dikonseptualisasikan dalam dokumen Buku Empat Pilar MPR RI, yang menjadi materi baku dalam pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yang dilaksanakan sejak periode kepemimpinan almarhum H.M. Taufiq Kiemas, sebagai Ketua MPR tahun 2009-2013 hingga saat ini,” sambung dosen Universitas Islam Malang ini.

Proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara itu, kata Basarah, merupakan satu tarikan nafas dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Dalam teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan Bung Karno dan didampingi Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia, disebutkan bahwa ‘hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya’.

Teks proklamasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya satu hari setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut tanggal 18 Agustus 1945 yang langsung

memutuskan dan menetapkan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, serta menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia merdeka di mana di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan sila-sila Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.

Dengan demikian antara proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka adalah dua peristiwa penting bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal itu ibarat dua sisi mata uang yang saling memberi bentuk dan nilai.

“Oleh karena itu, Keputusan Presiden Joko Widodo Nomor 24 Tahun 2016 tersebut telah melengkapi dokumen kenegaraan Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Nomor 18 Tahun 2008, yang menetapkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi. Atas dasar pertimbangan historis dan yuridis itulah pada hari ini lembaga MPR RI menyelenggarakan Peringatan Hari Konstitusi setiap tanggal 18 Agustus di Gedung MPR / DPR dan DPD RI ini”, jelas Wakil Ketua Lakpesdam PBNU ini.

Lebih lanjut Basarah berharap, agar Pancasila benar-benar dijadikan sumber dari segala sumber pembentukan hukum negara, termasuk jika MPR akan melakukan amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk menghadirkan PPHN pada periode 2024-2029 yang datang. □

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat

Percepatan Pembangunan Butuh Kepatuhan Terhadap Amanah Konstitusi

Peringatan Hari Konstitusi Republik Indonesia harus jadi pengingat setiap anak bangsa akan pentingnya kepatuhan terhadap pelaksanaan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mengisi kemerdekaan.

PERCEPATAN proses pembangunan bisa terwujud, salah satunya harus didukung dengan kepatuhan kita terhadap pelaksanaan berbagai aturan, termasuk apa yang diatur dan disepakati para pendahulu bangsa kita dalam

konstitusi negara, UUD NRI Tahun 1945,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/8), dalam rangka memperingati Hari Konstitusi setiap 18 Agustus.

Peringatan Hari Konstitusi RI ditetapkan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008. Hari Konstitusi adalah momen bersejarah dalam memperingati adanya sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi landasan hukum di Indonesia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Menurut Lestari, kepastian hukum yang berlandaskan konstitusi negara dapat membangun kepercayaan setiap warga negara, bahkan negara lain terhadap negeri ini. Bila di antara masyarakat dan negara

terbangun kepercayaan yang tinggi, ujar Rerie, langkah bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini akan relatif lebih mudah.

Karenanya, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengajak setiap anak bangsa

untuk selalu mematuhi apa yang telah diamanatkan konstitusi kita, dalam setiap upaya mengisi kemerdekaan.

Para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, tambah anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, juga harus menjadikan konstitusi sebagai landasan dalam membuat berbagai kebijakan.

Jangan sampai, tegas Rerie, kebijakan yang dibuat pemerintah daerah malah bertentangan dengan yang diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945, sehingga malah berakibat menghambat proses pembangunan.

Rerie sangat berharap, setiap anak bangsa mampu memahami pentingnya kepatuhan terhadap konstitusi kita, dalam menjalankan setiap aktivitas keseharian mereka. “Agar berbagai upaya yang kita lakukan dalam menjawab dampak krisis global di tanah air dapat berjalan secara sinergi, sehingga semangat pulih dan bangkit lebih kuat bisa segera terwujud sesuai cita-cita Kemerdekaan bangsa Indonesia,” ujar Rerie. □

Sesjen MPR RI, Dr. Ma’ruf Cahyono, SH., MH.

Konstitusi Harus Mampu Beradaptasi Menghadapi Tantangan Global

Konstitusi tidak hanya menjadi sebuah dokumen kenegaraan, tetapi sebagai the living constitution harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi tantangan global saat ini.

SEKRETARIS Jenderal MPR, Dr. Ma’ruf Cahyono, SH., MH., berharap, peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2022 dengan tema Konstitusi sebagai landasan bagi kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi bisa menjadikan konstitusi sebagai kaidah dan hukum dasar dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

“Harapannya, perekonomian kita ke depan semakin maju, adil, dan produktif sehingga kita bisa merespons tren dan isu global. Karena itulah, maka sebagai konstitusi yang hidup, tidak hanya menjadi suatu dokumen,

tetapi responsif dan mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan, mampu memanfaatkan peluang, dan menghadapi tantangan-tantangan khususnya tantangan global saat ini, yang serba tidak pasti” kata Ma’ruf Cahyono usai peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-77 MPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-77 MPR RI ini dihadiri Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, seluruh Pimpinan MPR, Ketua DPR Puan Maharani, Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menkopolkum Mahfud MD, Menko

PMK Muhadjir Effendy, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR, Badan Pengkajian MPR, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan.

Ma’ruf menjelaskan, peringatan Hari Konstitusi sekaligus memperingati HUT Ke-77 MPR RI merupakan rangkaian agenda ketatanegaraan setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR – DPD pada 16 Agustus 2022. Tema peringatan Hari Konstitusi tahun ini adalah Konstitusi sebagai landasan bagi kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi.

Dalam sambutan peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-77 MPR RI, Ketua MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Bambang Soesatyo menyebutkan, pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan kesehatan sekaligus menghantam perekonomian dunia, tidak terkecuali Indonesia. Setelah lebih dari dua tahun bergulat dengan pandemi, secara umum negara-negara di dunia bisa mengatasi pandemi ini dengan baik. Kesehatan masyarakat mulai pulih dan kehidupan dalam batas-batas tertentu mulai normal.

Namun, geo-politik dunia tiba-tiba bergejolak setelah perang Rusia – Ukraina yang memperburuk ekonomi dunia. Kini dunia mengalami krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi. Lalu inflasi terus mengalami kenaikan, harga pangan dan energi yang melonjak semakin membebani masyarakat yang baru bangkit dari pandemi Covid-19. Ekonomi dunia kembali terancam resesi.

Untuk itu, lewat tema dalam peringatan Hari Konstitusi ini, Ma'ruf Cahyono berharap, dengan konstitusi sebagai landasan bagi kebangkitan ekonomi Indonesia maka ke depan perekonomian Indonesia semakin maju sehingga bisa merespon dan beradaptasi dengan isu-isu global. "Karena itulah, konstitusi tidak hanya menjadi sebuah dokumen kenegaraan tetapi sebagai the living constitution harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi tantangan global saat ini," ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman ini.

Terkait dengan peringatan HUT Ke-77 MPR RI, Ma'ruf Cahyono menyebutkan, MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat,

maka ke depan MPR semakin menemukan eksistensinya sebagai rumah kebangsaan, yaitu tempat untuk membangun wacana dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. "Karena itu, hubungan MPR dengan masyarakat akan harus semakin dekat. Dengan demikian aspirasi masyarakat akan bisa direspon secara baik dan semakin luas oleh MPR RI," ujar pria yang sedang menambah gelar dokornya pada program doktor Kajian Strategi dan Global Universitas Indonesia.

Sebagai lembaga negara yang mengemban visi sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat, MPR tetap memiliki tugas yang mulia, yaitu membangun karakter bangsa melalui sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR tidak hanya memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga Pancasila harus menjadi nyata.

"Dalam rangka internalisasi Pancasila, diharapkan kehidupan bangsa akan semakin religius, semakin humanis, semakin nasionalis, dan demokratis, serta berkeadilan dapat diwujudkan ke depan. Demokrasi yang kita bangun, yaitu demokrasi Pancasila sebagai pengawal kedaulatan rakyat, diharapkan prinsip utama dalam demokrasi, sebagai instrumen untuk merepresentasi kehendak rakyat, dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat" pungkasnya. □



HUT Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia

Di Masa Sulit Tetap Jaga Persatuan dan Kesatuan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Wakil Ketua MPR RI, Syarif Hasan, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bagian dari penyelesaian masalah bangsa. Contohlah bagaimana kerasnya perjuangan para pahlawan merebut kemerdekaan.

WAKIL Ketua MPR, Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., mengungkapkan, rakyat Indonesia sebenarnya adalah bangsa yang sangat tangguh. Buktinya, selalu sanggup melewati berbagai kesulitan sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap eksis tak tergoyahkan.

Saat ini, Indonesia kembali diuji ketangguhannya dengan sebuah bencana yang sangat berat, yakni pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Sejak kemunculannya 1,5 tahun lalu, pemerintah terus berupaya keras meminimalisir penyebaran virus. Di akar rumput, rakyat mendukung dan menjalankan berbagai upaya pemerintah tersebut.

“Selama pandemi, saya juga melihat karakter asli bangsa, seperti toleransi dan gotong royong, benar-benar muncul. Saya rasa, sifat-sifat luhur itu mesti dimaksimalkan untuk menjaga persatuan dan

kesatuan bangsa Indonesia, di masa sulit,” katanya.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Demokrat yang biasa disapa Syarif Hasan ini usai mengikuti secara virtual dari Sentul, Bogor, Jawa Barat, ‘Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi HUT ke-76 Kemerdekaan yang berlangsung Selasa (17/8/2021) di Istana Negara, dengan Inspektur Upacara Presiden RI Joko Widodo.

Momen HUT Kemerdekaan RI tahun ini, lanjut Syarif Hasan, adalah saat yang tepat bagi semua elemen bangsa, baik itu pemerintah, tokoh bangsa, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan rakyat biasa, untuk lebih semangat lagi bergandeng tangan, saling menguatkan, serta tidak pantang menyerah untuk terus berusaha bersama-sama menghadapi pandemi.

Berbicara masalah pengentasan pandemi, Syarif Hasan



mengingatkan bahwa hal pertama yang mesti diperhatikan adalah kesehatan rakyat. Di antaranya, vaksin gratis dan efektif mesti dimaksimalkan untuk mencapai imunitas

massal, lalu fasilitas perawatan dan pengobatan cukup tersedia bagi rakyat terinfeksi, dan sosialisasi prosedur kesehatan terus digaungkan tanpa henti.

“Jika kesehatan rakyat tercapai dan pandemi lambat laun menghilang maka yang harus diupayakan selanjutnya adalah fokus kepada perbaikan perekonomian rakyat, sehingga keadaan akan kembali seperti sebelum terjadi pandemic, bahkan lebih,” ujarnya.

Melihat pentingnya kebersamaan untuk mencapai tujuan, Syarif Hasan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bagian dari penyelesaian masalah bangsa. Dia mengajak untuk mencontoh bagaimana kerasnya perjuangan para pahlawan merebut kemerdekaan. “Tanamkan rasa bangga terhadap mereka dalam hati dan perbuatan demi menyelamatkan dan menyejahterakan Indonesia,” ujar Syarif Hasan. □

Peringatan HUT Kemerdekaan RI

Kemerdekaan Harus Diisi dengan Implementasi Nilai Kebangsaan

Bangsa yang merdeka harus mampu berkerja dan berpikir progresif, berpijak di atas pondasi kebangsaan, mengimplementasikan nilai-nilai berbangsa dan bernegara untuk kesejahteraan bersama.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menegaskan, kemerdekaan menuntut tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita para pendiri bangsa melalui implementasi kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem yang biasa disapa Rerie menyampaikan hal itu saat membuka diskusi daring bertema: 'Tantangan Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka,' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (18/8).

Pada diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukannie, Ph.D., (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, hadir Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia), Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama (Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia), Prof. Badri Munir Sukoco, MBA., Ph.D., (Guru Besar Manajemen FEB Universitas Airlangga), Dr. Connie Rahakundini Bakrie (Pengamat Pertahanan Keamanan), Dr. Dianta Sebayang (Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis LPPM Universitas Negeri Jakarta), dan Maya

Muizatil Lutfillah, M.Pd., (Ketua Kopri PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII).

Selain itu hadir pula Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI/ Pakar Hukum Tata Negara), dan Dr. Suyoto, M.Si., (Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik & Isu Strategis DPP Partai NasDem) sebagai penanggung.

Menurut Lestari, mengisi kemerdekaan tak hanya dengan seremoni peringatan, tetapi pemaknaan secara menyeluruh dan khidmat melalui kontemplasi akan perjalanan bangsa dengan segala pencapaian dan tantangan yang ada.

Disrupsi dan pandemi, menurut Rerie, saat ini mewarnai perjalanan bangsa dalam mengisi kemerdekaan.

Sehingga, tegas Rerie, pekerjaan rumah saat ini adalah bagaimana kita bisa survive mengatasi sejumlah tantangan yang saat ini ada di depan mata.

Ketua Kopri PB PMII, Maya Muizatil Lutfillah, M.Pd mengungkapkan, kemerdekaan bisa dimaknai, antara lain sebagai kebebasan, kedaulatan, kemandirian, edukasi dan sumber hukum. Sejumlah makna tersebut bisa menjadi

stimulus terbentuknya sejumlah instrumen untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai contoh, makna di sektor edukasi dari kemerdekaan, menurut Maya, menghasilkan organisasi pelajar yang mampu berperan aktif dalam merebut kemerdekaan.

Sedangkan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Komaruddin Hidayat, menilai, Indonesia relatif lebih baik ketimbang Afganistan, yang setelah ditinggal Amerika Serikat terancam perpecahan antarasuku yang ada.

Indonesia yang juga terdiri berbagai suku, menurut Komaruddin, terbukti mampu bersatu dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan berdirinya Republik Indonesia, tambah Komaruddin, kita bisa sejahtera dan maju untuk menjawab beban bersama dalam mengisi kemerdekaan.

Secara teknis, Komaruddin menilai, dengan berbagai keberagaman yang dimiliki Indonesia, tidak ada sistem politik yang lebih baik dari demokrasi. Namun, tambahnya, demokrasi hingga saat ini belum mampu mendekatkan kepada kesejahteraan dan

keadilan. Bahkan, ujar Komaruddin, praktik demokrasi di Indonesia menciptakan oligarki di sektor politik.

Seharusnya, tegas Komaruddin, untuk menghindari terjadinya oligarki di bidang politik, partai politik wajib memiliki akar yang kuat di masyarakat dan ke atas punya komitmen kuat dalam membangun bangsa dan negara.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Tjandra Yoga Aditama, mengungkapkan, saat ini kondisi pengendalian Covid-19 di tanah air masih fluktuatif. Untuk mengetahui kepastian dalam pengendalian Covid-19, jelas Tjandra, persyaratannya adalah kita harus mampu memastikan proses diagnosis, ketersediaan obat, dan vaksinasi yang baik.

“Bila ada cara mendiagnosa, pengobatan dan vaksinasi yang mudah, murah dan cepat, baru bisa dipastikan kapan kita bisa mengendalikan penyebaran Covid-19,” tegas Tjandra. Hingga saat ini, jelas Tjandra, Indonesia masih dalam lorong yang gelap dan belum terlihat ujung cahaya dalam proses pengendalian Covid-19.

Guru Besar Manajemen FEB Universitas Airlangga, Badri Munir Sukoco, berpendapat, bila ingin tumbuh cepat menuju transformasi menuju Indonesia maju 2045, perlu dicari sejumlah sektor di bidang ekonomi yang bisa tumbuh di atas 10%. Karena itu, jelas Badri, perlu dipetakan jenis-jenis usaha yang berpotensi tumbuh di atas 10%, agar berbagai upaya yang dilakukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi bisa lebih fokus.

Belajar dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok, Badri berpendapat, jenis-jenis usaha yang berorientasi masa depan bisa coba dibangun seperti green economy dan produk kesehatan untuk menopang pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju 2045.

Menurut Badri, Indonesia juga bisa meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian dan nilai tukar petani lewat pengembangan produk-produk pertanian organik. Tanpa upaya tersebut dan tetap bertani secara tradisional, jelasnya, nilai tukar petani Indonesia akan tetap rendah.



Pengamat Pertahanan Keamanan, Connie Rahakundini Bakrie, menilai, tantangan di sektor pertahanan bagi Indonesia di usia kemerdekaan yang ke 76 tahun ini akan berfokus pada perkembangan keamanan kawasan Indo Pasifik. Connie berpendapat, sikap politik luar negeri Indonesia yang memilih untuk tidak masuk dalam blok mana pun atau non-blok harus ditinjau ulang. Karena di era globalisasi ini, menurut Connie, sulit untuk tidak berpihak dan bekerjasama dalam menghadapi tantangan di bidang pertahanan dan keamanan dalam satu kawasan.

Dalam melakukan pembangunan sektor pertahanan nasional, menurut Connie, Indonesia harus memiliki kesadaran lingkungan sehingga paham atas kemampuannya dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman. Selain itu, tambahnya, Indonesia juga harus memiliki kemampuan mengelola lingkungan dan membangun intelektual untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis LPPM Universitas Negeri Jakarta, Dianta Sebayang, berpendapat megatrend dunia mengubah berbagai tatanan di sejumlah

sektor, dan perilaku masyarakat dunia, demikian juga Indonesia. Dalam menyikapi tantangan tersebut, jelas Dianta, perlu dilakukan transformasi ekonomi, untuk pemulihan ekonomi dan keluar dari middle income trap.

Selain itu, tambahnya, juga harus dilakukan transformasi sistem pendidikan dalam rangka mengkonsolidasikan sumber daya manusia (SDM) dengan lapangan usaha. Langkah itu, jelas Dianta, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat yang ujungnya mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Jurnalis senior, Saur Hutabarat, menilai, bangsa Indonesia sudah merdeka, tapi belum mampu menegakkan disiplin. Padahal, jelas Saur, disiplin merupakan tulang punggung dari keadaban.

Di masa pandemi, tegasnya, sikap disiplin adalah segalanya. Tanpa sikap disiplin, kita tidak akan mampu keluar dari pandemi Covid-19.

“Karena banyak perkara besar harus diawali dengan perkara kecil seperti menegakkan disiplin di berbagai bidang,” pungkasnya. □

Pelantikan PAW Anggota MPR RI

Bamsoet: MPR Gencar Melaksanakan Vaksinasi Ideologi

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan, MPR harus mampu membumikan Pancasila. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengajak masyarakat untuk tidak termakan provokasi yang dilakukan berbagai pihak, baik dalam bentuk ujaran kebencian, hasutan, maupun mural, dan berbagai bentuk ekspresi lainnya. Fokus bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana bisa keluar secepat mungkin dari pandemi Covid-19. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, semua elemen bangsa patut mendukung berbagai langkah pemerintah yang sedang bekerja keras mengatasi pandemi sekaligus memulihkan perekonomian nasional.

“Setelah berhasil mencapai target penyuntikan vaksin Covid-19 sebanyak 2 juta dosis per hari, kini pemerintah meningkatkannya menjadi 2,3 juta suntikan per hari. Per 30 Agustus 2021, tercatat dunia sudah menyuntikkan 5,29 miliar dosis vaksin Covid-19. Tiongkok Daratan menempati peringkat pertama, karena telah menyuntikkan 2,04 miliar dosis vaksin. Sementara Indonesia berada di peringkat ketujuh dengan telah menyuntikkan 98,1 juta dosis vaksin Covid-19,” ujar Bamsoet dalam pelantikan pergantian antarwaktu (PAW) anggota MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Ibnu

Mahmud, di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (1/9/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, seiring dengan gencarnya vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah, MPR RI juga terus gencar melaksanakan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Berupa internalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal

lka kepada berbagai kelompok masyarakat.

“Sebagaimana vaksinasi Covid-19, dalam melakukan vaksinasi ideologi pun terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Harus diakui, masih sering terjadi keteledoran, ketidaktaatan, dan penyelewengan atas nilai nilai Pancasila oleh bangsa sendiri. Terutama oleh para penyelenggara negara yang membuat bintang penuntun itu pun secara perlahan seakan akan meredup ditelan bumi,” jelas Bamsoet.





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, kalangan masyarakat, terutama kaum milenial, menyaksikan ideologi lain telah berkembang sebagai sistem pemikiran yang koheren dan atraktif. Sementara, Pancasila sendiri belum sungguh-sungguh didalami dan dikembangkan ke dalam kerangka konseptual, kerangka normatif, dan kerangka operatif. Pancasila masih diekspresikan sebatas klaim kehebatan dalam berbagai pernyataan dan pidato, atau diajarkan sebatas hafalan sejumlah butir moralitas.

“Untuk itu, MPR terus mengembangkan berbagai metode internalisasi dengan contoh nyata yang mudah dipahami dan mudah di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. MPR harus mampu membunikan Pancasila. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kadin Indonesia, ini juga menyoroti rencana MPR RI sejak dua periode MPR RI 2009-2014 dan 2014-2019 lalu menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Keberadaan PPHN jelas berbeda dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kalaupun PPHN tetap dianggap sebagai romantisme masa lalu, maka semua pihak harus memiliki kelapangan

kesadaran, bahwa masa lalu itu tidak pernah sepenuhnya gelap dan tidak pernah sepenuhnya terang. Perkembangan sejarah bangsa yang sehat harus bisa memiliki kedewasaan untuk meneruskan yang terang dan meninggalkan yang gelap.

“Sebuah bangsa yang tidak bisa melihat sisi gelap dari masa lalu terancam dihukum mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, sebuah bangsa yang tidak bisa melihat sisi-sisi terang dari masa lalu tidak memiliki jangkar untuk menambatkan visi ke depan,” sorot Bamsoet.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengakui, amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan di awal Era Reformasi membuat lembaga MPR ini tidak lagi menjadi lembaga tertinggi. Meski demikian, menurut Bamsoet, MPR masih disebut lembaga negara yang mempunyai kewenangan tertinggi, seperti mengamandemen UUD, melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden, sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945.

Lebih dari itu, tambah Bamsoet, diskursus amandemen terbatas untuk menghadirkan PPHN yang kemudian banyak “dipelintir” dan “digoreng” sebagai upaya perubahan perodesasi presiden menjadi 3 kali atau upaya perpanjangan masa jabatan presiden serta isu-isu lain atau kecurigaan yang tidak masuk akal, menunjukkan bahwa bangsa

Indonesia memiliki beragam pikiran dan pendapat.

“Sebagai Rumah Kebangsaan, MPR sangat terbuka bagi siapa saja untuk menyampaikan saran maupun kritik. Karena saya yakin dan percaya, semua yang disampaikan ujungnya adalah untuk kepentingan bangsa agar Indonesia maju dan tumbuh,” ujar Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menekankan, visi kebangsaan merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Sarana untuk memperjuangkannya adalah melalui pembangunan. Hakikat pembangunan adalah proses kolektif menuju kemajuan yang membutuhkan pedoman atau haluan, agar seluruh pemangku kepentingan mempunyai persepsi dan perspektif yang sama. Kesamaan pandangan ini penting, mengingat Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang luar biasa dari berbagai sudut pandang, baik latar belakang ekonomi, sosial, politik, serta adat istiadat dan budaya.

“PPHN dihadirkan untuk menjamin kesinambungan visi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tanpa menghilangkan ruang kreatifitas presiden dan wakil presiden dalam menyusun visi, misi, dan program pembangunannya,” pungkas Bamsoet. □



H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI/Mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

Kecenderungan Positif untuk Mencegah Gelombang Tiga

SETELAH melalui puncak penularan gelombang kedua, tantangan bersama berikutnya adalah mencegah dan menghindari gelombang ketiga penularan Covid-19. Kecenderungan positif dalam pengendalian pandemi Covid-19 di dalam negeri sekarang ini harus dipertahankan dan dirawat dengan tetap bersikap waspada, berhati-hati, dan konsisten mematuhi protokol kesehatan (Prokes).

Penurunan jumlah kasus Covid-19 dan turunnya tingkat keterisian rumah sakit atau BOR (bed occupancy rate) pada rumah sakit rujukan Covid-19 akhir-akhir ini jangan sampai membuat pemerintah dan masyarakat lengah atau ceroboh. Sepanjang tahun kedua ini, perkembangan pandemi masih menghadirkan ketidakpastian. Vaksinasi corona yang telah dilaksanakan di banyak negara memang sangat bermanfaat, tetapi vaksin itu sendiri belum menyelesaikan masalah. Faktanya, penularan virus corona yang menyebabkan lonjakan jumlah pasien masih terjadi di banyak negara.

Data terkini memang memperlihatkan bahwa Indonesia sudah melalui puncak penularan Covid-19 sepanjang gelombang kedua pandemi di dalam negeri. Boleh jadi, pekan ketiga Juli 2021 menggambarkan puncak penularan. Pada 14 Juli 2021, ada 54.517 tambahan kasus baru. Keesokan harinya, 15 Juli 2021, bertambah lagi 56.757 kasus. Dan, pada 16 Juli 2021, tambahan kasus baru mencapai 54.000.

Pekan kedua Agustus 2021 tambahan jumlah kasus per hari sudah memasuki level di bawah 30.000-an kasus. Per Sabtu (14/8), data resmi pemerintah melaporkan tambahan 28.598 kasus baru Covid-19 yang tersebar di 34 provinsi. Konsekuensi dari menurunnya jumlah kasus baru adalah berkurangnya tekanan pada sektor jasa layanan

kesehatan.

Beberapa hari lalu, Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa BOR untuk ruang isolasi di rumah sakit di seluruh provinsi, per 12 Agustus 2021, tidak ada lagi yang mencapai 80%. Namun, khusus ruang Intensive Care Unit (ICU), BOR rumah sakit pada beberapa provinsi masih di atas 80%. Antara lain, Bali, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Riau.

Kecenderungannya layak disebut positif karena pulau Jawa yang sebelumnya sempat berstatus sebagai episentrum wabah corona di dalam negeri mulai menampakkan perubahan yang menjanjikan. Data menunjukkan bahwa angka atau jumlah kasus penularan di Jawa sejak Juli mulai melandai. Karena alasan itulah pemerintah dan Satgas Covid-19 mendorong semua pemerintah daerah di luar Jawa meningkatkan kewaspadaan dan bekerja lebih keras untuk menekan penularan.

Jika saja kecenderungan di pulau Jawa bisa dibuat lebih baik lagi, upaya pemulihan pada sejumlah aspek, terutama aspek ekonomi, bisa dimulai. Produktivitas pulau Jawa masih menjadi kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kecenderungan positif dalam pengendalian pandemi Covid-19 di dalam negeri sekarang ini harus dipertahankan dan dirawat, antara lain dengan tetap bersikap waspada, berhati-hati dan konsisten mematuhi protokol kesehatan (Prokes). Kesadaran bersama akan hal ini sangatlah penting, karena semua elemen masyarakat dihadapkan pada tantangan berikutnya, yakni mencegah dan menghindari gelombang ketiga penularan COVID-19.

Hingga kini, Pandemi Covid-19 pada tingkat global sekali pun masih menghadirkan ketidakpastian. Durasi pandemi ini belum bisa dihitung. Karena itu, ketidak-

pastian dan ketidakpastian itu harus disikapi dengan cerdas dan bijaksana oleh semua elemen masyarakat. Semangat dan tujuan utamanya adalah menghindari gelombang ketiga.

Pada puncak penularan gelombang kedua, tersaji dengan gamblang ragam permasalahan dan banyak kisah memilukan. Rumah sakit rujukan tidak mampu menampung dan melayani semua pasien akibat besarnya lonjakan kasus Covid-19. Jumlah dokter dan tenaga kesehatan (Nakes) jauh lebih sedikit dibanding tambahan jumlah pasien.

Akibatnya, tidak sedikit pasien yang tidak tertolong atau terlambat mendapatkan pertolongan dari dokter dan Nakes. Juga di puncak gelombang kedua itu, penanganan pasien Covid-19 diwarnai dengan stok obat-obatan yang menipis dan keluhan banyak manajemen rumah sakit karena kehabisan oksigen.

Siapa pun tentu tidak ingin tragedi serupa terulang lagi. Semua orang harus mau belajar dari puncak penularan Covid-19 pada gelombang kedua yang menghadirkan ragam eksekusi yang nyata itu. Kini, data-data resmi menjelaskan bahwa Indonesia telah melalui puncak penularan gelombang kedua. Akan tetapi, ancaman dari Covid-19 tidak berkurang dengan sendirinya. Virus corona yang terus bermutasi masih menghadirkan ancaman. Ancaman yang tidak terlihat itu memaksa orang lanjut usia, kaum muda, remaja hingga anak bayi sekalipun melindungi diri dengan Prokes.

Benar bahwa ada kegelisahan sebagian publik karena faktor penerapan pembatasan sosial. Bahkan ada yang menuntut pelonggaran atas PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat). Sayangnya, pada saat yang sama, semua pihak harus mengakui dan menerima fakta bahwa pandemi ini belum berakhir. Pada tingkat global, durasi pandemi yang tidak menentu ditunjukkan oleh kurva penularan yang fluktuatif; menurun di kawasan tertentu, tetapi melonjak di kawasan lain.

Bahkan, karena tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, sejumlah negara sudah menyatakan siap berdampingan hidup dengan virus corona. Namun, kesiapan itu harus didukung oleh sistem layanan kesehatan publik yang efektif merespons pasien yang terinfeksi Covid-19. Salah satu tolok ukur kemampuan itu

adalah mencegah atau meminimalisir jumlah kematian pasien Covid-19. Jika kematian akibat infeksi Covid-19 masih tinggi, itu pertanda sistem layanan kesehatan publik negara bersangkutan belum efektif.

Karena itu, setiap negara didorong untuk tidak gegabah dalam melonggarkan Prokes atau PPKM. Dalam konteks ini, pengalaman buruk Amerika Serikat (AS), Israel serta Inggris layak dijadikan contoh kasus pembelajaran. Pekan keempat April 2021, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pemerintah AS melonggarkan aturan prokes Covid-19.

Karena sudah banyak warga AS yang menerima vaksinasi, peraturan yang mewajibkan penggunaan masker di luar ruangan tidak lagi diwajibkan. Sebelumnya, Israel juga mengumumkan kebijakan pelonggaran yang sama. Inggris pun cenderung melonggarkan ketentuan Prokes selama berlangsungnya turnamen sepakbola Piala Eropa 2020.

Akibat pelonggaran Prokes itu, AS, Inggris dan Israel kembali mengalami lonjakan kasus Covid-19. Memasuki pekan kedua Agustus 2021, jumlah tambahan kasus baru per hari di AS bisa mencapai 100.000 kasus. Rumah sakit di beberapa negara bagian AS sempat kewalahan karena lonjakan jumlah pasien itu. Di Israel, kendati 80% warga dewasa sudah menerima vaksinasi, pelonggaran Prokes justru menyebabkan terjadinya lonjakan kasus baru COVID-19.

Banyak negara sudah belajar dari pengalaman AS, Israel dan Inggris itu, dan semuanya tidak ingin gegabah melonggarkan Prokes. Untuk menghindari gelombang ketiga penularan Covid-19, Indonesia pun tidak boleh gegabah melonggarkan Prokes. Apalagi, persentase penduduk yang sudah divaksinasi belum proporsional.

Puncak penularan COVID-19 gelombang kedua di dalam negeri dengan banyak cerita pilu itu hendaknya mendorong semua elemen masyarakat semakin cerdas dan bijaksana menyikapi ancaman virus corona. Pengendalian pandemi sudah menunjukkan kecenderungan positif, dan kecenderungan ini menjadi modal awal bersama untuk mencegah musibah berikutnya. Biasakan mematuhi Prokes agar Indonesia terhindar dari gelombang ketiga penularan COVID-19. □

Kunker Jawa Barat

Berbagi Rasa di Masa Pandemi

Saling membantu, toleransi, gotong royong di masa pandemi adalah jati diri asli bangsa Indonesia yang harus selalu dijaga.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SELAMA masa pandemi Covid-19, Wakil Ketua MPR, Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., selalu melakukan kegiatan sosial. Salah satunya saat melakukan kunker selama dua hari di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, politisi Partai Demokrat ini menggelar acara 'Pembagian Sembako Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan untuk Masyarakat Kabupaten Cianjur'.

Selama kunker tersebut, Syarif Hasan memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat yang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19.

Pada hari pertama, Jumat (20/8/2021), bantuan langsung diserahkan oleh Syarif Hasan di ruang serba guna DPC Partai Demokrat Cianjur. Hadir dalam acara yang mematuhi protokol kesehatan secara ketat tersebut adalah masyarakat penerima bantuan dengan didampingi tokoh masyarakat, Ketua RT dan RW setempat.

Kepada masyarakat, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014 ini mengatakan bahwa sebagai saudara satu tanah air dan bangsa, dia merasa terpanggil untuk membantu penderitaan rakyat yang kesusahan.

"Walaupun tidak banyak, tapi mudah-mudahan bantuan ini meringankan beban saudaraku semua. Percayalah kalian tidak

sendiri dalam menghadapi bencana ini," katanya.

Syarief Hasan mengingatkan masyarakat agar selalu patuh menjaga protokol kesehatan, seperti selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, selalu menjaga kebersihan diri dan keluarga. "Jangan malas melakukan prokes, sebab selain menjaga diri sendiri juga menjaga kesehatan keluarga dan orang lain," tambahnya.

Di tengah acara, Syarif Hasan berkeliling dan berdialog dengan masyarakat. Salah satunya dialog dengan Ibu Yoyoh, seorang lansia. Kepada Ibu Yoyoh, Syarif Hasan

menanyakan, apa yang dibutuhkan di saat pandemi ini. "Kami kesulitan sembako, sebab di saat kondisi seperti ini, cari uang sulit sekali," jawab Ibu Yoyoh seraya tersenyum. Mendengar penjelasan Ibu Yoyoh itu, Syarif Hasan memberikan semangat agar sabar dan berdoa kepada Allah SWT agar semua ini cepat berlalu.

Ketua RT 01/09 Kampung Bukit Mulya, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Adam Wahyu sangat mengapresiasi kepedulian Syarif Hasan kepada masyarakat. "Masyarakat sini kebanyakan pedagang kecil, buruh, yang sangat terdampak. Bantuan sembako ini sangat





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Mengingat begitu pentingnya rasa kepedulian diwujudkan dalam bentuk gerakan pemberian bantuan massal kepada rakyat kecil, Syarif Hasan mengajak seluruh elemen bangsa agar menjadikannya gerakan serempak dan berkesinambungan berskala nasional. “Kalau ini sampai terjadi, saya rasa akan menguatkan rakyat sehingga mampu bertahan sampai pandemi usai,” pungkasnya.

Kunker di Desa Peuteuycondong.

Di hari kedua rangkaian kunkernya di Cianjur, Sabtu (21/8/2021), Syarif Hasan menyambangi masyarakat desa Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber. Pada kesempatan tersebut, Syarif mengungkapkan keprihatinannya atas bencana pandemi Covid-19 yang belum juga usai.

Dari kegiatan kunjungan kerjanya selama dua hari ini, ia melihat masih banyak rakyat yang sangat kesulitan, walau hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, akibat imbas pandemi yang merontokkan perekonomian mereka.

Kondisi ini sangat berbahaya jika terus dibiarkan. Untuk itulah, Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini tergerak untuk me-

nyambangi rakyat. “Hal ini saya lakukan untuk mengetahui secara tepat apa yang menjadi kebutuhan mendesak rakyat agar beban mereka lebih ringan,” ujarnya.

Usai acara, didampingi Ketua DPC Partai Demokrat Cianjur, Ketua Ormas Bintang Muda Indonesia, dan tokoh masyarakat setempat, dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, Syarif Hasan berkeliling menyusuri gang-gang sempit Desa Peuteuycondong, melakukan dialog singkat dan memberikan bantuan sembako langsung di depan pintu rumah rakyat.



Adam Wahyu

Ibu Lasmi seorang warga setempat yang rumahnya menjadi salah satu ‘sasaran’ kunjungan Syarif Hasan, sempat tak percaya kediaman sederhananya didatangi pejabat negara. Dengan senyum mengembang, Syarif Hasan menyapa, “Ibu semoga sehat selalu seluruh keluarga, jangan lupa protokol kesehatan. Selalu sabar dalam situasi seperti ini,” katanya, seraya memberikan sekotak sembako.

Syarief Hasan mengatakan bahwa bentuk empati yang diberikannya kepada rakyat kecil bermakna besar buat mereka. “Perhatian dan uluran tangan tulus buat rakyat yang membutuhkan akan memberikan semangat besar. Lagipula, kebaikan yang kita berikan itu akan berbalik kebaikan juga kepada kita, dengan meluncurnya doa-doa dari mereka,” tambahnya.

Untuk itu, Syarif Hasan mengajak seluruh rakyat Indonesia, terutama yang masih memiliki kelebihan, untuk mempertebal rasa persaudaraan serta kepedulian sosial dengan segera memberikan perhatian dan membantu saudara sebangsa yang kesusahan. “Jangan tunggu besok-besok atau memberikan bantuan besar, bantuan kecil tapi cepat dan tepat akan sangat terasa dampaknya,” tandasnya. □

DER

Temu Tokoh Nasional Mapadi

Azas Tunggal Sampai Mengusik Hubungan Islam dan Indonesia



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

JELANG peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia lalu, Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengajak Organisasi Pesantren bersama seluruh bangsa Indonesia untuk memaksimalkan peran mengisi dan mensyukuri nikmat kemerdekaan RI dengan mempererat kerjasama, persatuan, dan kesatuan. Mari, bersama-sama berkontribusi mengisi kemerdekaan dengan segala yang positif dan konstruktif untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi, seperti meninggalkan kebiasaan kaum kolonialis yang memecah belah antarkelompok masyarakat, membiarkan laku menyimpang dari etika, hukum dan korupsi.

“Maka peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia tidak selayaknya hanya diisi dengan euforia sesaat, misalnya lomba makan kerupuk atau lainnya. Tetapi HUT Kemerdekaan juga harus mampu mengingatkan bangsa Indonesia untuk ingat sejarah perjuangan kemerdekaan dan cita-cita Bapak dan Ibu Bangsa, dan terus mengisi kemerdekaan, mengejar ketertinggalan dari bangsa bangsa lain di dunia. Hanya dengan mengisi kemerdekaan secara jujur dan serius, peringatan HUT Proklamasi akan semakin menjadi punya arti,” ujar HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid.

Pernyataan itu disampaikan HNW membuka dan menjadi pembicara pada acara Temu Tokoh Nasional, yang digelar MPR RI bekerjasama

dengan Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia (Mapadi). Acara tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Ar Risalah, Kota Padang, Jumat (12/8/2022). Ikut hadir pada acara tersebut anggota MPR RI Fraksi PKS, Dr. Hermanto, SE., MM.; Ketua Umum PP Mapadi KH. Dr. Muslih Abdul Karim, LC., MA.; Sekretaris Umum PP Mapadi, H. John Edy Rahman, SH., M.Kn., serta Ketua Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Ar Risalah, H. Arwin Alibrahimi, LC., MA.

Sebelumnya, saat menjadi narasumber Temu Tokoh Nasional, HNW mengajak seluruh ormas Islam, termasuk Ormas yang menghimpun pesantren tidak lagi merasa canggung, apalagi takut juga trauma untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat, guna berkontribusi dan mensyukuri kemerdekaan RI. Karena berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Yaitu, Pasal 28 E ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saat ini, menurut HNW, pelarangan terhadap organisasi kemasyarakatan, termasuk ormas Islam, untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat sudah tidak ada. Asalkan berkumpul dan pendapat yang di sampaikan dalam perkumpulan itu tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD NRI Tahun 1945. Karena memang larangan berkumpul, berserikat, dan berpendapat,

TEMU TOKOH NASIONAL

KERJASAMA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
MAJELIS PESANTREN DAN MA'HAD DAKWAH INDONESIA

Kota Padang, 12 Agustus 2022



DENGAN
MAJELIS PESANTREN DAN MA'HAD DAKWAH INDONESIA



masih berlaku bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) dan penyebaran paham komunisme sesuai TAP MPRS no XXV /1966. Karena hingga kini keberadaan TAP MPRS no 25/1966 masih berlaku.

“Sejak dulu Islam, termasuk pesantren, dan perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka berjalan beriringan. Bahkan rezim kolonial Belanda bisa mengakui lahirnya Al-Irsyad,

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PUI, dan Persis yang semuanya berasaskan Islam. Dan, tatkala membahas konstitusi, Soekarno-Hatta menerima masukan beberapa tokoh seperti, Ki Bagus Hadikusumo dan Ahmad Sanusi, yang mengusulkan syariat Islam. Kemesraan Islam dan Indonesia sempat ternodai saat lahirnya asas tunggal pada tahun 1985. Tapi, setelah tahun 1998,

kewajiban asas tunggal di sebagian era rezim Orba itu dicabut oleh Presiden BJ. Habibie, hingga kini,” jelas Hidayat.

Karena itu, menurut HNW, yang juga anggota Komisi VIII DPR RI yang antara lain membidangi urusan Agama, sudah bukan zamannya lagi menuduh umat dan ormas Islam sebagai kelompok intoleran maupun terorisme. Apalagi jika itu dikaitkan dengan asas Islam. Terbukti, sejarah Indonesia juga menulis berbagai peristiwa dan peran serta umat dan tokoh-tokoh Islam bersama dengan bangsa Indonesia yang lain, menyelamatkan dan memperjuangkan berdiri tegaknya NKRI.

“Sekarang saatnya ormas-ormas kepesantrenan, termasuk Mapadi, untuk berkolaborasi lanjutkan peran dan perjuangan para Ulama dan Pesantren-pesantren untuk makin berkontribusi mengisi, menyukuri, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia,” pungkasnya. □

Sosialisasi Empat Pilar di Kalangan MA

Wawasan Kebangsaan Warga Mathla'ul Anwar Tak Perlu Diragukan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SELEPAS salat Jumat, 19 Agustus 2022, ratusan warga Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, memenuhi Aula Perguruan Mathla'ul Anwar (MA) Pusat Menes. Kehadiran warga yang didominasi oleh para guru di Kantor Pusat MA itu untuk mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau populer disebut Empat Pilar MPR.

Hadir dalam kegiatan yang menjadi perhatian warga di kabupaten yang berada di ujung barat Pulau Jawa itu, Wakil Ketua MPR, H. Yandri Susanto, S.Pt., Wakil Ketua Umum PB MA Drs. H. Babay Sujawandi, Sekretaris Jenderal PB MADr. H. Jihaduddin M.Pd., serta jajaran pengurus organisasi itu baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Mengawali sosialisasi, Yandri mengundang beberapa peserta untuk tampil ke depan. Kepada para peserta yang datang dari berbagai wilayah di Pandeglang itu, Yandri menguji pengetahuan mereka tentang Pancasila, sejarah UUD, dan mengenai wawasan kebangsaan. Di antara mereka ada yang lancar menjawab pertanyaan, ada

pula yang masih perlu diluruskan. Cara sosialisasi yang demikian membuat suasana menjadi meriah, segar, dan tidak kaku.

Dalam pemaparan, Yandri mengungkapkan, MA mempunyai peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa. Sebagai organisasi yang lahir pada tahun 1916, di Menes, Pandeglang, organisasi ini telah banyak berkontribusi pada bangsa, negara, dan masyarakat. "Sejarah bangsa tak lepas dari dinamika MA," ujar alumni Universitas Bengkulu itu. "Banyak tokoh yang terlahir dari organisasi yang kepengurusannya tersebar di seluruh Indonesia ini," tambahnya.

Diaku organisasi yang sejak 1936 sudah melakukan muktamar itu mempunyai potensi yang luar biasa. Dirinya ingin MA lebih maju, lebih baik, dan tidak dipandang sebelah mata. Dia berharap, tokoh-tokoh MA percaya diri dan lebih meningkatkan kontribusi kepada bangsa, negara, dan masyarakat untuk politik kebangsaan. "Untuk itu jangan alergi pada politik," tegasnya. "Sebab tanpa politik yang benar bangsa ini akan porak poranda," tambahnya.

Terkait wawasan kebangsaan yang

dimiliki oleh MA, Yandri menyebut, tak perlu diragukan lagi. "Dalam hymne MA menyebut kata Pancasila," tuturnya. "Wawasan kebangsaan bagi MA sudah selesai," tambahnya. Atas pemahaman wawasan kebangsaan MA dan kontribusi yang telah diberikan kepada bangsa, negara, dan masyarakat, membuat dirinya mengingatkan kepada pemerintah agar memerhatikan keberadaan organisasi yang memiliki berbagai badan otonom itu.

Meski politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tidak ragu akan wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh warga MA, Yandri tetap mengingatkan agar mereka mengimplementasikan Pancasila dalam keseharian. "Pancasila jangan hanya dihafal, namun harus diamalkan", ujarnya.

Bila Pancasila diamalkan, lanjut Yandri, maka perasaan iri, dengki, hasut, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, dan menyebar berita hoax, tidak akan terjadi. "Di MA, hymne yang ada menyebut Pancasila, maka hal yang demikian harus dijadikan teladan," ujar pria asal Bengkulu itu. "Putera puteri MA harus merawat nilai-nilai Empat Pilar MPR," tuturnya.

Sebagai ideologi yang sudah final, dirinya mengajak kepada semua untuk menjaga Pancasila. "Kalau ada yang mau mengubah Pancasila, ya kita lawan," tegasnya. Ideologi ini lahir dari kesepakatan para founding fathers di mana di antara mereka adalah dari kalangan ulama.

Sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, budaya, dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Keberagaman yang ada harus dihargai. Sebagai negara kesatuan, seluruh warga Indonesia bisa tinggal di mana saja. "Orang Lampung bisa tinggal di Banten, orang Banten bisa tinggal di Lampung," ujarnya. Bila semua berjalan sesuai dengan Empat Pilar MPR maka dia yakin harmoni bangsa akan tercipta. □

HNW: Pancasila adalah Ideologi Menyatukan Bangsa

WAKIL Ketua MPR-RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., didaulat menjadi warga kehormatan Pimpinan Pemuda Pancasila Jakarta Selatan. Prosesi pengangkatan Hidayat menjadi Warga Kehormatan Pemuda Pancasila Jakarta Selatan, ditandai dengan dipakaikan jaket Pemuda Pancasila, dalam suatu acara di Jakarta, Ahad (21/8/2022).

Dengan diangkatnya HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, wakil waktu dari dapil DKI Jakarta ini diminta menutup kegiatan Diklat Kaderisasi Kualifikasi Madya Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Jakarta Selatan. Acara tersebut berlangsung di Jakarta, Ahad (21/8/2022).

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa HNW, ini menekankan pentingnya integritas dalam pengamalan Pancasila. Dan, menjadikan Pancasila sesuai fitrahnya sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa, bukan alat untuk memecah belah.

“Sekalipun beragam peristiwa terjadi dari tahun 1945 hingga sekarang, tapi kita tetap bersatu dan NKRI tetap terjaga. Karena kita memiliki ideologi yang muncul dari budaya bangsa sendiri yang disepakati dan dirawat bersama oleh Bapak dan Ibu Bangsa dari berbagai latar belakang yang sangat majemuk, yakni Pancasila,” tutur Hidayat.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menjelaskan, di era modern ada dua negara, yaitu Uni Soviet dan Yugoslavia yang gagal mempertahankan eksistensinya. Dan, itu patut menjadi pelajaran agar tak terulang atau menjalar ke Indonesia.

Uni Soviet telah bubar karena tidak memiliki kesepakatan basis ideologi yang muncul dari budaya bangsa sendiri, yang disepakati dan mampu mengikat secara sukarela semua kelompok bangsa di dalamnya, yaitu Komunisme. Sementara Yugoslavia pecah karena persatuan federasinya dibasiskan pada ketokohan Bapak Bangsa. Sehingga ketika tokoh bangsa itu meninggal maka pengikat di antara negara-negara bagiannya pun menjadi sangat rapuh, dan tidak mampu menjaga kelanjutan Yugoslavia sebagai negara federasi.



“Di saat yang sama, kita memiliki Pancasila, ideologi yang digali dari budaya bangsa sendiri. Dan, disepakati oleh Bapak Ibu Bangsa dari latar belakang yang beragam. Bahkan, Bung Karno tidak mengklaim sebagai penemunya sehingga beliau mudah menerima Pancasila hasil musyawarah dalam Panitia 9 maupun PPKI yang tidak sepenuhnya seperti yang beliau pidatikan pada tanggal 1 Juni 1945 saat sidang BPUPK. Karenanya, Pancasila bukanlah ideologi yang mengkultuskan Bapak Bangsa, melainkan sebagai hasil pemikiran bersama seluruh bapak ibu bangsa Indonesia sendiri. Sehingga kini terus hidup dan disepakati. Indonesia terus bisa eksis dan terintegrasi sampai masa yang akan datang,” lanjutnya.

Sejarah pembentukan dan proses menyepakati Pancasila sebagai ideologi yang menyatukan dan menyelamatkan bangsa serta negara, kata HNW, telah mengajarkan kita untuk mengedepankan sikap bergotong-royong, bekerja sama, saling menghormati, berbuat baik, menyumbangkan pemikiran jernih, serta berani untuk mendengar, menerima, dan menyepakati yang terbaik.

Pancasila juga memiliki sisi sosial, hukum, ekonomi, budaya, kemanusiaan, kesatuan

nasional, sebagaimana dinyatakan oleh Bung Hatta, berada di bawah sisi spiritualitas yang termaktub jelas dalam sila pertama Pancasila sebagai bingkai yang menjadi spirit pelaksanaan sila-sila berikutnya, yang bisa menyatupadukan dan meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai sisinya, sebagaimana dinyatakan dalam sila-sila Pancasila berikutnya.

“Inilah nilai-nilai integritas berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dikandung oleh sila pertama Pancasila, juga penting untuk terus disegarkan kembali. Saya mengapresiasi Pemuda Pancasila Jakarta Selatan yang menyelenggarakan diklat dalam rangka penguatan komitmen berpancasila ini,” kata HNW lebih lanjut, “Semoga diikuti oleh Pemuda Pancasila di daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia.”

Karena, tambah HNW, hal ini juga membuktikan salahnya pendapat yang menyatakan bahwa kaum muda tidak peduli dengan Pancasila. Diklat yang diselenggarakan oleh Pemuda Pancasila yang mengedepankan komitmen ber-Pancasila secara jujur, baik, dan benar, menjadi bukti bahwa masa depan bangsa dan negara Indonesia akan tetap terjaga dengan ideologi Pancasila, bukan dengan ideology lain,” pungkasnya. □

Sosialisasi Empat Pilar Bersama KOMINDO Sejahtera

Bamsoet Tegaskan Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, Ketetapan MPR Nomor 16/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi merupakan bagian dari arah kebijakan, strategi, dan pelaksanaan pembangunan sistem perekonomian nasional. Karakteristik yang ingin diwujudkan adalah sistem perekonomian nasional yang kuat, dan lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat, yang mencakup koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Koperasi merupakan representasi perekonomian yang paling nyata dari amanat Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa 'Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan'. Menjadikan Koperasi sebagai bangun ekonomi 'sokoguru' atau tulang punggung perekonomian nasional, dan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional.

"Saya berharap, penguatan Pengurus

Koperasi UMKM Indonesia (KOMINDO) Sejahtera se-Indonesia sekaligus peluncuran Marketplace KOMINDO Sejahtera menjadi bagian dari kebangkitan per-Koperasian serta perekonomian nasional, baik sebagai gerakan ekonomi kerakyatan maupun sebagai badan usaha," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama KOMINDO Sejahtera, secara virtual dari Jakarta, Kamis (25/8/22).

Turut hadir antara lain, Ketua Umum KOMINDO Sejahtera Imlahyudin Tuanaya beserta segenap Jajaran, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Achmad Sapari, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Ema Rachmawati, Danrem 074/Warastratama Kolonel Inf Achiruddin, Ketua OJK Surakarta Eko Yuniyanto, dan Wakapolres Surakarta AKBP Gatot Yulianto.

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selama lebih dari dua tahun, pandemi Covid-19 telah memicu terjadinya resesi global, dan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Tercermin dari Laporan 'Global Economic Prospects', yang

merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022, dari sebelumnya sebesar 4,1%, turun menjadi sebesar 2,9%.

"Di dalam negeri, pandemi telah melenyapkan banyak lapangan pekerjaan, lebih dari 21 juta penduduk usia kerja terdampak. Sektor perekonomian yang terdampak paling nyata adalah UMKM, mengingat lebih dari 99% pelaku usaha di seluruh Indonesia berasal dari sektor UMKM," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, semangat dan suasana kebatinan yang terkandung dalam rumusan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menekankan, sistem perekonomian nasional Indonesia adalah sistem perekonomian yang khas, yang berbeda dengan dua kutub dikotomi perekonomian yang telah menjadi hegemoni global. Di satu sisi, sistem perekonomian Indonesia bukanlah sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi.

"Di sisi lain, sistem perekonomian kita juga bukan sistem ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi. Sistem Ekonomi kita adalah sistem Ekonomi Pancasila, yakni pengelolaan ekonomi negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila bersumber pada nilai-nilai yang mengedepankan nilai-nilai religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan keadilan sosial," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila sekaligus Wakil Ketua Umum FKPP/Kepala Badan Bela Negara FKPP ini menambahkan, peran Koperasi sebagai Duta Ekonomi Pancasila, sekaligus sebagai sokoguru atau tulang punggung perekonomian nasional, dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Dari perspektif keadilan dan kesejahteraan sosial, Koperasi menjadi wadah bagi pemberdayaan dan pembinaan ekonomi kerakyatan, sehingga memiliki daya tahan

dan sekaligus daya saing. Koperasi adalah sektor perekonomian yang menjadikan kemakmuran dan kesejahteraan sosial sebagai muara tujuan. Dalam kerangka ini, Koperasi juga menjadi sarana untuk memperjuangkan harkat dan martabat

kemanusiaan.

“Meskipun modernitas zaman akan selalu menghadirkan tantangan dalam kehidupan perekonomian nasional, namun saya yakin dan percaya, jika kita bersungguh-sungguh dalam membangun

komitmen kolektif dari segenap pemangku kepentingan, Koperasi akan mampu bangkit kembali, merepresentasikan diri sebagai ‘wajah’ Ekonomi Pancasila, dan sekaligus menjadi sokoguru perekonomian nasional,” pungkas Bamsuet. □

Hadiri Peluncuran Buku Jafar Hafsah

Bamsuet Apresiasi Terbitnya Buku ‘NKRI Harga Mati’



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi lahirnya buku ‘NKRI Harga Mati’ karya Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Jafar Hafsah. Melalui buku ini, cakrawala pandang terhadap gagasan negara kesatuan dikonstruksikan dari berbagai perspektif, termasuk di dalamnya rujukan global, sudut pandang historis, faktor geografis dan demografi, landasan konstitusional, rujukan sistem pemerintahan dan pengelolaan sumberdaya alam, aspek sosial budaya, serta eksistensi partai politik.

“Kita patut bersyukur setelah melewati usia 77 tahun kemerdekaan, Indonesia masih tetap tegak berdiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena faktanya, tidak semua negara mampu mempertahankan keutuhan negaranya. Uni Soviet, misalnya, terpecah menjadi 15 negara

menjelang 70 tahun usianya, dari tahun 1922 hingga 1992. Yugoslavia juga pecah menjadi 7 negara menjelang 74 tahun usianya dari tahun 1918 hingga 1992,” ujar Bamsuet dalam peluncuran buku ‘NKRI Harga Mati’ karya Jafar Hafsah, di Komplek MPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/22).

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan dan Fadel Muhammad, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Rektor IPB University sekaligus Ketua Umum ICMI Arif Satria, serta Pakar Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin. Hadir pula para Anggota DPR RI, antara lain Teuku Riefky Harsya, Herman Khaeron, dan Muslim.

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, merujuk

aspek yuridis, gagasan negara kesatuan merupakan pengejawantahan rumusan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gagasan ini kemudian dijabarkan secara tersurat dan ditegaskan dalam rumusan UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 Ayat (1), menyatakan bahwa negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

“Semangat dan cita-cita mewujudkan negara kesatuan juga termanifestasikan pada rumusan pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, frasa ‘dibagi atas’ dan bukan ‘terdiri atas’ menegaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan, di mana kedaulatan negara berada di pusat. Hal ini berbeda dengan frasa terdiri atas, yang cenderung merujuk pada konsep federalisme, di mana kedaulatan berada di tangan masing-masing negara bagian.

“Sejarah memang mencatat, Indonesia pernah beralih menjadi federalisme sejak pemberlakuan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949. Bentuk federalisme ternyata tidak menjamin terwujudnya stabilitas politik, tidak mampu mengelola kemajemukan antar daerah, serta tidak mampu menjawab berbagai persoalan kebangsaan yang mengemuka pada saat itu.

Sehingga pada 17 Agustus 1950, para pendiri bangsa bersepakat untuk kembali pada bentuk negara kesatuan. Diperkuat kembali dengan diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila sekaligus Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menambahkan, setelah melampaui dinamika kesejarahan, komitmen untuk mempertahankan NKRI tidak pernah tergoyahkan. Dibuktikan ketika amendemen terhadap Konstitusi akan bergulir, MPR telah membangun beberapa kesepakatan dasar, salah satunya adalah, bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, dilakukan dengan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kesepakatan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa bentuk negara kesatuan adalah legasi kesejarahan yang tidak boleh kita



ingkari, yang telah ditetapkan sejak berdirinya negara Indonesia. Bentuk negara kesatuan dipandang mampu mawadahi

karakteristik bangsa Indonesia yang sangat majemuk dari berbagai aspek dan dimensi,” pungkas Bamsoet. □

Dialog KompasTV

Konsep Gotong Royong Sangat Tepat Mengatasi Persoalan Dunia

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo agar bisa memanfaatkan momentum sebagai pemimpin sekaligus tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi G-20, untuk menawarkan konsep gotong royong sebagai salah satu dari nilai Pancasila kepada dunia. Baik untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan berbagai persoalan kesehatan lainnya, seperti cacar monyet yang mulai menyebar, maupun dalam mengatasi persoalan ekonomi dunia.

Konsep gotong royong sangat tepat dikedepankan dalam mengatasi berbagai persoalan dunia. Terkait pandemi Covid-19, misalnya, saat ini dunia masih dihadapkan pada ketimpangan akses antara negara maju dengan negara berkembang dan negara miskin dalam mendapatkan pasokan vaksin. Terlihat dari tingkat vaksinasi negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Utara yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat vaksinasi di kawasan Afrika.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

“Kesenjangan yang mencolok itu tergambar nyata. Misalnya, hingga April 2022 negara Kanada tercatat memiliki stok vaksin setara 9,6 dosis per-orang, sedangkan di Afrika hanya tersedia 0,2 dosis per-orang, sangat jauh dari apa yang dibutuhkan. Di negara-negara maju

ketersediaan vaksin berlimpah, sementara di lebih dari 45 negara cakupan vaksin dosis pertamanya saja masih di bawah 30%, beberapa negara bahkan masih di bawah 10%,” ujar Bamsoet saat menjadi narasumber Kompas TV Seminar Series-2, kerjasama Kompas TV dengan BPIP.

Turut hadir dan menjadi narasumber dalam Kompas TV Seminar Series-2 yang berlangsung di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (24/8/22), antara lain: Anggota DPR RI Hendrawan Supratikno, Ikon Pancasila 2021 sekaligus peneliti vaksin AstraZeneca Carina Joe, serta Peneliti HAM Gustika Jusuf Hatta.

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, meskipun nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa Indonesia, namun pada hakikatnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai universal, sehingga dapat dengan mudah diterima oleh komunitas/masyarakat global. Inilah yang menjadikan penerapan nilai-nilai Pancasila dapat kita temukan rujukannya dalam berbagai aspek dan dimensinya, termasuk dalam penyelesaian persoalan kesehatan global.

“Misalnya, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ke-2 Pancasila, dapat kita rujuk pada penyelenggaraan kerjasama kemanusiaan dalam penanganan pandemi di

tingkat global. Bantuan kemanusiaan tersebut dilandasi oleh dorongan yang tulus untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang menjadi hak bagi setiap warga dunia,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, agar nilai-nilai Pancasila bisa terus relevan dalam segala situasi, Pancasila harus membumi, senantiasa hadir dalam tataran realita, dan bukan menjadi konsep di awang-awang. Pancasila harus menjadi nyata. Pancasila tidak boleh diucapkan tanpa pemaknaan yang tulus, hanya agar ‘terlihat’ nasionalis, empatis, dan populis di hadapan publik.

“Nilai-nilai Pancasila tidak boleh hanya diekspresikan sebatas klaim kehebatan dalam ritual pernyataan dan pidato, atau diajarkan sebatas hafalan sejumlah butir moralitas semata. Melainkan harus diimplementasikan dalam sikap hidup keseharian. Toleransi dan tenggang rasa, misalnya, merupakan bagian kecil dari wujud sikap Pancasila yang harus dihadirkan dalam

kehidupan keseharian setiap anak bangsa,” terang Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila sekaligus Wakil Ketua Umum FKPP/ Kepala Badan Bela Negara FKPP ini menambahkan, Presiden Soekarno pernah menyampaikan ideologi Pancasila saat berpidato di depan Kongres Amerika Serikat pada tahun 1956. Soekarno menerjemahkan Pancasila dengan bahasa yang sederhana. Pada pidato tersebut, Soekarno menyampaikan konsep believe in God, humanity, nationalism, democracy, and social justice.

“Kedudukan Indonesia sebagai pengampu Presidensi G20, dan pengaruh kuat Indonesia di kawasan ASEAN, harus dapat dioptimalkan untuk mengemukakan nilai-nilai universalitas Pancasila dalam mengatasi ketimpangan rasio laju pertumbuhan penduduk dunia dengan penurunan daya dukung lingkungan global. Universalitas nilai-nilai Pancasila inilah yang harus terus-menerus kita suarakan melalui berbagai forum internasional, sebagaimana telah dicontohkan oleh Bung Karno,” pungkas Bamsuet. □

Empat Pilar di PPM Baitussalam Prambanan

MPR Garda Terdepan Menjaga dan Menyelamatkan Konstitusi

WAKIL Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menyatakan, MPR adalah garda terdepan untuk menjaga dan menyelamatkan ketentuan konstitusi, UUD NRI Tahun 1945. Ini terbukti kembali ketika MPR menegaskan sikap untuk menaati dan melaksanakan konstitusi, sekalipun ada berbagai desakan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden hingga tiga periode.

MPR, lanjut HNW – sapaan Hidayat Nur Wahid— sudah tegas menyatakan bahwa semua pihak harus taat konstitusi dan semangat reformasi, karenanya MPR menyatakan tidak ada amandemen UUD NRI Tahun 1945 pada periode MPR saat ini (2019 – 2024). “MPR menegaskan bahwa sesuai ketentuan konstitusi, masa jabatan presiden



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

adalah maksimal dua kali masa jabatan dan pemilihan umum harus diselenggarakan lima

tahun sekali,” ujarnya.

Menurut HNW, MPR sudah ketok palu, tidak

ada amandemen UUD NRI Tahun 1945 pada periode ini, sehingga dipastikan masa jabatan presiden hanya dua periode saja. Karenanya masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada 2024.

“Jadi, tidak ada pengunduran Pemilu, karena sesuai ketentuan Konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22 E ayat 1, Pemilu harus diselenggarakan 5 tahun sekali. Oleh karena itu, Pemilu/Pilpres akan diselenggarakan pada tahun 2024,” kata HNW dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR yang diikuti oleh Forum Pesantren Alumni Gontor di Pondok Pesantren Modern (PPM) Baitussalam, Prambanan, Sleman, DIY, Sabtu (27/8/2022).

Turut hadir dalam sosialisasi Empat Pilar MPR ini, Pimpinan PPM Baitussalam, K.H. Abdul Hakim, Ketua FPAG (Forum Pesantren

Menurut Hidayat, aturan tentang masa jabatan presiden sudah jelas dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945). Dalam pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. “Berarti maksimal hanya dua kali masa jabatan. Itu menjadi arus besar di MPR, bahkan menjadi keputusan bersama di MPR,” imbuhnya.

Hidayat menjelaskan bahwa latar belakang munculnya amandemen UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan wacana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Wacana PPHN muncul karena sudah tidak ada lagi GBHN. Salah satu kesepakatan reformasi adalah

presiden berikutnya. Kondisi ini membuat Indonesia seperti menari poco-poco, karena presiden, gubernur, bupati, serta walikota, bisa dari partai berbeda-beda dengan program dan janji kampanye yang berbeda-beda,” tuturnya.

“Karena itu, MPR merekomendasikan untuk mengkaji GBHN. Maka dibentuklah Badan Pengkajian MPR yang mengkaji tentang PPHN. Memang bukan GBHN seperti dulu, tapi PPHN bisa memberi arahan. Agar siapapun presidennya tidak keluar dari haluan negara, demikian juga gubernur, bupati dan walikota,” sambungnya.

Namun, lanjut HNW, perdebatan terjadi ketika menentukan dasar hukum atau bentuk hukum PPHN, apakah dimasukkan dalam UUD dalam bentuk Ketetapan MPR sehingga perlu amandemen UUD, atau dalam bentuk UU. Salah satu partai yang mendukung PPHN melalui amandemen UUD adalah PDI Perjuangan. Perdebatan ini berlangsung sampai munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

“Ketika terjadi ‘gonjang-ganjing’ itu dan penolakan terhadap wacana masa jabatan presiden tiga periode, akhirnya kawan-kawan kami di MPR yang tadinya mengusulkan amandemen UUD untuk menghadirkan PPHN, mereka balik badan menarik usulan menghadirkan PPHN melalui amandemen. Mereka khawatir amandemen UUD ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang menyalip di tikungan terakhir dengan memasukkan agenda perubahan UUD untuk melegalkan masa jabatan presiden tiga periode,” papar HNW.

Menurut HNW, MPR sudah ketok palu bahwa tidak ada amandemen pada periode ini. Jadi, clear. Keputusan terakhir di MPR adalah sepakat bulat tidak ada amandemen UUD pada periode sekarang ini (2019- 2024). “Karenanya, masa jabatan presiden tetap maksimal dua kali masa jabatan dan pemilihan umum tidak bisa diundurkan, tapi tetap harus lima tahun sekali, diselenggarakan pada tahun 2024,” papar HNW.

“Maka yang terpenting sekarang, saat tahapan Pemilu sudah dimulai, agar semua pihak: Pemerintah, KPU, DPR, Partai, Pengamat dan Rakyat, agar focus, kawal supaya hambatan-hambatan Pemilu segera diatasi, agar Pemilu sukses, dan tak hadirkan kembali pembelahan seperti dalam Pilpres 2019,” pungkasnya. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Alumni Gontor) KH Dr Zulkifli Muhadli, MM.

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan salah seorang peserta yang menyebutkan adanya isu bahwa MPR sedang mengupayakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, melalui perubahan UUD. “Saya menyatakan, tidak benar MPR sedang mengupayakan perpanjangan masa jabatan presiden,” tegas HNW.

Hidayat mengakui, memang ada pihak di luar MPR yang ngotot mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden. “Saya berpendapat wacana itu boleh-boleh saja kalau sesuai dengan konstitusi. Tapi, kalau wacana tidak sesuai konstitusi, seperti masa jabatan presiden tiga periode, lebih konstruktif kalau jangan diwacanakan. Kecuali konstitusinya diubah dahulu,” ujarnya.

menguatkan sistem presidensial. Karena itu, presiden tidak dipilih oleh MPR, melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat. “Karena presiden bukan lagi mandataris MPR yang menjalankan GBHN buatan MPR maka kewenangan MPR membuat GBHN dihapus,” jelasnya.

Namun, dalam perjalanannya, ketiadaan GBHN membuat arah pembangunan tidak jelas. Meskipun sudah ada UU tentang Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang, namun UU itu adalah produk presiden terpilih, bukan produk representatif dari cabang-cabang kekuasaan negara: eksekutif, legislatif dan yudikatif.

“Karena itu, UU tersebut tidak komprehensif sehingga perlu dikoreksi. Apalagi UU itu tidak mutlak mengikat sehingga bisa tidak dilaksanakan oleh

Peresmian Gedung Asrama Putri Ponpes Modern Baitussalam

HNW Berharap Dana Abadi Pesantren Segera Terwujud

WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berharap, pendidikan Islam seperti pondok pesantren mendapatkan hak yang adil dari negara. Pemerintah sudah membuat UU Pesantren dan Kementerian Pendidikan akan merevisi UU Sistem Pendidikan Nasional. Hidayat berharap, regulasi itu bisa berujung pada kemaslahatan bagi bangsa dan negara, termasuk pendidikan Islam, pesantren, dan lainnya.

“Karenanya, sangat penting pemerintah memberi perhatian serius dan membantu agar

terhadap pesantren secara normatif sangat baik karena sudah dibuatkan UU tentang Pesantren. Regulasi ini merupakan sebuah pengakuan luar biasa terhadap pesantren, karena baru kali ini ada UU tentang Pesantren. Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Dana Abadi).

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 merupakan aturan lanjutan dari UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2019

tentu untuk meningkatkan kualitas pesantren sebagai salah satu bentuk pendidikan keagamaan di Indonesia,” sambungnya.

Hidayat berharap, pesantren yang mendapat kepercayaan masyarakat bisa membuat pemerintah nyaman dan berpihak pada pesantren. “Dari dulu pesantren sudah bermitra dengan bangsa Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Peran dan jasa pesantren untuk bangsa dan negara sudah terbukti, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Maka, sudah selayaknya



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pendidikan keagamaan, seperti madrasah, pesantren, dan lainnya untuk berkembang. Sebagai contoh, untuk pesantren sudah ada UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur Dana Abadi Pesantren,” kata HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, usai peresmian Gedung Asrama Putri Tareem dan Badan Wakaf PPM Baitussalam Prambanan, Yogyakarta, Sabtu (27/8/2022).

Peresmian Gedung Asrama Putri Tareem dan Badan Wakaf PPM Baitussalam ini dihadiri Pimpinan PM Baitussalam K.H. Abdul Hakim, Pimpinan PPM Gontor Drs. K.H. M. Akrim Maryat, Dipl.A.Ed., Bupati Sleman Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo, Sekretaris Daerah DIY Drs. Raden Kadamanta Baskara Aji, Kepala Dikpora DIY Didik Wardaya, SE., MPd., Pimpinan Forum Pesantren Alumni Gontor KH. Zulkifli Muhadli.

Hidayat mengakui, perhatian pemerintah

menyatakan, Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan pesantren. Dengan keluarnya Perpres Dana Abadi Pesantren maka pemerintah sudah membuat peraturan turunan yang legal untuk melaksanakan UU Pesantren, antara lain untuk merealisasikan bantuan pendanaan pesantren yang bersifat abadi, hingga masa yang akan datang.

“Itu sebuah Perpres yang sangat baik. Akan tetapi lebih baik lagi kalau Dana Abadi Pesantren itu bisa diwujudkan. Karena, kami di DPR melihat dan mengkritisi Dana Abadi Pesantren ini belum terwujud,” kata Hidayat yang juga anggota Komisi VIII DPR.

“Pintu besar yang sudah terbuka ini agar diisi dengan benar. Dengan demikian pesantren dan madrasah mendapatkan bukti bahwa negara betul-betul berlaku adil, yaitu tidak saja mementingkan pendidikan umum, tetapi juga pendidikan pesantren. Ini semua

pesantren mendapat perhatian yang juga adil dan memberikan kebaikan bagi semuanya,” tuturnya.

Hidayat menambahkan, keberadaan lembaga pendidikan pondok pesantren modern (PPM) Baitussalam telah berkembang, baik sarana maupun prasarana, dengan peresmian gedung asrama putri tareem. “Saya bersyukur lembaga pendidikan ini diterima dengan baik oleh masyarakat, termasuk di tingkat pejabat dan pemangku kepentingan di Yogyakarta. Kolaborasi pesantren dengan bupati, DPRD, TNI-Polri menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang bisa bersatu, terutama untuk pendidikan dan kemajuan bangsa dan negara kita. Ini menandakan bahwa antara pondok pesantren, kenegaraan, kebangsaan, lembaga pendidikan, dan cagar budaya candi, adalah satu perpaduan penting untuk kita rawat dan jaga.” ujarnya. □

Briefing Setjen MPR Ma'ruf Cahyono Dorong ASN Miliki Pola Pikir Positif

SEKRETARIAT Jenderal MPR RI pada hari Jumat (5/8/2022), bertempat di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menggelar briefing internal yang dihadiri Sekretaris Jenderal MPR, Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., para pejabat eselon II, III, dan IV, serta para ASN dan pegawai di lingkungan Setjen MPR.

Mengawali arahannya, Ma'ruf Cahyono mengungkapkan bahwa kegiatan briefing seperti ini memiliki dampak positif untuk lebih mempererat hubungan dan koordinasi dalam lingkup kerja di lingkungan Setjen MPR.



turun teraktualisasi dalam nilai-nilai (values) hidup, kemudian turun lagi menjadi pola pikir atau mind set.

“Seorang ASN harus memiliki aktualisasi manajemen perubahan seperti itu. Makanya dalam setiap diklat yang dilaksanakan, selalu ditekankan soal mind set. Itu dimaksudkan untuk mendorong setiap ASN punya pola pikir tentang perubahan, sehingga akan terbangun kebiasaan-kebiasaan atau budaya kerja yang berkualitas,” terangnya.

Ada satu hal lagi, lanjut Ma'ruf Cahyono, para ASN harus mulai merenungkan kesadaran untuk bangga akan posisinya sebagai ASN.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

“Briefing seperti ini memang mesti dilaksanakan, tapi karena kita terkendala Pandemi Covid-19 yang cukup lama sehingga kegiatan ini juga sering tertunda. Saya bersyukur, pandemi mulai menurun dan briefing ini bisa berlangsung,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Ma'ruf Cahyono memaparkan tentang perlunya setiap individu memiliki harapan dan mimpi. Sebab, dua hal itu akan menumbuh suburkan semangat hidup. “Jika hal ini terjadi pada diri kita, maka setiap aktivitas dan kerja yang dilakukan akan bagus. Tidak perlu dipacu-pacu, dia akan lari sendiri dengan kencang,” tambahnya.

Harapan dan mimpi, lanjutnya, secara alamiah pasti ada dalam diri semua manusia. Namun, untuk meraih itu semua atau mewujudkan harapan serta mimpi, tidak mungkin berada di luar derap langkah perubahan. “Inilah yang dimaksud sebagai manajemen perubahan,” tegasnya.

Lebih jauh, Ma'ruf Cahyono menjabarkan, manajemen perubahan sendiri muncul berawal dari keyakinan (belief) seseorang dalam hidupnya, bisa dari agama, kepercayaan, budaya sampai kemudian

Sebab, posisi aparatur sipil negara sangat mulia yang dalam kerja-kerjanya ada bentuk pengabdian kepada rakyat, bangsa dan negara, juga ada nilai ibadahnya.

“Sebagai aparatur sipil negara, saudara-saudara sekalian dijadikan alat sebuah entitas besar yang namanya negara. Saudara bukan dijadikan alat bisnis, untuk kepentingan kelompok, atau golongan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf Cahyono mendorong semua pejabat dan pegawai, baik ASN ataupun outsourcing yang ada di lingkungan kerja Setjen MPR, untuk tetap menjaga rasa memiliki institusi Setjen MPR, bukan secara imperatif atau karena merasa ada kewajiban. Tapi, dengan cara-cara dan terjemahan yang lebih luas lagi, yakni dengan kesadaran diri.

“Hal itu sangat penting untuk dipahami dan dilaksanakan, sebab kita semua bekerja, baik itu ASN atau non ASN bekerja dalam institusi dengan visi dan misi yang sama. Melihat dari UU Tentang Manajemen PNS, kita semuanya berada dalam kerangka yang sama. Karena sangat tidak mungkin satu layanan publik bisa dilakukan dengan

tidak adanya harmoni, irama, gerak, kekuatan, langkah dan dorongan yang sama. Mari semua menjalankan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab,” tandasnya.

Terkait agenda besar kenegaraan di bulan Agustus 2022, Ma'ruf Cahyono mengingatkan bahwa MPR memiliki beberapa agenda besar kenegaraan yang telah sukses dilaksanakan. Pertama, pada tanggal 16 Agustus 2022 agenda Sidang Tahunan MPR.

Kedua, Peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2022, sebuah momen besar hari bersejarah di mana negara Indonesia pertama kali menyatakan kemerdekaannya. Dan, ketiga,

Peringatan Hari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus 2022. Semua agenda tanggal 16 dan 18 Agustus itu dihadiri oleh Presiden RI.

Di sesi akhir, Sesjen MPR menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 sekarang ini meskipun tidak setajam dulu, tapi harus tetap diwaspadai dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. “Setjen MPR sendiri juga tetap menerapkan kewaspadaan dengan melakukan berbagai tindakan preventif untuk mengantisipasi pandemi, seperti menyediakan masker, pembersih tangan dan vitamin. □

DER

Peserta Jambore Nasional XI Tahun 2022 Berkunjung ke MPR



SEKITAR 92 Pramuka penggalang putera dan puteri peserta Jambore Nasional (Jamnas) XI Tahun 2022 dari berbagai Kwartcab Gerakan Pramuka seluruh Indonesia beserta para kakak pembina dan pendamping dari Kwartir Nasional, mengunjungi Gedung MPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (19/8/2022). Kunjungan ini dalam rangka melaksanakan ‘Wisata Edukasi,’ yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan Jamnas.

Dengan berpakaian Pramuka lengkap dan berbaris rapi, mereka diterima Plt. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Biro Humas Setjen MPR RI, Budi Muliawan, SH., MH., di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen.

Di dalam ruangan bersejarah itu, Siti Fauziah yang akrab disapa Ibu Titi, melakukan dialog interaktif dengan para generasi muda bangsa tersebut. Kepada mereka, Ibu Titi menyampaikan beberapa hal tentang lembaga MPR, tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), serta kegiatan dan kewenangannya.

“MPR adalah rumah besar rakyat Indonesia. Sebagai rumah besar,

implementasi kebhinnekaan dan persatuan Indonesia sangat kental dan terasa sekali. Antara lain, seluruh Pimpinan MPR berjumlah 10 orang merepresentasikan semua elemen partai politik, yang berasal dari 9 fraksi dan 1 kelompok DPD. Sedangkan anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum,” paparnya.

Diungkapkan Ibu Titi, di rumah rakyat ini, setiap bulan Agustus rutin diselenggarakan kegiatan besar tahunan untuk bangsa Indonesia, yakni Sidang Tahunan MPR dengan agenda Pidato Kenegaraan Presiden RI dan Peringatan Hari Konstitusi dan HUT MPR RI. “Seperti tanggal 16 Agustus 2022 lalu, MPR sukses menggelar Sidang Tahunan dan tanggal 18 Agustus 2022 melaksanakan Peringatan Hari Konstitusi,” tambahnya.

Sedangkan mengenai kewenangan dan tugas-tugas konstitusionalnya, sebagai lembaga tinggi negara, Ibu Titi menyampaikan, MPR memiliki kewenangan tertinggi yakni mengubah dan menetapkan konstitusi atau Undang Undang Dasar.

Lebih lanjut Ibu Titi menjelaskan, MPR memiliki tugas besar yang sangat penting untuk rakyat Indonesia dan untuk anak muda milenials

seperti kalian. “Tugas yang dimaksud adalah Sosialisasi Empat Pilar MPR,” ujarnya.

Ibu Titi kemudian secara spontan memberikan pertanyaan mendadak terkait sosialisasi. “Siapa yang bisa menjelaskan apa itu Sosialisasi MPR itu?” Pertanyaan tersebut langsung dijawab Dennis, salah seorang Pramuka putera asal Kwarda Waringin Barat. “Empat Pilar adalah Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” jawabnya tegas. Dengan tersenyum, Ibu Titi memberi pujian kepada Dennis. “Jawaban yang sangat bagus,” ujarnya.

Cara Ibu Titi mencairkan suasana itu membuat dialog berjalan semakin lancar dan memancing antusiasme serta keingintahuan peserta. “Kita saat ini ada di ruang GBHN, siapa tahu kepanjangan GBHN,” Ibu Titi kembali melemparkan pertanyaan. Seorang Pramuka puteri dengan cepat meraih mikropon dan menjawab lugas. “Garis-Garis Besar Haluan Negara,” jawabnya.

Ibu Titi kemudian menerangkan bahwa haluan negara, seperti GBHN, saat ini menjadi wacana penting untuk bangsa di MPR RI dengan sebutan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). PPHN dirancang agar pembangunan nasional berjalan terarah, terukur, dan berkesinambungan, tentu ujungnya demi kemajuan bangsa dan sejahteranya rakyat.

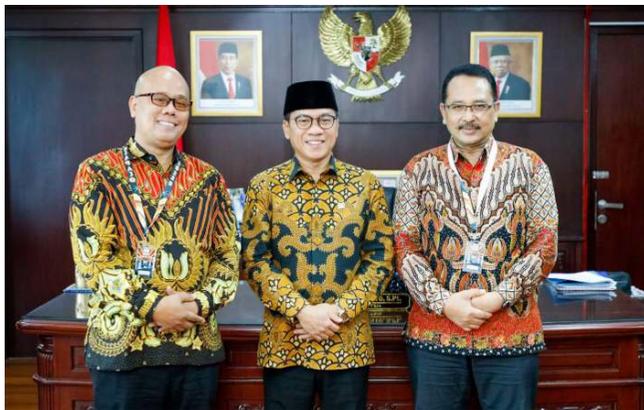
“Saat ini PPHN masih terus dikaji di MPR RI. Kajian serius yang dilakukan bertujuan agar PPHN ini bisa muncul sesuai tujuan awal dan sesuai kehendak rakyat,” tambahnya.

Di penghujung acara, Ibu Titi memberikan tantangan kepada seluruh peserta untuk membuat yel-yel semangat dengan tema MPR. Dengan waktu yang ditentukan, para peserta berhasil membuat kreasi, menciptakan yel-yel semangat tersebut dan langsung secara bergantian melakukan aksi yang mendapatkan aplaus besar dari Ibu Titi. □

DER

Kunjungan Siswa MAN 2 Kota Malang

Yandri Susanto Menjelaskan Tentang Wewenang MPR dan PPHN



SEBANYAK 337 siswa dan 16 guru dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang, Jawa Timur, pada Selasa, 9 Agustus 2022, memenuhi Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta. Kedatangan rombongan yang dipimpin oleh Kepala Sekolah MAN 2, Drs. Mohammad Husnan M, Pd., ke kompleks gedung wakil rakyat itu dalam rangka study tour. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto, SPT.

Menurut Kepala MAN 2 Kota Malang, Husnan, kehadiran delegasi MAN 2 ke MPR merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun untuk berkunjung ke berbagai perguruan tinggi ternama dan atau lembaga negara. “Kami biasa melakukan study tour ke Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta”, ujarnya. Husnan mengaku senang sekolah yang dipimpinnya bisa diterima oleh MPR. “Dalam

kesempatan ini kami mohon arahan dan motivasi”, tuturnya.

Dalam acara tatap muka itu, Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto, menjelaskan tentang fungsi, tugas, dan wewenang MPR. Menurut Yandri, tugas-tugas MPR yang tetap ada, baik sebelum maupun setelah amandemen UUD Tahun 1945 adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden. “Ini tugas mulia dan paling pokok”, tuturnya. Selain itu, MPR juga punya wewenang mengubah dan menetapkan UUD.

Lebih lanjut, Yandri menjelaskan, sebelum amandemen UUD, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Sebagai lembaga tertinggi negara, MPR memiliki wewenang memilih Presiden dan Wakil Presiden, selain membuat dan menetapkan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara).

Pada era reformasi, MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta tidak lagi membuat dan menetapkan GBHN. Dalam



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

era reformasi arah pembangunan ditentukan oleh visi dan misi Presiden,, Gubernur, Bupati, dan Walikota, bukan dengan GBHN

seperti pada masa Orde Baru. Hal demikian menimbulkan adanya ketidaksinambungan pembangunan. Berangkat dari masalah ini, MPR di era kepemimpinan Taufik Kiemas dan Zulkifli Hasan memikirkan kembali pedoman pembangunan negara.



Aspirasi ini selanjutnya menjelma dalam bentuk PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara). “PPHN ini modelnya seperti GBHN,” ujar Yandri Susanto. Pimpinan MPR, kata Yandri, telah menerima hasil kajian dari Badan Pengkajian MPR tentang PPHN. Saat ini, PPHN, dalam proses pembahasan apakah akan dimasukkan dalam UUD lewat amandemen atau lewat Ketetapan MPR. “Ada pula yang menyebut cukup dengan undang-undang, atau konvensi ketatanegaraan,” ungkapnya. .

Rencananya masalah PPHN akan dibawa ke Sidang MPR yang akan digelar pada September 2022. Di forum tersebut landasan hukum PPHN akan ditetapkan. □



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dr. Ir. Sodik Mudjahid, MSc, Anggota MPR Fraksi Partai Gerindra

Penyusunan RUU Sisdiknas Harus Cermat

RANCANGAN Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) kembali mengundang polemik di masyarakat. Setelah beberapa waktu sebelumnya RUU Sisdiknas dikritisi karena hilangnya “madrasah” dalam batang tubuh RUU, kini RUU Sisdiknas kembali dikritisi karena hilangnya klausul tentang “tunjangan profesi guru” dalam RUU tersebut.

Hal itu diketahui dari hilangnya sejumlah ayat dalam Pasal 127 terkait tunjangan profesi guru dalam RUU Sisdiknas versi draf Agustus 2022. Padahal dalam draf RUU Sisdiknas versi April 2022 yang beredar luas tertera dengan jelas tentang pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Klausul ini masuk dalam Pasal 127 ayat 3 sampai 10 RUU Sisdiknas versi April 2022.

Namun, dalam draf RUU Sisdiknas versi Agustus 2022 yang diunggah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Pasal 127 ayat 3 sampai 10 yang mengatur pemberian tunjangan profesi guru, khususnya tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil, dan tunjangan kehormatan dosen justru raib.

Perlu diketahui, RUU Sisdiknas ini akan

menyatukan tiga undang-undang, yakni UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pemerintah telah mengusulkan RUU Sisdiknas masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan Tahun 2023 kepada DPR dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Badan Legislasi pada Rabu, 24 Agustus 2022.

Terkait dengan polemik hilangnya klausul tunjangan profesi guru dalam RUU Sisdiknas, Majelis mewawancarai anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc. Berikut wawancara dengan Sodik Mudjahid yang juga anggota Komisi X DPR dan anggota Badan Legislasi DPR. Petikannya.

RUU Sisdiknas kembali mengundang polemik di masyarakat, terutama di kalangan komunitas guru, terkait dengan hilangnya tunjangan profesi guru dalam RUU tersebut. Sebenarnya bagaimana duduk persoalannya?

Dari polemik terkait tunjangan profesi guru ini, menurut kami, pemerintah harus menegaskan lebih dulu bahwa guru adalah profesi. Kalau pemerintah menegaskan guru

sebagai profesi, maka ada dua implikasinya, yaitu tunjangan profesi guru dan sertifikasi guru. Maka, aneh apabila pemerintah yang menetapkan guru sebagai profesi, tetapi justru menghilangkan tunjangan profesi guru. Saya kira tidak seperti itu.

Tapi, apakah memang benar klausul tentang tunjangan profesi guru hilang dalam RUU Sisdiknas?

Kalau kami cermati, tunjangan profesi guru yang dihilangkan itu adalah tunjangan guru bagi mereka yang belum sertifikasi. Jadi, guru yang belum mendapatkan sertifikasi tidak lagi mendapat tunjangan. Itu yang kami tangkap dari hilangnya tunjangan profesi guru dalam RUU Sisdiknas. Tapi, menurut kami, hal itu juga aneh. Banyak guru yang belum mendapatkan sertifikasi tapi tunjangan profesi guru malah dicabut. Ini juga aneh.

Karena itu, langkah yang seharusnya dilakukan adalah bukan mencabut tunjangan profesi guru bagi guru yang belum mendapat sertifikasi, melainkan mempercepat proses sertifikasi bagi guru yang belum mendapat sertifikasi. Pemerintah harus memasifkan proses sertifikasi guru. Ketika pemerintah menetapkan guru sebagai profesi, dan seharusnya memang seperti itu, maka harus ada sertifikasi melalui proses pendidikan

guru, dan ada tunjangan guru.

Lalu, pemerintah mau mencabut tunjangan profesi guru yang belum mendapat sertifikasi, tentu akan menimbulkan masalah. Padahal mereka sudah menjadi guru, dan sudah bekerja. Seharusnya tunjangan profesi untuk guru yang belum mendapat sertifikasi jangan dicabut, tetapi dipercepat dan memfasilitasi proses sertifikasi guru.

Kalau misalnya sekarang (berdasarkan draf RUU Sisdiknas) tunjangan profesi guru hilang dalam RUU Sisdiknas, apakah klausul tentang tunjangan profesi guru perlu dikembalikan atau dicantumkan secara eksplisit dalam RUU Sisdiknas?

Iya, harus masuk dalam batang tubuh RUU Sisdiknas, karena RUU ini adalah UU lex specialis ASN. Dalam batang tubuh RUU Sisdiknas itu harus ada penegasan guru sebagai profesi, maka dengan demikian ada jaminan juga terhadap dua hal tadi, yaitu tunjangan profesi guru dan sertifikasi guru melalui proses pendidikan guru. Jadi, justru klausul itu harus masuk dalam batang tubuh RUU Sisdiknas.

Sekarang ini adalah masa transisi. Karena itu, pada masa transisi ini, pemerintah perlu mempercepat dan memfasilitasi sertifikasi guru. Dalam hal ini, pemerintah agak lambat. Seharusnya pada tahun 2017, proses sertifikasi melalui pendidikan guru harus sudah selesai. Sekarang, proses sertifikasinya lambat karena kelemahan pemerintah, sementara tunjangannya justru akan dicabut. Ini menjadi masalah.

Jadi program sertifikasi guru itu meleset dari target seperti diamanatkan UU. Seharusnya pada 2017, program sertifikasi guru melalui proses pendidikan guru itu sudah selesai.

(Berdasarkan data dari Kemendikbud-ristek 2022 setidaknya ada 1,6 juta guru yang belum lulus sertifikasi. Jumlah guru yang terdaftar dari Data Pokok Pendidikan di semester ganjil 2022/2023 total guru mencapai 4.095.896 orang).

Soal RUU Sisdiknas ini sering mengundang polemik. Sebelumnya polemik terjadi karena hilangnya frasa “madrasah”, dan sekarang polemik karena hilangnya klausul tunjangan profesi guru. Sebenarnya bagaimana penyusunan RUU Sisdiknas ini?



Pertama, UU Sisdiknas memang sangat diperlukan. Soal content (isi), kita harus mendengarkan secara maksimal dari semua stakeholder pendidikan. UU ini harus menampung aspirasi dari semua stakeholder pendidikan. Kedua, pembahasannya harus cermat, hati-hati, jangan grasa-grusu, ojo kesusu. Jangan seperti penyusunan UU yang sangat cepat. Kita tidak boleh seperti itu, karena RUU Sisdiknas adalah UU pilar bangsa.

Saya di Badan Legislasi (Baleg) DPR, sampai saat ini belum ada naskah RUU Sisdiknas yang diserahkan pemerintah secara resmi ke DPR. RUU Sisdiknas yang beredar di masyarakat, entah dari mana. Mungkin naskah yang lama, UU Omnibus Law yang beredar di luar. Jadi, sampai sekarang



belum ada draf RUU Sisdiknas di Badan Legislasi DPR. Saya tanya ke Tenaga Ahli Badan Legislasi, sampai sekarang belum ada naskah akademik dan draf RUU Sisdiknas.

Di satu pihak pemerintah ingin Prolegnas, tetapi naskah akademik dan draf RUU Sisdiknas belum diserahkan ke DPR. Di sisi lain kita melihat pemerintah harus cermat membuat RUU, keterlambatan ini bisa dilihat sebagai upaya kehati-hatian pemerintah dan menampung secara maksimum semua stakeholder pendidikan.

Ada kalangan yang berpendapat penyusunan RUU Sisdiknas ini tertutup dan diam-diam serta tidak melibatkan stakeholder pendidikan?

Kami sudah secara langsung menyampaikan kritik terkait penyusunan RUU Sisdiknas ini. Ketua Komisi X dan anggota Komisi X pernah menyampaikan langsung ke Mendikbud. Dan, Mendikbud mengatakan sudah membuka masukan dan aspirasi secara online. Tapi itu belum cukup dengan online. Kemendikbud harus membuka semaksimal mungkin aspirasi dari stakeholder pendidikan. Misalnya, melakukan pertemuan fisik, seperti kami di Komisi X, menampung aspirasi dari masyarakat dan komunitas pendidikan.

Kalau draf RUU Sisdiknas belum masuk ke Badan Legislasi, artinya RUU Sisdiknas belum bisa disahkan pada tahun ini?

Prolegnas baru diusulkan pemerintah ke Badan Legislasi DPR. Itu belum disahkan dalam rapat paripurna. RUU Sisdiknas sendiri belum masuk ke Badan Legislasi. Jadi, masyarakat tidak perlu gelisah karena memang draf RUU Sisdiknas belum ada, tapi pemerintah harus cermat dan hati-hati dalam penyusunan RUU Sisdiknas dengan melibatkan seluruh stakeholder pendidikan.

Sikap Komisi X DPR masih menunggu draf RUU Sisdiknas?

Badan Legislasi dan Komisi X DPR menunggu draf dari pemerintah. Nanti RUU Sisdiknas masuk dulu ke Baleg DPR, kemudian dibawa untuk disahkan dalam rapat paripurna. Badan Musyawarah akan menetapkan apakah dibahas di Pansus, Komisi X, atau Baleg. Jadi, perjalanan masih sangat panjang, baik prosedur maupun content. Tapi ini menunjukkan betapa masyarakat peduli dengan RUU Sisdiknas □

Diskusi Refleksi 76 Tahun MPR

MPR Harus Mencererminkan **Kehendak** Rakyat



Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid, menegaskan, MPR adalah pengawal kedaulatan rakyat sehingga apa-apa yang diputuskan oleh lembaga negara ini harus mencerminkan kehendak rakyat

UNTUK memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 MPR, Koordinator Wartawan Parlemen bersama dengan Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR menggelar diskusi 'Empat Pilar MPR'. Kegiatan yang digelar di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 30 Agustus 2021, itu mengambil tema 'Refleksi 76 Tahun MPR Sebagai Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat'.

Menjadi pembicara dalam diskusi yang diikuti oleh puluhan wartawan itu adalah Wakil Ketua MPR Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA.; Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat, Drs H. Anwar Hafid, MSi.; dan Pakar Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Dr. Ujang Komarudin MSi.

"Kita bersyukur MPR saat ini sudah berusia 76 tahun", ujar Jazilul Fawaid di awal diskusi. Dilihat dari usia, MPR sudah memiliki riwayat yang panjang sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat. Tujuan MPR, sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), juga seperti tertera dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam usia yang ke-76 tahun, menurut pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu bangsa ini dihadapkan pada suatu fakta bahwa seluruh umat di dunia menghadapi pandemi Covid-19. "Ini baru kita alami selama MPR ada", ungkap pria yang akrab disapa Gus Jazil itu. Dalam perjalanannya, lembaga negara ini mengalami pasang surut. MPR pernah menjadi lembaga tertinggi. Sebagai lembaga tertinggi, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan ditetapkan oleh MPR. Kewenangan tertinggi MPR yang lain adalah menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), serta melakukan amandemen UUD.

Ketika UUD Tahun 1945 diamandemen, terjadi perubahan pada posisi MPR. "MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi," ujar mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu. Meski demikian, MPR masih memiliki kewenangan tertinggi, yakni melakukan amandemen UUD. "Kewenangan ini hanya dimiliki oleh MPR", ungkapnya.

MPR Periode 2019-2024, menurut Gus Jazil, mandat rekomendasi dari MPR periode sebelumnya untuk melakukan amandemen terkait menghidupkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu pada saat diskusi juga menyinggung masalah, bila Covid-19 belum usai di 2024, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Meski demikian, ia menegaskan agar pandemi yang saat ini masih terasa bisa segera pulih. “Kami tetap taat pada konstitusi”, tegasnya.

Bagi Gus Jazil, MPR adalah pengawal kedaulatan rakyat sehingga apa-apa yang diputuskan oleh lembaga negara ini harus mencerminkan kehendak rakyat. “Bila antara MPR dan rakyat tidak nyambung maka akan menjadi masalah”, tuturnya. Baginya, rakyat adalah pemegang kedaulatan. “Check and balances ada di tangan rakyat”, ujarnya. Di usia 76 tahun, di tengah masa pandemi, menurut Jazilul Fawaid, MPR harus terus menguatkan diri sebagai pengawal kedaulatan

rakyat agar tidak terjadi otorianisme.

Dalam kesempatan yang sama, Anwar Hafid mengatakan, semua pernah belajar tentang sejarah bagaimana MPR lahir. Pada masa Orde Baru, lembaga-lembaga negara mengaktualisasikan sebagai lembaga yang dibentuk. MPR pada masa itu merupakan lembaga yang tidak hanya tertinggi, namun juga kuat. “Sebagai cerminan kedaulatan rakyat”, ujarnya. MPR pada masa itu bisa mengangkat ,Presiden dan Wakil Presiden. “Juga menetapkan GBHN”, ungkapny.

Pada masa reformasi terjadi perubahan pada MPR. Kewenangan MPR tidak lagi memilih dan atau mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, sebab mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan lewat Pemilu.

Meski demikian, menurut Anwar Hafid,

MPR masih memiliki kewenangan tertinggi, yakni bisa mengubah atau mengamendemen UUD. Lebih lanjut, katanya, saat ini MPR diberi tugas untuk melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau Empat Pilar MPR.

Di usia ke-76 tahun, Anwar Hafid berharap, lembaga ini memperkokoh diri sebagai penjaga kedaulatan rakyat. “Kita berharap, sebagai Rumah Kebangsaan, MPR menempatkan kesejahteraan rakyat di atas segala kepentingan kelompok dan golongan.

Ujang Komarudin dalam kesempatan itu, menyebut MPR memiliki kewenangan untuk mengubah atau melakukan amandemen UUD. Namun, dia mengingatkan, agar hati-hati dalam melakukan amandemen. “Kalau melebar ke mana-mana, itu berbahaya”, tegasnya. □



Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.

Wakil Ketua MPR RI Periode 2019-2024

Refleksi 76 Tahun MPR RI Pengawal Pancasila dan Daulat Rakyat

AGUSTUS merupakan bulan yang istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain memperingati hari proklamasi kemerdekaan dan konstitusi, bangsa Indonesia juga memperingati hari kelahiran MPR RI sebagai lembaga negara yang memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat. Di era krisis saat ini, tentu saja peringatan hari jadi MPR RI ini bermakna sangat mendalam. Di usianya yang ke-76 tahun, MPR RI diharapkan dapat tetap berdiri tegak dalam mengawal Pancasila sebagai ideologi bangsa dan mengarusutamakan kepentingan rakyat dalam menjalankan setiap tugas pokok dan fungsinya.

Genealogi MPR RI secara eksplisit termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945. Pada bagian pembukaan konstitusi disebutkan bahwa susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berbasis pada kedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya berpijak pada prinsip permusyawaratan atau perwakilan. Untuk merealisasikan hal tersebut, dibentuklah MPR RI sebagai lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan dalam rangka menegakkan nilai demokrasi, keadilan sosial, serta kesejahteraan rakyat.

Daulat rakyat

Penyebutan MPR RI sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat tidak terlepas dari hal yang melekat atau inheren pada MPR RI sendiri yang terdiri atas para wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, baik yang berstatus sebagai anggota DPR RI maupun dari unsur DPD RI. Pada masa lalu, MPR RI menyandang status sebagai lembaga tertinggi negara. Namun demikian, amandemen konstitusi ketiga pada 2001 mengubah kedudukan MPR RI menjadi setara dengan lembaga

negara lainnya, seperti DPR RI, DPD RI, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY.

Sebagai lembaga negara, MPR RI memikul tugas dan tanggung jawab yang besar. Eksistensi MPR RI diharapkan dapat menjadi rumah kebangsaan yang solid, yang mampu menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, dan aspirasi rakyat, dengan mengedepankan etika politik kebangsaan. Keberadaan MPR RI diharapkan dapat mengawal ideologi negara sebagai suluh bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasionalnya. MPR RI juga diharapkan dapat senantiasa berdiri di samping rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang sah atas Republik Indonesia.

Modal Organisasional

Merujuk pada berbagai pengalaman empirik kelembagaan, MPR RI memiliki modal dan kapasitas yang kuat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut. Gelombang reformasi yang melanda pada 1998 yang menginginkan perubahan praktik politik dan pemerintahan yang mengedepankan daulat rakyat, mampu diaktualisasikan secara nyata oleh MPR RI dengan melaksanakan amandemen UUD NRI Tahun 1945 secara gradual dan komprehensif sejak 1999 hingga 2002. Amandemen sebanyak empat kali tersebut bermakna dua hal, yakni kapasitas organisasional MPR RI yang kuat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengubah dan menetapkan konstitusi, serta komitmen MPR RI untuk selalu konsisten mewujudkan aspirasi rakyat.

Problematika kebangsaan Indonesia hari ini bersifat kompleks dan multidimensi. Persoalan kebangsaan hadir di setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara, baik aspek statis maupun aspek dinamis. Pandemi Covid-19 yang membekap Indonesia selama kurang lebih satu setengah tahun terakhir seakan

menambah derajat kompleksitas yang ada. Kita tidak bisa menutup mata dan telinga bahwa masyarakat Indonesia hari ini masih mengalami kesulitan di bidang ekonomi dan sosial, yang sebagian besar merupakan implikasi negatif dari pandemi Covid-19. Namun demikian, persoalan-persoalan yang ada tersebut seyogyanya tidak membuat kita lemas terkulai. Dalam konteks MPR RI, problematika kebangsaan yang ada hari ini merupakan trigger untuk semakin menegaskan eksistensi dan kontribusinya bagi rakyat.

MPR RI memiliki piranti lunak dan piranti keras untuk menjawab seluruh tantangan kebangsaan yang ada. Piranti lunak yang dimaksudkan di sini adalah komitmen dan tanggung jawab organisasional MPR RI untuk menyosialisasikan empat pilar, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, kepada seluruh rakyat Indonesia agar dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi dalam situasi krisis seperti hari ini. Sedangkan piranti keras yang dimiliki oleh MPR RI adalah kapabilitas organisasional dan individual MPR RI yang tersusun atas wakil rakyat yang merepresentasikan setiap wilayah dan keberagaman masyarakat Indonesia. Mereka diharapkan dapat memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan pengawasan dan politik legislasi yang benar-benar berorientasi bagi kepentingan rakyat.

Sosialisasi Empat Pilar

Di tengah segala keterbatasan yang ada, sebagai imbas adanya pandemi Covid-19, MPR RI tetap konsisten menjalankan sosialisasi Empat Pilar. Limitasi yang muncul karena adanya pandemi Covid-19 menjadi pemicu bagi MPR RI untuk berfikir dan bertindak secara cermat dan kreatif dengan menyelenggarakan sosialisasi Empat Pilar, baik secara luring maupun secara daring. Diseminasi Empat Pilar melalui skema daring misalnya, suka tidak suka melecut organisasional MPR RI untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Keterbatasan karena adanya kebijakan pembatasan mobilisasi masyarakat ataupun keterbatasan yang muncul karena hambatan geografis, tidak menjadi penghalang bagi proses diseminasi Empat Pilar di manapun masyarakat Indonesia berada.

Sosialisasi Empat Pilar di era pandemi Covid-19 bermakna sangat

penting. Tidak dimungkiri bahwa pandemi ini telah mengguncang ketahanan nasional Indonesia, terutama dari sisi ekonomi dan sosial budaya. Masyarakat mengalami kesulitan finansial. Masyarakat juga mengalami “gegar budaya” karena harus beradaptasi dengan cara-cara baru agar survive di masa pandemi. Untuk mengatasi guncangan skala besar ini, diperlukan pedoman dan pijakan yang menyentuh segala lini agar bangsa Indonesia tetap memiliki daya lenting (resilience) dan bangkit dari krisis. Pedoman tersebut ada pada Empat Pilar kebangsaan. Di sinilah urgensi peran yang dimiliki oleh MPR RI. MPR RI dituntut untuk mendiseminasikan nilai-nilai yang terkandung pada empat pilar tidak secara normatif atau konseptual, tapi lebih kontekstual dan empirik dengan menyajikan solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.

Solusi Nyata

Solusi konkret yang dimaksud di situ dapat diaksentuasikan dengan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menengok kembali praktik-praktik perekonomian Pancasila yang mungkin belum diterapkan secara konsisten selama ini. Menengok kembali prinsip musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, merupakan langkah bijak bagi para pemangku kebijakan saat ini agar lebih solid dalam merespons situasi dan dampak pandemi. Sekali lagi, ini menuntut kejelian dan kecerdasan dari para pengawak MPR RI untuk menyajikan solusi konkret dan empirik atas problematika masyarakat hari ini. Dengan demikian, peran dan kontribusi MPR RI akan benar-benar nyata dan dirasakan.

Hal-hal yang sifatnya global dan jangka panjang merupakan skop yang juga menjadi pencermatan bagi MPR RI. MPR RI yang juga memainkan peran diplomasi antarnegara melalui diplomasi parlemen juga senantiasa berkomitmen untuk menjalankan politik luar negeri dan praktik diplomasi yang selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Di tengah turbulensi kepentingan antarnegara yang diwarnai oleh konflik dan ketegangan dewasa ini, MPR RI senantiasa berkomitmen untuk menjalankan diplomasi parlemen yang selalu berorientasi pada perdamaian (perpetual peace) dan ketertiban dunia.

Dirgayahu MPR RI yang ke-76, berjuang untuk mengawal ideologi dan daulat rakyat. □

Hasil Kajian PPHN

Diharapkan Selesai Awal 2022

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan, Badan Pengkajian MPR RI yang terdiri dari para anggota DPR RI lintas fraksi dan kelompok DPD bersama sejumlah pihak terkait terus menyusun hasil kajian PPHN dan naskah akademiknya.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, saat ini Badan Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI serta melibatkan pakar/akademisi dari berbagai disiplin ilmu dan perguruan tinggi, Lembaga Negara dan Kementerian Negara, sedang menyelesaikan kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagaimana rekomendasi MPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019. Diharapkan kajian PPHN berikut naskah akademiknya akan selesai awal tahun 2022.

“Badan Pengkajian MPR RI yang terdiri dari para anggota DPR RI lintas fraksi dan kelompok DPD bersama sejumlah pihak terkait terus menyusun hasil kajian PPHN dan naskah akademiknya. Jadi, keliru jika ada yang mengatakan PPHN tidak pernah dibahas di Parlemen,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (20/8/21).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan pentingnya menghadirkan PPHN sebagai bintang arah pembangunan nasional itu, tidak muncul begitu saja. Tetapi, sudah menjadi rekomendasi MPR RI periode 2009-2014 dan MPR RI periode 2014-2019. Rekomendasi mengusulkan amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 agar MPR memiliki kewenangan menetapkan pedoman pembangunan nasional ‘model GBHN’, yang disebut PPHN.

“MPR RI periode saat ini hanya melaksanakan rekomendasi dari MPR RI periode sebelumnya. Perlunya kehadiran PPHN ini juga telah mendapat dukungan dari Forum Rektor Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN), serta sejumlah kampus di Indonesia,” kata Bamsoet.

Anggota Dewan Pakar KAHMI ini memaparkan, bentuk hukum yang ideal bagi PPHN adalah melalui Ketetapan MPR. Bukan melalui undang-undang yang masih dapat



diajukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Juga bukan diatur langsung dalam konstitusi. Karena PPHN adalah produk kebijakan yang berlaku periodik, dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat, serta bersifat direktif, maka materi PPHN tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat saja dalam konstitusi.

“Pemilihan Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN mempunyai konsekuensi perlunya perubahan dalam konstitusi atau amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945. Sekurang-kurangnya berkaitan dengan dua pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Antara lain penambahan 1 ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN, serta penambahan ayat pada Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini

menambahkan, setelah kajian PPHN selesai, pimpinan MPR RI akan menjalin komunikasi politik dengan para pimpinan partai politik, kelompok DPD dan para stake holder lainnya. Tujuannya, untuk membangun kesepahaman kebangsaan tentang pentingnya Indonesia memiliki PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang.

“Apabila semua pimpinan partai politik sudah sepaham serta sepakat dan menugaskan anggotanya untuk mengajukan dukungan tanda tangan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, barulah pimpinan MPR RI akan mengurus teknis administrasi pengajuan usul amandemen UUD NRI Tahun 1945 sesuai Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, yang hanya fokus pada penambahan dua pasal. Sehingga, amandemen terbatas tidak akan mengarah kepada hal lain di luar PPHN,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menegaskan, proses amandemen UUD NRI Tahun 1945 sudah diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat 1-3 UUD NRI Tahun 1945. Ayat 1 menjelaskan, bahwa usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, yakni sekitar 237 dari 711 jumlah anggota MPR.

“Di ayat 2 Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan pula bahwa setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Disetujui tidaknya amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk menghadirkan PPHN sangat tergantung dinamika politik yang berkembang serta keputusan partai politik dan kelompok DPD. Perjalanan masih panjang. Jadi, tidak usah marah-marah apalagi sampai kebakaran jenggot. Karena MPR saat ini hanya melaksanakan tugas konstitusional yang menjadi rekomendasi MPR periode sebelumnya,” pungkas Bamsoet. □

Ahmad Basarah

Rencana Pemindahan Ibu Kota Harus Dipagari PPHN

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, menegaskan, jangkar pembangunan Indonesia modern sudah seharusnya dikembalikan kepada cita-cita luhur pendiri bangsa yang menghendaki pembangunan nasional didasarkan atas pola Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana (PNSB) atau Garis-garis besar daripada haluan negara.

RENCANA Presiden Joko Widodo yang akan menyerahkan surat presiden (surpres) terkait RUU Ibu Kota Negara (ibu kota baru) kepada DPR RI direspon positif oleh Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah. Dia berharap, gagasan besar ini mendapat dukungan partai-partai politik dan semua elemen masyarakat demi kebaikan bangsa.

Menurut Ahmad Basarah, gagasan besar Presiden Jokowi ini harus dijadikan contoh praktis betapa untuk memastikan kesinambungan rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru itu, bangsa kita sangat membutuhkan payung hukum yang lebih kokoh untuk hadirnya ketentuan Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN.

“Tanpa PPHN, siapa yang akan menjamin presiden terpilih tahun 2024 nanti benar-benar akan melaksanakan dan melanjutkan rencana pemindahan ibu kota negara ini mengingat UUD NRI Tahun 1945 dan UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tidak memberi sanksi apapun kepada presiden berikutnya atas tidak dilanjutkannya sebuah program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh presiden sebelumnya?” jelas Ahmad Basarah saat dihubungi, Ahad (29/08/2021).

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, dukungan partai-partai dan seluruh masyarakat atas rencana pemindahan ibu kota negara itu idealnya diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap rencana MPR RI melakukan amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk mengakomodasi PPHN.

Amandemen terbatas ini, kata Ahmad Basarah, hanya ingin memasukkan satu ayat pada pasal 3 yang intinya memberi kewenangan kepada MPR RI untuk mengubah dan menetapkan PPHN atau GBHN, serta menambah ayat pada Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR RI untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh presiden bila tidak bertentangan dengan PPHN.

“Karena itu, saya sangat berharap, niat



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MPR RI melakukan amendemen terbatas ini tidak dicurigai punya motif apa pun, apalagi dicurigai ingin mengubah konstitusi agar presiden bisa menjabat tiga periode. Tidak sama sekali. Presiden boleh berganti, tapi rencana pembangunan jangka panjang nasional harus terus berkesinambungan dan dipagari oleh konstitusi,” tegas Ahmad Basarah.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menyampaikan pandangan dan harapannya tersebut pada forum Stadium General Kongres II Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA-KAMMI) di Jakarta, Sabtu (28/8/2021).

Ahmad Basarah menegaskan, jangkar pembangunan Indonesia modern sudah seharusnya dikembalikan kepada cita-cita luhur pendiri bangsa yang menghendaki pembangunan nasional didasarkan atas pola Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana (PNSB) atau Garis-garis besar daripada haluan negara.

“Bung Karno di era Orde Dasar dulu pernah melaksanakan PNSB dan GBHN. Kemudian pada era Orde Baru, Pak Harto melanjutkannya dengan terminologi Garis-

garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tapi pasca Reformasi, MPR melucuti sendiri kewenangannya untuk membuat dan menetapkan konsep pembangunan jangka panjang nasional ini. Maka sekarang saatnya kita kembali pada PPHN,” tandas Doktor Ilmu Hukum Lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu.

Jika negeri ini memiliki PPHN, lanjut Ahmad Basarah, seluruh rakyat Indonesia lewat wakil-wakil mereka akan leluasa memastikan presiden terpilih untuk melaksanakan road map dan blue print pembangunan nasional melalui PPHN. Melalui PPHN itulah presiden terpilih menjabarkan program pembangunan lima tahunnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 5 Tahun yang telah disusun dan dijabarkan langsung sejak pembentukan visi, misi dan program calon presiden yang akan ikut kontestasi pemilu presiden.

Dengan demikian, pembangunan nasional tak akan jalan di tempat akibat ganti presiden ganti program dan kebijakan.

Sebagai contoh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah membuat Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan

Infrastruktur Selat Sunda, namun proyek tersebut dibatalkan dan badan ini dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Ada 17 lembaga lain yang dibubarkan berdasarkan perpres 82/2020 tentang komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Mengapa Presiden Jokowi bisa meng-

hentikan apa yang sudah direncanakan dan dilaksanakan presiden sebelumnya, itu karena UU SPPN tidak mengatur hal itu apalagi memberi sanksi. Kita tak ingin presiden terpilih di tahun 2024 melakukan tindakan yang sama, jika tak ada PPHN. Rakyat akan merugi karena triliunan anggaran untuk program pembangunan Ibu

Kota Baru di Kalimantan Timur itu bisa saja mangkrak seperti rencana pembangunan infrastruktur Selat Sunda maupun pembangunan Wisma Atlet di Bogor. Arah pembangunan nasional kita akan seperti tari pocco-poco, maju selangkah mundur dua langkah, dan seterusnya” tutup Ahmad Basarah. □

Penyelenggaraan PTM

Keselamatan Peserta Didik dan Guru Diutamakan

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat meminta dalam mempersiapkan pembukaan kembali pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah mengutamakan keselamatan peserta didik dan guru.

DI SEJUMLAH daerah kasus positif Covid-19 memperlihatkan tren menurun. Saat ini, sejumlah daerah sudah merencanakan pembukaan kembali sekolah untuk pembelajaran tatap muka (PTM) dalam beberapa bulan mendatang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan sudah bersiap untuk menggelar PTM secara terbatas pada 30 Agustus 2021.

“Upaya pembukaan kembali PTM di sekolah hendaknya mengutamakan keselamatan guru dan peserta didik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/8/2021).

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi (Kemdikbudristek) per Mei 2021 mencatat jumlah sekolah yang terdampak pandemi Covid-19 di Indonesia sebanyak 407.000 sekolah, 3,4 juta guru, serta 56 juta siswa.

Menurut Lestari, perubahan proses belajar mengajar dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi ini memang berdampak bagi peserta didik mengalami learning loss. Learning loss, tambahnya, dimaknai sebagai situasi di mana peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan, baik umum atau khusus serta kemunduran secara akademis, karena kesenjangan yang berkepanjangan atau tidak berlangsungnya proses pendidikan.

Untuk menghindari kondisi itu berlanjut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, berbagai upaya harus dilakukan agar peserta didik dan guru tetap mampu menjalankan proses belajar mengajar dengan hasil sesuai target



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

yang ditetapkan dalam kurikulum yang berlaku.

Pengalaman dalam pelaksanaan PJJ selama lebih dari satu setengah tahun di masa pandemi, menurut Rerie, bisa dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan pola-pola terbaik dalam mewujudkan proses belajar-mengajar yang tepat.

Kehati-hatian dalam melaksanakan PTM, lewat pelaksanaan secara terbatas terlebih dahulu, tambahnya, merupakan langkah yang bijak sebelum ditemukan tata kelola pembelajaran yang tepat di masa transisi ini.

Luasnya wilayah Indonesia dengan keragaman kondisi geografis yang ada,

menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus memberikan pilihan bagi setiap pemangku kepentingan di daerah untuk menerapkan pola-pola pembelajaran yang tepat dan aman bagi para peserta didik dan guru, sesuai dengan tantangan di daerah tersebut.

Pemetaan jenis pola yang akan diterapkan dalam proses belajar-mengajar di setiap daerah, tegas Rerie, harus segera dilakukan agar kebutuhan sarana dan prasarana pendukungnya bisa segera direalisasikan.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap, para pemangku kepentingan di daerah dapat menerapkan pola belajar-mengajar yang tepat dan aman bagi peserta didik dan guru, di tengah upaya pengendalian Covid-19 yang menunjukkan hasil yang semakin baik.

Terpenting, jelasnya, keselamatan peserta didik dan pengajar adalah yang utama dalam menentukan pola belajar mengajar yang tepat.

Di masa pandemi Covid-19 ini, ujar Rerie, tentu saja penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi Covid-19 merupakan syarat penting dalam setiap penyelenggaraan aktivitas yang melibatkan banyak orang, termasuk PTM.

Di sisi lain, tambah Rerie, kreativitas para pengajar dan pemangku kepentingan harus ditingkatkan agar mampu membuat bahan ajar yang menarik bagi peserta didik, sehingga mampu meningkatkan minat belajar, meski terjadi sejumlah penyesuaian dalam pola pengajaran saat ini. □

Studium General Unpad

Pemanfaatan Teknologi dalam Dunia Pendidikan Sebuah Keniscayaan

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengingatkan, keterlambatan dalam bertransformasi digital akan membuat bangsa ini terdisrupsi. Karenanya, sektor hukum harus merespon revolusi digital ini dengan prinsip adaptasi dan legislasi responsif

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, yang juga mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) mendukung kerjasama pendidikan tinggi antara MPR RI dan Unpad sebagai manifestasi program multipihak atau pentahelix perguruan tinggi dalam bergotong royong membangun negeri. Khususnya, dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 serta menyongsong Society 5.0. UNPAD merupakan perintis lahirnya Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual, yang diprakarsai salah satunya oleh Prof. Ahmad Ramli.

Prof. Ahmad Ramli telah berkiprah belasan tahun dalam pemerintahan dan dipercaya menjadi Ketua Tim Pemerintah dalam pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) bersama DPR RI. Antara lain, RUU Hak Cipta, RUU Merek, RUU Paten, RUU Keterbukaan Informasi Publik, RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana semuanya telah berhasil diundangkan.

“Dalam Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual UNPAD, terdapat Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital yang menjadi pionir pengembangan ilmu cyber law sebagai salah satu ilmu futuristik dalam bidang hukum. Menghasilkan sumber daya manusia yang tidak saja berkualitas, melainkan juga berdaya saing, serta mampu beradaptasi dan mempunyai literasi teknologi,” ujar Bamsoet dalam ‘Studium General dan Webinar Cerdas Bertelekomunikasi dalam rangka Dies Natalis ke-64 Unpad dan Fakultas Hukum Unpad’, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Senin (30/8/21).

Turut hadir jajaran rektorat Unpad, antara lain Rektor Rina Indistuti, Dekan Fakultas Hukum Idris, Kepala Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital Fakultas Hukum Tasya Safiranita. Hadir pula jajaran Ke-



menterian Komunikasi dan Informatika, antara lain Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, serta Direktur Pengembangan Pitalebar Marvels P. Situmorang.

Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan, telekomunikasi telah menjadi oksigen baru untuk kehidupan. Kemajuannya tumbuh seiring sejalan dengan tingkat penetrasi internet yang semakin meningkat. Menurut Internet World-Stats, per akhir Maret 2021, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 76,8%, dengan jumlah pengguna internet mencapai 212,35 juta user. Sebagai pembandingan, We Are Social dan Hootsuite tahun 2000 mencatat tingkat penetrasi internet melalui smartphone di Indonesia sudah mencapai 96%.

“Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan sebuah keniscayaan. Keter-

lambatan dalam bertransformasi digital akan membuat bangsa ini terdisrupsi. Karenanya, sektor hukum harus merespon revolusi digital ini dengan prinsip adaptasi dan legislasi responsif, tetapi tetap berkualitas. Bahkan hukum harus dapat menjadi pionir yang mampu menganalisis dan mengatur berbagai hal, termasuk perkembangan teknologi yang pesat, selaras dengan konsepsi dan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial dan ekonomi,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia menjelaskan, seiring pesatnya laju digitalisasi, bisa jadi pelayanan jasa hukum akan semakin mengandalkan mesin-mesin cerdas (artificial intelligence). Menghasilkan layanan jasa hukum secara lebih taktis, cepat, akurat, dengan biaya lebih murah dibandingkan membayar jasa advokat.

“Sebagai contoh, JP Morgan Chase and Co sejak Juni 2017 telah menggunakan produk artificial intelligence COIN (Contract Intelligence). Mesin pintar yang memiliki kemampuan menganalisa perjanjian kredit dalam waktu singkat dan dengan tingkat akurasi optimal, jauh lebih cepat dari rata-rata waktu yang dibutuhkan seorang advokat untuk mengerjakan hal yang sama,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan bahwa perkembangan teknologi, secanggih apapun itu, tidak akan pernah mampu mengimbangi literasi kemanusiaan berupa naluri, intuisi, moralitas, budi pekerti dan kebijaksanaan.

“Namun, kesadaran ini hendaknya tidak membuat kita merasa berada di zona aman, sehingga menjadi malas untuk meningkatkan kompetensi diri. Kita tidak akan diperbudak oleh kemajuan teknologi, hanya jika kita mau belajar untuk menguasai dan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut,” pungkas Bamsoet. □

Upacara HUT Republik Indonesia Ke-76 Setjen MPR RI



BERTEPATAN dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Indonesia, Selasa (17/8/2021), Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono, bersama pejabat eselon II dan III di lingkungan Setjen MPR berkumpul di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta. Hari itu, Sesjen MPR bersama para pejabat eselon II dan III mengikuti secara daring Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Selasa (17/8/2021).

Acara yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan

secara ketat itu adalah sebagai bentuk kecintaan Setjen MPR kepada bangsa dan Negara, dan bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa yang berjuang mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

Peringatan Detik-Detik Proklamasi dengan inspektur upacara Presiden Joko Widodo itu dimulai sejak pukul 9.00 WIB pagi diikuti dengan khidmat hingga selesai. Dan sore harinya pukul 17.00 WIB dilanjutkan (secara daring) upacara Penurunan Bendera hingga selesai. □

DER



Rakor Setjen MPR RI



PANDEMI Covid-19 masih berlangsung dan memaksa berbagai organisasi, termasuk Sekretariat Jenderal MPR RI, menerapkan kebijakan rutinitas kerja baru untuk beradaptasi terhadap situasi.

Walaupun menghadapi rutinitas baru, seperti WFH dan WFO, Setjen MPR tetap berada di jalurnya berupaya melaksanakan tugas-

tugas yang diemban untuk kepentingan bangsa dan negara.

Untuk memaksimalkan kerja-kerja di lingkungan Setjen MPR RI maka digelar Rapat Persiapan Pembahasan Penyusunan PPA MPR Tahun Anggaran 2022 di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR Senayan, Senin (23/8/2021). □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Apel Pagi Rutinitas Setjen MPR

SEKRETARIAT Jenderal MPR RI melaksanakan apel pagi, Senin, 30 Agustus 2021, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta. Ini adalah apel pagi rutin setiap Senin, diselenggarakan Setjen MPR, sebelum melakukan kegiatan rutin sehari-hari.

Apel pagi yang sudah menjadi agenda rutin ini dilaksanakan dengan menerapkan prokes dan menerapkan pelaksanaan penyelenggaraan sesuai protokol yang sudah ditetapkan. Apel pagi ini di kuti para pejabat di lingkungan Setjen MPR, mulai dari pejabat eselon II, III, IV, serta staf. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Syaiful Huda, Anggota MPR Fraksi PKB

Kita Tak Ingin Kehilangan Satu Generasi Emas

SEJUMLAH daerah, terutama pada wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 – 3, diizinkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas mulai Senin, 30 Agustus 2021. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menyebutkan, salah satu syarat PTM adalah para tenaga pendidik dan guru sudah memperoleh vaksinasi secara lengkap. Pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi Covid-19 dilakukan setelah melalui proses yang cukup panjang.

Awalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil keputusan untuk menutup sekolah di ibu kota pada 14 Maret, dua minggu setelah pemerintah mengumumkan kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia. Penutupan sekolah ini direncanakan selama dua minggu. Saat itu seluruh sekolah melakukan proses pembelajaran jarak jauh atau daring (online). Namun, pandemi Covid-19 tak kunjung mereda. Penutupan sekolah pun berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan.

Setelah hampir setahun ditutup, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim minta sekolah dibuka mulai Januari 2021, di tengah angka kasus Covid-19 yang masih fluktuatif. Nadiem mengatakan, seluruh sekolah di Indonesia, termasuk Jakarta, bisa menggelar tatap muka dengan menyiapkan prosedur Covid-19. Keinginan Mendikbudristek tak mendapat sambutan. Libur Natal dan Tahun Baru 2020 membuat kasus Covid-19 melonjak lagi, sehingga uji coba gagal.

Uji coba kembali digelar lagi pada 7–29 April 2021 untuk 83 sekolah. Uji coba berhasil dan dilanjutkan dengan uji coba tahap kedua pada 9–26 Juni 2021 dengan protokol kesehatan yang ketat. Namun, baru berjalan sepekan, varian Delta membuat kasus Covid-19 naik lagi. Barulah pada 17 Agustus, setelah kasus Covid-19 di ibu kota mereda, diputuskan untuk kembali mencoba PTM pada Senin, 30 Agustus 2021.

Untuk membahas PTM yang sudah mulai berlangsung di beberapa daerah, Majelis mewawancarai anggota MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syaiful Huda. Berikut perbincangan dengan Syaiful Huda yang juga Ketua Komisi X yang membidangi masalah pendidikan. Petikannya.

Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah mengizinkan sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM), terutama di daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 – 3. PTM dimulai pada awal September 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan persyaratan lainnya. Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan pemerintah ini?

Saya menyambut positif adanya kebijakan membuka kembali kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM). Pembelajaran tatap muka ini mesti dilaksanakan dengan beberapa skema, yakni kapasitas siswa 75%, 50%, 25% tergantung status dari kabupaten/kota tersebut, serta dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, mesti dilakukan evaluasi tiap tiga bulan untuk mengetahui ada tidaknya cluster baru Covid-19 di sekolah.

Saat ini, kita semua tidak mau kehilangan satu generasi emas karena pandemi Covid-19. Saya mencatat ada beberapa kasus yang muncul akibat kebijakan tidak adanya pembelajaran tatap muka, di antaranya hampir 1,5 tahun kita kehilangan pem-

belajaran bermakna, banyak pelajar yang beralih menjadi pekerja serta meningkatnya angka pernikahan dini. Jika tidak segera diberikan perhatian serius, saya takut muncul permasalahan lain yang lebih ekstrim yang akan merugikan kita semua sebagai warga negara.

Apakah tidak dikhawatirkan (masih terbuka kemungkinan) terjadi kluster baru Covid-19 di sekolah (sekali pun sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah), mengingat pandemi Covid-19 di Indonesia belum bisa dikatakan mereda. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini?

Sejujurnya kita semua sangat khawatir terjadi kluster Covid-19 di sekolah. Namun, beberapa negara sudah menerapkan

pendidikan ada tiga elemen transfer keilmuan, yakni kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). Sedangkan PJJ hanya mengakomodir satu prinsip, yakni kognitif. Sehingga bisa dipastikan mutu dan kualitas pendidikan Indonesia menurun.

Para siswa pun sudah ingin kembali merasakan suasana sekolah setelah setahun lebih berada di rumah. Bagaimana Anda melihat keinginan anak kembali bersekolah?

Kecenderungan untuk kembali ke sekolah tidak hanya diinginkan oleh pihak sekolah, pun demikian siswa merasa ingin kembali merasakan suasana sekolah. Keinginan ini merupakan modal awal untuk mengakselerasikan semangat mencurahkan harapan,

etika/moral (*attitude*) dan mengasah keterampilan (*skill*) setiap peserta didik berdasarkan potensi yang dimiliki.

Banyak hal yang bisa dilakukan pada belajar tatap muka, misalnya penerapan ritual keagamaan seperti membaca kitab suci, pengajaran disiplin waktu, tanggung jawab, sikap sosial, tenggang rasa, empati, dan lain sebagainya. Sehingga baik *softskill* dan *hardskill* siswa dapat terasah dengan maksimal.

Apa masukan dari Anda agar belajar tatap muka pada masa pandemi ini bisa berjalan efektif, efisien, dan mencapai sasaran?

Pertama, Pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek RI, Kemenkes RI,



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kegiatan pembelajaran dan berhasil melaksanakannya dengan baik. Kunci dari keberhasilan negara tersebut ada pada kepatuhan semua warga sekolah, dari kepala sekolah, karyawan, guru dan siswa dalam menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, peran informasi dari keluarga dan sekolah mengenai status kesehatan setiap individu bisa terkomunikasikan dengan baik. Jika ada siswa dalam keadaan kurang sehat, disarankan tidak diikutsertakan dalam pembelajaran tatap muka.

Bagaimana pandangan Anda mengenai pendidikan selama pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung setahun lebih. Apakah ada kecenderungan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia menurun?

Ketika berbicara mengenai mutu pendidikan sebelum dan sesudah Covid-19 dapat dipastikan berbeda. Karena, dalam prinsip

ide dan gagasan siswa dalam pelaksanaan pendidikan. Sehingga, pihak terkait harus mengeluarkan kebijakan terselenggaranya pembelajaran tatap muka demi menjaga target capaian SDGs bidang pendidikan Tahun 2030.

Apa kelebihan dan kekurangan belajar secara daring dan belajar dengan tatap muka. Apakah dengan belajar tatap muka, para guru dan siswa bisa lebih serius dan intens dalam belajar mengajar?

Kelebihan belajar secara daring ada pada meningkatnya angka partisipasi penggunaan teknologi, siswa dan orang tua memanfaatkan teknologi sebagai media belajar dan literasi digital. Selain itu, belajar daring juga menekan pertemuan di ruang publik sehingga tidak menimbulkan kluster Covid-19. Namun, belajar daring juga memiliki kekurangan, terutama tercapainya transfer

Pemprov, dan Pemkab/Kota harus terus berkoordinasi untuk meramu sebuah kebijakan yang menunjang terlaksananya pembelajaran tatap muka. Selain itu, melenturkan aturan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan alat protokol kesehatan.

Kedua, memaksimalkan kerjasama dengan Satgas Covid-19 di Kabupaten/Kota terkait dengan status Covid-19 di tiap kecamatan agar dinas pendidikan mampu membuat analisa dan menyajikan data akurat mengenai kesiapan belajar tatap.

Ketiga, peran orang tua dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka sangat penting dengan antar jemput ke sekolah untuk memastikan anaknya tidak pergi ke tempat umum. Selain itu, orang tua juga harus mengajarkan dan mencontohkan anaknya dengan memfasilitasi masker, handsanitizer, dan kebiasaan mencuci tangan. □

Pebisnis Mesti Turun Tangan *Saat Pandemi*



KETIKA melakukan perbincangan di acara Ngompol bersama Bambang Soesatyo, beberapa waktu lalu, CEO Ralali **Joseph Aditya** mengatakan, pengusaha mesti turun tangan membantu rakyat menghadapi pandemi ini.

“Saya rasa pengusaha di Indonesia mesti kumpul mencari jalan atau solusi, setidaknya sedikit membantu pemerintah ikut menjaga jangan sampai rakyat terdampak menjadi marah, lalu ada yang menunggangi kemudian terprovokasi,” ujar Joseph Aditya.

Aditya menyatakan, di dunia bisnis seperti sektor tourism dan wisata, sangat terasa dampaknya. “Makanya, saya mengajak semua, ayolah kita berupaya sekeras mungkin saling membantu dalam menghadapi pandemi ini,” ucapnya. □

DER

Joseph Aditya

Pengen *Jadi Orang* Kaya Banget deh.....

ARTIS **Luna Maya** punya impian ingin jadi orang kaya banget. “Bukan apa-apa loh ya, saya pengen kaya banget supaya udah ga mikirin diri sendiri, tapi mikirin orang lain, membantu orang lain,” ujar Luna Maya saat tampil di acara Deddy Corbuzier, Agustus 2021.

Pemeran Suzzanna dalam film layar lebar, ‘Bernapas Dalam Kubur’ ini merasa dunia ini sudah semakin kacau, banyak orang makin terpuruk. “Makannya, kalau saya kaya banget kan bisa membantu, karena udah ga mikirin diri sendiri,” katanya.

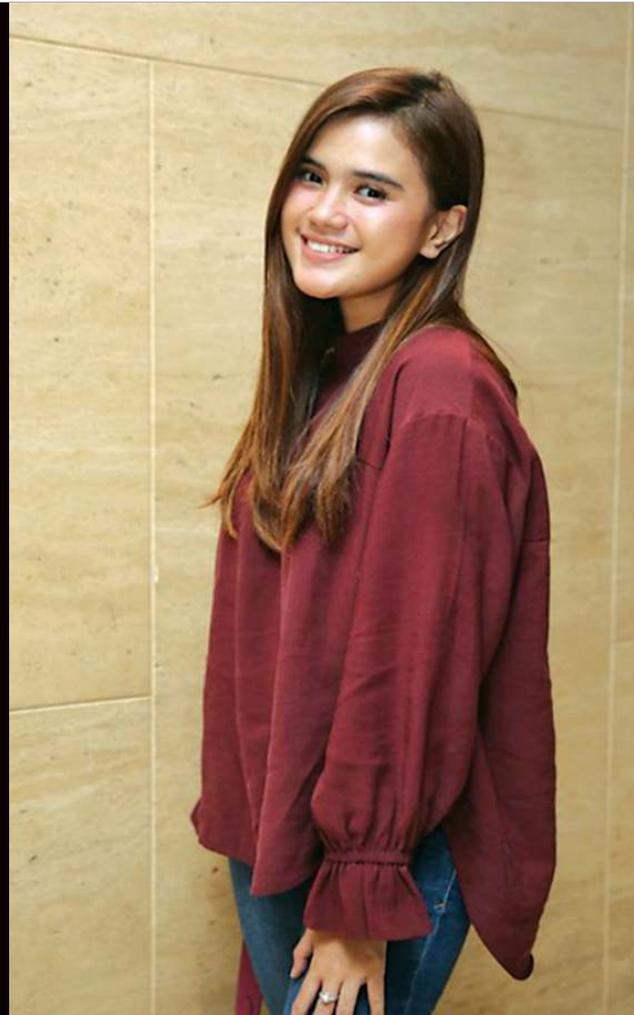
Pada kesempatan merayakan ulang tahun pada 26 Agustus lalu, Luna Maya membuka donasi untuk anak pengidap autisme. “Saya merasa bagian dari masyarakat yang kurang mampu, ini sebagian kecil peran saya,” ucapnya. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Luna Maya



Audi Marissa

Saat PPKM Artis Juga Puter Otak

ARTIS, presenter, dan model, **Audina Marisa** menepis anggapan sebagian orang kalau artis ‘fine-fine’ saja menghadapi kebijakan pemberlakuan PPKM Level 4. “Kita juga mutar otak menghadapi situasi itu,” ungkap Audi menepis anggapan masyarakat dunia maya yang menyatakan, artis tidak mikiran soal uang.

Jadi, kata Audi, kalangan artis juga sangat terkena dampak kebijakan PPKM itu. “Beberapa artis pasti mikir keras gimana bertahan di tengah PPKM ini,” kata peraih penghargaan Festival Film Bandung 2018 ini.

Sedangkan dia sendiri mengaku, hanya berserah diri pada Tuhan. “Saya serahkan saja pada Tuhan, pandemi ini sampai kapan. Yang penting kita sabar,” ujar Audi, pertengahan Agustus lalu. □

DER



Legenda Pasar Gaplok Kini Tinggal Sejarah

PAGI hari itu, matahari di atas wilayah Pasar Senen, Jakarta Pusat, baru beranjak naik. Pada saat itu pula para pekerja kantoran sudah tampak berseliweran di jalanan menuju tempat kerja mereka masing-masing. Begitu pula di Pasar Gaplok, yang letaknya tak begitu jauh dari sisi Senen, Jakarta Pusat, terlihat kesibukan luar biasa. Di sana, di pasar itu, terjadi transaksi yang tak berkesudahan.

Seperti biasa, suasana pasar, antara penjual dan pembeli sama-sama sibuknya. Kalau cuaca lagi ramai, tentu, para penjual melayani beberapa pembeli sekaligus. Penjual bukan hanya menerima dan menghitung uang dari dagangan yang terjual, tapi juga harus sabar melayani pembeli yang coba berusaha mendapat barang dengan harga bagus, dengan cara menawar. Sementara pembeli lain terus memilih dan memilah barang yang diperlukan.

Beberapa petugas Satpol PP tampak bersiaga, di pos mereka. Sembari bercakap dengan koleganya, pandangan mata mereka terus mengawasi kondisi di pasar. Sesekali, salah satu di antara petugas Satpol PP itu

mengingatkan pengunjung pasar agar membetulkan posisi maskernya yang melorot. Mereka juga diingatkan agar menjaga jarak, satu dengan lainnya.

Di rel perlintasan kereta, yang membujur persis di sebelah pasar, majalah *Majelis* menemukan dua orang pedagang yang tengah mengemas barang dagangannya. Satu orang merupakan pedagang sandal dan sepatu, serta seorang lagi berjualan barang pecah belah. Tetapi sekejap kemudian keduanya

sudah menghilang dari pandangan mata.

Tak jauh dari kedua pedagang itu tadi, ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk, dan saling berbicara satu dengan lainnya. Beberapa sampah plastik terlihat beterbangan ditiup angin. Terbangnya sampah-sampah plastik itu akan semakin menjadi saat kereta api melintas di sana.

Pemandangan yang ditemukan Majalah *Majelis* itu berbeda dengan Pasar Gaplok. Pasar yang sudah melegenda, dikenal



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sebagai pasar yang berbahaya. Aktivitas jual beli di pasar itu dilakukan berdempetan langsung dengan rel kereta api. Bahkan, banyak lapak dan atapnya yang berada persis di samping rel kereta. Karena itu, setiap kali kereta lewat terpaksa harus mengurangi kecepatannya, untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Menurut ceritanya, sejak pagi buta hingga siang bolong, aktivitas pasar di samping rel kereta itu terus terjadi. Baik pedagang maupun pembeli agaknya tidak khawatir dengan risiko kegiatan mereka di pinggir rel kereta. Mereka melaksanakan kegiatan itu bertahun-tahun, bahkan menurunkannya kepada anak cucu mereka.

Tetapi kini, pemandangan yang sempat melegenda di rel kereta api dekat Stasiun Pasar Senin itu kini sudah tidak ditemukan. Sekarang tak tampak lagi lapak-lapak berada persis di samping rel. Tak ada lagi penjual dan pembeli berjubel di samping rel kereta, dari pagi hingga siang hari. Juga tidak ada lagi terlihat warga masyarakat hilir mudik melintasi rel, sehingga memaksa kereta api berjalan pelan.

Kalaupun masih ada kegiatan di samping rel, itu hanya dilakukan pada pagi buta hingga saat matahari terbit. Itupun tidak seramai dulu, hanya beberapa pedagang saja yang masih nekat. Dan, setelah itu mereka akan segera membubarkan diri, terlebih setelah para petugas pasar tiba di tempat tersebut.



Wajah pasar Gaplok memang berubah. Itu tak lepas dari upaya yang dilakukan selama ini, membuat pasar itu makin aman dan ramah. Di antaranya adalah penertiban yang sering dilakukan oleh aparat keamanan. Juga ditutupnya akses jalan yang melintang di antara rel. Untuk gantinya, jalan setapak disertai pintu untuk membatasi gerak

masyarakat yang hendak pergi atau kembali dari pasar.

Sejak itu, menurut Solikhin—seorang pedagang kopi yang ada di sana—keramaian di pasar berangsur-angsur mulai berkurang. Apalagi, banyak juga pedagang yang memilih pindah, atau berhenti berjualan. Terlebih bagi mereka yang memang dilarang oleh keluarganya untuk berjualan lagi di pasar.

“Jumlah pedagangnya terus berkurang. Pedagang yang masih berjualan di sini tinggal 70% dari jumlah sebelumnya,” kata Solikhin. Dan, saat ini, kata Solikhin, seluruh pedagang berjualan di dalam pasar. Hanya sebagian kecil yang masih bertahan di dekat rel. Itupun hanya sebentar, tidak seperti dulu dari pagi buta hingga siang hari.

Menurut Solikhin, selama pandemi Covid-19, situasi pasar semakin sepi. Bahkan, pasar Gaplok juga sempat ditutup untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona. Bahkan, ketika Covid-19 bisa diantisipasi seperti saat ini keramaian Pasar Gaplok belum juga kembali normal seperti sediakala. □

MBO

Saadiah Uluputty, ST.

Perempuan Tangguh Penerus Perjuangan Pattimura



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PEMILIHAN Umum tahun 2019 memberi akhir manis bagi Saadiah Uluputty, S.T., (48), pimpinan Fraksi PKS MPR RI. Pada pemilihan legislatif itu, ia berhasil menjawab perintah partai untuk naik tingkat di kancah politik nasional. Dan, mengantarnya untuk pertama kali menjadi anggota DPR RI. Atau meningkat setelah dua periode sebelumnya menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku. Padahal, kontestasi untuk meraih kursi di Senayan tidaklah gampang. Penuh intrik, ancaman, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Terlebih lagi, Saadiah harus menantang caleg-caleg incumben yang sudah malang melintang di dunia politik, dan telah mengakar di masyarakat. Apalagi mereka didukung capital dan modal sosial yang sangat kuat. Ia juga harus menaklukkan tantangan alam Maluku yang cukup keras, berupa lautan, gunung, dan hutan. Selain itu, ia juga harus melawan rasa takut dan was-was, karena selama masa kampanye ia harus meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil.

"Kami di Provinsi Maluku memperebutkan empat kursi di DPR RI. Itu membuat pertarungannya sangat ketat. Apalagi wilayah Maluku terdiri dari 1.340 pulau. Jadi, strategi yang paling tepat adalah turun langsung ke masyarakat, dan itu tidak mudah. Selain strategi juga diperlukan takdir yang baik," kata Saadiah Uluputty kepada *Majelis* beberapa waktu lalu.

Selama masa kampanye, Saadiah menyambangi 500 pulau dengan 700 titik kampanye. Beberapa tempat yang dikunjungi bahkan harus ditempuh dengan membelah samudra, mendaki gunung, dan menyusuri hutan. Tidak itu saja, beberapa tempat bahkan memiliki

jarak tempuh yang sangat lama, mencapai dua hari dua malam perjalanan menggunakan perahu.

Karena itu, wajar bila perjalanan Saadiah saat berangkat atau kembali dari tempat kampanye diintai oleh mara bahaya. Seperti yang terjadi saat ia kembali dari kepulauan Aru. Saat itu, sehabis Maghrib, Saadiah ditemani suaminya, Abdullah Wahid, M.Sc., Shut., dalam perjalanan pulang dari Pulau Aru. Di tengah perjalanan, sekitar pukul 23.00 WIT, perahu yang ditumpangnya dihempaskan oleh angin selatan. Akibatnya, mereka hanya bisa bertahan, dan terombang-ambing di tengah lautan.

"Saya bilang ke suami, bagaimana nasib anak-anak nanti. Tapi, suami saya mengajak untuk tenang dan terus berzikir. Dia bilang, kalau kita sampai mati insya Allah mati syahid," cerita Saadiah, anak perempuan dari pasangan H. Muhammad Husein Uluputty dan Hj. Marjani Uluputty ini.

Peristiwa lain terjadi saat Saadiah hendak pergi ke Pulau Banda Naira. Di tengah jalan perahu yang ditumpangi dihempas ombak besar. Saking besarnya, ombak itu sampai-sampai menghalangi pandang untuk melihat ke langit. Situasinya kian mencekam, karena perahu yang ditumpangnya banyak kemasukan air.

Beruntung, kondisi mencekam itu bisa dilewati. Namun, kecemasan Saadiah semakin menjadi saat sudah sampai di tempat tujuan. Ia diberitahu bahwa baru saja ada kapal yang karam diterjang ombak besar. Dan, warga masyarakat menyangka dia tak jadi datang. Apalagi, menghadapi situasi seperti itu, biasanya penduduk setempat



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

memilih untuk tidak melaut.

“Cerita itu membuat saya bersyukur. Tapi, saat hendak kembali, rasa kekhawatiran saya menjadi lebih besar,” kata ibu enam anak ini.

Negeri Hila

Sebagai pendatang baru di ranah lembaga Legislatif, Saadiyah sangat mensyukuri apa yang dia peroleh. Saadiyah tidak akan meyakini keberhasilannya melangkah ke Senayan. Baginya, amanat itu harus dibayar lunas dengan bekerja keras memperjuangkan

aspirasi masyarakat.

Prinsipnya, NKRI terdiri dari 34 provinsi yang seluruhnya harus dimajukan, termasuk Maluku. Faktanya, wilayah-wilayah kawasan Indonesia Timur masih menjadi daerah miskin, meski memiliki potensi yang melimpah. Karena itu, ia merasa memajukan Maluku adalah tugasnya, dengan cara menyampaikan dan memperjuangkan usulan pembangunan masyarakat kepada pemerintah pusat.

Selain memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan pemerintah, alumni SMA Negeri Hila, Kaitetu, Maluku Tengah, ini acapkali mengulurkan tangan membantu



masyarakat, menggunakan uang pribadi. Bahkan, tak jarang penghasilannya sebagai anggota legislatif habis digunakan untuk membantu masyarakat.

“Jadi anggota DPR itu agar bisa melayani, berbuat baik, dan beramal. Ini kesempatan bagi saya untuk berbuat baik, mumpung uangnya masih ada, punya jabatan, dan selagi suaranya masih berpengaruh. Saya bertekad memanfaatkannya sebelum nikmat dari Allah ini dicabut,” kata Saadiyah lagi.

Menjadi politisi, kata Saadiyah, bukan pekerjaan mudah, dibanding misalnya menjadi kontraktor, pekerja atau pebisnis. Menjadi politisi itu berarti siap meninggalkan zona nyaman. Artinya, saat mau istirahat masyarakat datang mengetuk pintu, kita harus ikhlas melayani mereka. Termasuk jika ada yang datang di waktu malam untuk meminta bantuan atau sumbangan.

Karena itu, Saadiyah bersukacita ketika Maret 2021 dia dipindahkan ke Komisi IV DPR RI dari sebelumnya di Komisi VII. Baginya, duduk Komisi IV lebih cocok dengan daerah pemilihan yang diwakili. Sebab, di Maluku banyak ditemukan perkebunan hingga potensi kelautan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Sayangnya, menurut Saadiyah, keberpihakan pemerintah terhadap petani dan dunia pertanian ibarat peribahasa, jauh panggang dari api. Petani-petani Indonesia dibiarkan bertarung bebas dengan petani luar negeri. Sebagai bukti adalah banyaknya produk impor yang terus berdatangan, termasuk ketika produksi pertanian dalam negeri sedang banyak-banyaknya. Padahal, petani luar negeri banyak mendapat fasilitas dari negaranya, sementara Indonesia malah sebaliknya. Salah satu contoh kongkretnya adalah masalah pupuk.

“Impor kita meliputi hampir semua kebutuhan pangan. Mulai garam, beras, hingga cabai semua impor, termasuk manusianya. Gagasan tentang kemandirian pangan sebagaimana pidato Presiden pada 16 Agustus banyak dipertanyakan. Karena apa yang disampaikan Presiden kontra produktif dengan fakta yang ada,” ujar Saadiyah.

Kebijakan impor pangan, menurut Saadiyah, bahkan terus terjadi di masa pandemi Covid-19. Di tengah isu impor vaksin, pemerintah juga melakukan impor pangan. Padahal selama pandemi Covid-19, pertanian menjadi salah satu sektor yang tetap bergerak. Namun, karena pemerintah juga memberlakukan impor pangan, potensi keuntungan petani tidak sebesar semestinya.

“Dunia pertanian kita berpersoalan sejak dari hulunya. Regulasi kita mengenai masalah pangan, sesuai UU No 11 Tentang Cipta



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kerja, sudah tidak memakai kata kemandirian pangan dan menggantinya dengan ketersediaan pangan. Salah satu cara yang dilegalkan untuk memenuhi ketersediaan pangan adalah mekanisme impor,” katanya.

Terinspirasi BJ. Habibie

Saadiyah Uluputty, S.T., adalah satu dari sedikit perempuan tangguh di ranah legislatif. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dengan alam. Bermain di laut, naik bukit, memanjat pohon pala, dan mencari cengkih diperkebunan sudah menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Kegiatan tersebut sesuai dengan profesi orangtuanya sebagai petani





dan nelayan.

Meski hidup di tengah kesenyapan alam, tetapi pemikiran perempuan kelahiran Negeri Lima, 7 April 1973, tidak ikut mandeg. Ide dan pemikirannya banyak dipengaruhi dan terinspirasi oleh Presiden Indonesia ketiga, BJ. Habibie. Terutama, ketika Habibie mendirikan PT. PAL dan menciptakan pesawat terbang.

Karena itu, ketika ia memilih jalan politik, ikut mendirikan Partai Keadilan Sejahtera dan menjadi anggota DPRD, banyak koleganya menganggap Ibu dari 6 orang anak (3 putra dan 3 putri), yaitu: Annisa Inayatullah, Muhammad Nashiruddin, Yahya Rabbani, Nabila Khairunnisa, Aqila Marzani, dan Muhammad Imanulhaq, telah salah jalan. Tetapi anggapan tersebut mulai sirna setelah ia meraih sukses di jalan politik.

Apalagi, setelah namanya juga kerap disebut menjadi sumber pemberitaan. Seperti, di awal pelantikan, Saadiah sempat mengkritisi Menkopolkam Wiranto. Saat itu Wiranto menyebutkan pengungsi gempa Ambon menjadi beban pemerintah. Ungkapan itu sontak menuai respon. Saadiah tersinggung dan menyebut pemerintah tidak serius dalam menangani korban bencana alam di Ambon.

Meski sibuk dan nyaris kehabisan waktu mengurus dunia politik, Saadiah masih memiliki waktu lebih untuk mengurus keluarga. Ini bisa dilihat dari keberadaan aneka bunga dan tanaman sayur-sayuran di rumahnya. Kegiatan tersebut dilakukan di waktu senggang. Selain itu, Saadiah juga kerap bercengkrama bersama keluarga di tengah kesibukannya 'bolak-balik' Ambon – Jakarta. □

MBO



Biodata

Nama Lengkap : **Saadiah Uluputty, ST.**
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat & Tgl Lahir : Negeri Lima, 07 April 1973
 Agama : Islam
Alamat Rumah : Negeri Lima, Leihitu, Maluku Tengah
 Provinsi Maluku
Alamat di Jakarta : Rumah Jabatan Anggota DPR RI
 Blok A1/5, Kalibata – Jakarta Selatan
Alamat Kantor : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI,
 Gedung Nusantara I, Lantai 3 Ruang 0343,
 Jl. Gatot Subroto No. 6, Senayan Jakarta 10270
 No. Kontak : +6281391119614

Data Keluarga:

1. Abdullah Wahid, Suami, 25-05-1973 - PNS
2. Annisa Inayatollah, Anak ke-1, 10-06-2003 - Pelajar
3. Muhammad Nashirudin, Anak ke-2, 05-09-2004 - Pelajar
4. Yahya Rabbani, Anak ke-3, 23-04-2006 - Pelajar
5. Nabila Khairunnisa Wahid, Anak ke-4, 11-10-2009 - Pelajar
6. Aqila Marjani Wahid, Anak ke-5, 06-03-2013 - Pelajar
7. Muhammad Imanulhaq Wahid, Anak ke-6, 25-06-2015 -

Pendidikan Terakhir:

Sarjana Teknik Kelautan (S.T.)
 dari Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya

Pengalaman Kerja:

- Anggota DPR RI Periode 2019 – 2024
- Ketua Komisi D, DPRD Provinsi Maluku, Tahun 2014 – 2019
- Anggota DPRD Provinsi Maluku, Tahun 2009 - 2014
- Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku, Tahun 2009 – 2014
- Direktur CV Puteri Liki-Liki, Tahun 2002 – 2009

Riwayat Bidang Legislatif:

- Anggota DPRD Provinsi Maluku, Tahun 2009 – 2014
- Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku, Tahun 2009 – 2014
- Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Tahun 2009 – 2014
- Anggota Badan Anggaran, Tahun 2009 - 2014
- Anggota Badan Musyawarah, Tahun 2009 - 2014
- Anggota DPRD Provinsi Maluku, Tahun 2014 – 2019
- Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Tahun 2014 - 2019
- Anggota Badan Anggaran, Tahun 2014 - 2019
- Ketua Komisi D DPRD Provinsi Maluku, Tahun 2014 – 2019
- Anggota Komisi VII DPR RI, Tahun 2019 – 2020
- Anggota Komisi IV DPR RI, Tahun 2020 - Sekarang

Pengalaman Organisasi:

- Ketua Keputrian LDK Unpatti, Tahun 1997
- Ketua Kastrat KAMMI Daerah Maluku, Tahun 1998
- Bendahara DPD PKS Maluku Tengah, Tahun 2004
- Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Maluku, Tahun 2010
- Sekretaris Dewan Syariah Wilayah DPW PKS Maluku, Tahun 2015
- Dewan Pakar Hena Hetu Maluku, Tahun 2016
- Pembina Hetu Upu Ana Maluku, Tahun 2016
- Wakil Ketua Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Indonesia Timur DPP PKS, 2020 - Sekarang

Aktivitas Sekarang:

- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Daerah Pemilihan Maluku
- Bendahara Fraksi PKS MPR RI

Persatuan dan Kesatuan, Sebuah Solusi Mengatasi Pandemi

Persatuan dan kesatuan adalah jalan paling efektif dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mengatasi segala problem kebangsaan.

PERSATUAN dan kesatuan adalah dua kata yang menjadi tradisi di dalam membangun Negara Indonesia merdeka. Tradisi ini lahir dari nilai luhur dan manifestasi budi masyarakat Indonesia untuk hidup bersama-sama sepenanggungan. Tradisi ini telah dipertunjukkan oleh para *founding fathers* negeri ini dengan bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, hingga mengisi kemerdekaan dengan pembangunan.

Meskipun memiliki banyak perbedaan, para *founding fathers* saling menghormati satu sama lain. Mereka menempatkan visi ke-Indonesia-an di atas visi golongan dan kepentingan tertentu. Itulah mengapa, istilah *Bhinneka Tunggal Ika* yang memiliki arti Berbeda-Beda tetapi Tetap Satu dipilih sebagai semboyan bangsa Indonesia. Frasa yang berasal dari bahasa Jawa Kuno ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam budaya, adat istiadat, bahasa daerah, suku bangsa, hingga agama dan kepercayaan.

Negara Indonesia merdeka yang diproklamkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah negara besar yang didukung dengan berbagai keunggulan. Mulai dari keunggulan demografis, keunggulan geografis, keunggulan sosial budaya, hingga keunggulan ideologis. Kemajemukan sosial budaya yang terkristalisasi dalam bentuk nilai dan filsafat hidup bernama Pancasila menuntut perlunya persatuan dan kesatuan sebagai jati diri bangsa dalam menghadapi berbagai perkembangan zaman.

Dalam konteks kekinian, persatuan dan kesatuan menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Kata bijak mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Seberat apapun persoalan bangsa, jika penyelesaiannya dilakukan dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan maka persoalan

tersebut dapat teratasi dengan baik. Munculnya berbagai persoalan bangsa harus diatasi dan dikelola secara bersama-sama sehingga memunculkan gagasan yang solutif dan membangun.

Indonesia yang berumur 76 tahun pada 17 Agustus 2021 kini sedang berada dalam kondisi kesulitan di berbagai sektor kehidupan. Kesulitan ini tidak terlepas dari munculnya Covid-19, sebuah wabah penyakit yang masuk ke Indonesia di awal Maret 2020, dan berubah menjadi pandemi. Selama satu tahun lebih, pandemi Covid-19 ini memberikan dampak dan perubahan terhadap seluruh lini kehidupan, baik dari segi kesehatan, ekonomi, hingga sosial politik.

Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, total kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 3.568.331 kasus per-tanggal 6 Agustus 2021. Kasus meninggal dunia akibat Covid-19 juga kian bertambah mencapai 104.256 kasus. Dalam berbagai kajian epidemiologi, angka ini belum menunjukkan penurunan kasus yang signifikan beberapa waktu ke depan. Apalagi, positivity rate (rasio angka positif terhadap jumlah pengujian) masih mencapai 24,5%, lima kali lipat dari standar maksimum yang ditetapkan WHO sebesar 5%.

Tidak hanya dari aspek kesehatan, pandemi Covid-19 juga telah memunculkan persoalan baru di bidang ekonomi. Imbas dari berbagai kebijakan pembatasan membuat berbagai perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan-karyawannya. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan, terdapat setidaknya 2,14 juta orang kehilangan pekerjaan selama masa pandemi Covid-19. Tidak hanya karyawan, berbagai usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar harus gulung tikar karena mendapatkan hantaman Pandemi.

Peningkatan angka PHK ini berdampak pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Angka ini berkontribusi terhadap peningkatan pengangguran dari tahun 2020 hingga Februari 2021 sebesar 26,26%. Pada 2020, angka pengangguran mencapai 6,93 juta dan meningkat tajam menjadi 8,75 juta pada Februari 2021. Tidak hanya itu, persentase penduduk miskin juga bertambah hingga mencapai 10,14% pada Maret 2021 akibat pandemi Covid-19.

Oleh:
Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA.
Wakil Ketua MPR RI



Berbagai aktivitas dan kegiatanpun mengalami perubahan. Jabat tangan dan berpelukan yang menjadi budaya masyarakat Indonesia berubah menjadi salam komando hingga salam tanpa saling bersentuhan. Berbagai acara dan kegiatan, baik formal maupun non-formal diarahkan pelaksanaannya secara virtual. Pulang kampung di masa-masa lebaran untuk melepas rindu bersama keluarga harus ditahan sementara waktu. Handsanitizer dan masker juga kini menjadi barang yang jarang terlepas dari keseharian.

Berbagai dampak dan perubahan yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 menuntut perlunya persatuan dan kesatuan antarstakeholder dan anak bangsa. Kolaborasi menjadi jalan keluar paling efektif dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Semua orang dari berbagai latar belakang menjadi pilar penting untuk memastikan bahwa kepatuhan

terhadap protokol kesehatan tetap terjaga. Selain itu, semua orang memiliki tanggung jawab moral untuk saling membantu satu sama lain sebagai sesama anak bangsa dan sesama umat manusia di tengah berbagai kesulitan.

Inilah yang disebut kolaborasi peran pentahelix sebagai realisasi dari persatuan dan kesatuan. Peran pentahelix yang melibatkan pemerintah, media, komunitas/masyarakat, dunia usaha, dan akademisi harus dioptimalkan. Pemerintah menjadi pengambil kebijakan dalam penanggulangan Covid-19, sementara stakeholder lainnya membantu pemerintah dalam penyusunan hingga pengimplementasian kebijakan. Meskipun kebijakan telah disusun, namun tanpa kolaborasi dalam penyusunan dan implementasi kebijakan maka kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Media mengambil peran strategis sebagai penyebar informasi yang akurat kepada masyarakat. Komunitas mengambil peran sebagai ruang partisipasi publik untuk menghadirkan kebijakan dan implementasi kebijakan yang baik. Dunia usaha dan dunia bisnis (DuDi) mengambil peran dalam berbagai kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Akademisi berperan sebagai pilar yang menghadirkan kajian dan nuansa akademis dalam berbagai kebijakan penanggulangan Covid-19. Jika semua mengambil peran dengan semangat persatuan dan kesatuan maka persoalan ini dapat cepat diselesaikan.

Semangat 76 tahun Kemerdekaan Indonesia harus mendarah-daging dalam diri kita. Meski dulu para pejuang hanya menggunakan bambu runcing dan senjata ala kadarnya, tetapi dengan semangat persatuan dan kesatuan, penjajah dapat diusir dari bumi Indonesia. Kini, semangat tersebut harus hadir kembali di dalam sanubari kita seluruh anak bangsa. Tugas kita bersama untuk mengusir dan mengalahkan pandemi Covid-19 yang telah menyulitkan berbagai lini kehidupan.

Selamat Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Indonesia. Mari bersama, bersatu, dan kepalkan tangan untuk melawan Covid-19 yang menjadi musuh bersama, sambil meneriakkan kata "Merdeka". □

Model Fadel Untuk Reinventing Local Government

Sebagai seorang pengusaha, Fadel Muhammad kaget ketika kali pertama berada dalam lingkungan pemerintahan daerah. Ia membandingkan antara pegawai bank dan pegawai negeri di pemerintahan daerah. Hal demikian merupakan salah satu tantangan saat menjadi Gubernur Gorontalo. Ia ingin mengubah kebiasaan sebelumnya dengan Model Fadel. Salah satu model itu adalah melakukan reformasi birokrasi. Semua masalah dan solusinya, ia tuangkan dalam buku karyanya: *Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah*.

SAAT menjadi Gubernur Gorontalo 2001-2009, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengungkapkan perasaannya bahwa bangsa ini sudah delapan tahun memasuki era otonomi daerah. Dia mengakui ada sejumlah pemerintah daerah yang berhasil memaknai penyelenggaraan otonomi daerah yang ditunjukkan dengan pencapaian prestasi pembangunan, namun ada juga yang gamang dan belum berbuat banyak untuk memajukan daerahnya.

Wakil Ketua MPR Periode 2019-2024 ini, saat itu, ada perasaan pesimistis, sebab belum ada *road map* yang bisa menjadi pemandu pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi guna tercapainya kemaslahatan rakyat di daerah. Ukuran kemaslahatan, menurut pria kelahiran Ternate, Maluku Utara, itu sebenarnya sederhana, apakah pemerintah sudah mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi problem sosial ekonomi rakyat melalui kebijakan dan implementasinya.

Untuk memberi solusi tentang masalah otonomi daerah, Gubernur Gorontalo dua periode itu menulis buku yang diberi judul: *Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah*. Alumni ITB itu mengatakan, *reinventing local government* akan berhasil jika ada inovasi dan terobosan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja, dan ada *network* agar perubahan menjadi lebih cepat menyebar dan mendapat dukungan. Hasil dari *reinventing local government* yang diharapkan berupa terbangunnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa percaya dan dukungan dari masyarakat.

Buku ini terbagi dalam 3 Bab. Meski demikian, ia memiliki ketebalan xxi + 421 halaman. Ditulis pada saat dia menjabat sebagai gubernur maka tak heran kalau buku yang dicetak oleh *Kompas Gramedia* ini mengupas berbagai masalah administrasi daerah, serta potensi yang ada di daerah (Gorontalo).

Dalam buku bersampul gambar Gedung Kantor Pemerintah Provinsi Gorontalo itu, ada solusi untuk bisa *reinventing local government*. Solusi itu adalah dengan *Model Fadel*. Dalam hal 177,

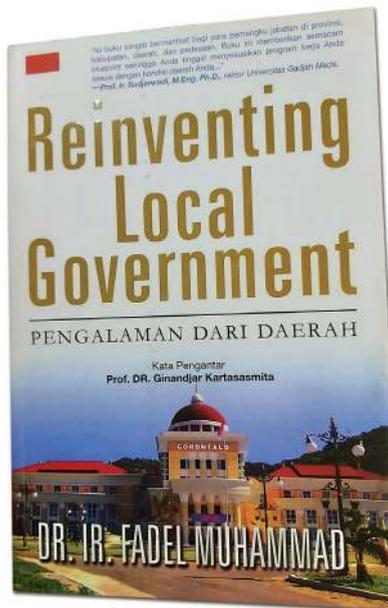
penulis menyebutkan, ranah *reinventing local government* yang paling penting adalah penguatan kapasitas manajemen dan peningkatan kinerja. Kapasitas manajemen yang kuat merupakan prakondisi bagi terwujudnya kinerja pemerintahan daerah.

Selanjutnya dalam hal 184 hingga 187, Fadel Muhammad menguraikan bagaimana menerapkan *Model Fadel* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Di halaman-halaman itu ada 7 langkah yang telah dilaksanakan dalam upaya *reinventing local government*. Untuk lebih lengkap mengenai 7 langkah itu bisa dibaca di buku tersebut. Salah satu di antara 7 langkah itu adalah melakukan reformasi birokrasi pemerintah daerah.

Terkait reformasi birokrasi pemerintah daerah, pria pengusaha itu kaget ketika pertama kali memasuki dunia pemerintahan (daerah). Dia membandingkan pola kerja yang berbeda antara pegawai negeri dan swasta. Kinerja pegawai bank yang berada di lini depan (*front office*) yang cekatan tidak pernah berhenti melayani pelanggan, selalu ramah dan murah senyum. Berbeda sekali dengan kinerja pegawai negeri yang melayani masyarakat. Fadel berpikir, ini adalah contoh ideal yang kasatmata semestinya dapat dicangkokkan pada birokrasi pemerintahan daerah. "Pikiran ini terus mengganggu saya, bagaimana melakukan pembenahan pada sistem kepegawaian daerah sehingga mereka memiliki etos kerja yang tinggi", ujarnya, halaman 190.

Buku yang ditulis pada 2008 dan saat ini dicetak ulang itu mendapat sambutan yang baik dari Menteri Dalam Negeri Mardiyanto. Sang menteri menyebutkan, buku ini sangat layak untuk dibaca oleh para penyelenggara pemerintahan nasional dan daerah. Sebab, buku ini menyajikan pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif berdasarkan kerangka konseptual yang relevan, serta menawarkan pola implementasi kebijakan yang mengutamakan kaidah-kaidah *effectiveness*, *efficiency*, dan *economy* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. □

AWG





**MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT**



MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

INDONESIA
INI BARU
DARI MPR RI UNTUK NKRI

INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Edukasi Milenials *Seputar AIDS*



Atalia Praratya

ATALIA PRARATYA, istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku kaget dan prihatin mendengar kabar banyak mahasiswa Bandung yang dinyatakan positif HIV/AIDS. Melalui akun IG miliknya, yang diunggah akhir Agustus 2022 lalu, perempuan yang akrab disapa Ibu Cinta ini menekankan, "Inilah pentingnya edukasi yang intens kepada generasi muda kita."

Juga melalui akun IG-nya, Ibu Cinta mengatakan, banyak cara untuk menghindari dari penyakit HIV/AIDS. Antara lain, kuat iman. Kalau imannya kuat, seseorang tak gampang tergoda hal-hal negative. Cara lain, saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan. Hindari penggunaan jarum suntik yang tercemar, jarum yang biasanya digunakan pecandu narkoba.

Tapi dari sekian banyak cara itu, Ibu Cinta sangat tidak setuju jika ada yang mengatakan, salah satu solusinya untuk terhindar dari HIV/AIDS, khususnya untuk kaum milenials, adalah menikah muda. Bisa saja alasan menikah muda untuk menghindari zina, tapi bagi Ibu Cinta yang penting kepada generasi muda diberi edukasi mengenai bahayanya HIV/AIDS secara benar. □

DER



Hadapi Tantangan Global

SETELAH film horor *Pengabdian Setan 1 dan 2*, sutradara **Joko Anwar** bersama sinieas Indonesia kembali menyuguhkan film tema lain. Sebuah film series 'Waktu Netflix Indonesia.' Film serial ini bercerita tentang orang-orang yang mengalami berbagai kejadian aneh. Dengan beragam plot, kisah-kisah ini pada akhirnya saling bertautan dan mencapai ujuang yang dramatis. Dan, series ini, Joko menghadirkan serial bergenre sci-fi thriller berjudul: "Nightmares and Daydreams."

Joko mengungkapkan, masyarakat Indonesia sebenarnya sangat menanti film lokal, tentu jika film itu di garap secara serius dengan menjaga kualitas. "Seperti film baru saya ini. Film atau serial Indonesia tetap bisa dinikmati oleh negara lain asalkan memiliki cerita yang universal," katanya Joko sedikit berpromosi.

"Saya percaya bahwa cerita yang menarik itu adalah cerita yang punya tema universal, tapi diceritakan dari sudut pandang di mana series atau film makernya," terang Joko dalam jumpa pers peluncuran film series 'Waktu Netflix Indonesia' di Jakarta, Jumat (2/9/2022). □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Joko Anwar



Ustaz Adi Hidayat

Mencetak Generasi Muda Berwawasan Agama dan Iptek

DI DAERAH Bekasi, Jawa Barat, berdiri sebuah sekolah setingkat sekolah dasar. Namanya, SD Akhyar International Islamic School. Hari pertama September 2022, sekolah diresmikan oleh **Ustad Adi Hidayat (UAH)** bersama Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto, dan beberapa pejabat daerah.

UAH menyebut sekolah ini unik. Kenapa? "Anak-anak belajar matematik tapi tahu juga dalil Alqurannya (suratnya apa, dan ayatnya berapa)," jelas UAH. Istimewanya, lulusannya sekaligus hafal Qur'an 30 juz. Wisudanya insya Allah di Mekkah, sanad Qur'an-nya langsung dari imam Masjidil Haram. "Alhamdulillah kita sudah membangun kersajama di sana," ujar UAH.

Menurut UAH, tujuan sekolah barunya ini sama persis seperti tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas yang dicanangkan pemerintah. Di mana salah satu tujuannya, untuk mewujudkan sistem pendidikan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Situ Rawa Kalong Wajah Baru Situ Rawa Kalong Depok

GEBYAR perayaan HUT Ke-77 Kemerdekaan Indonesia terasa hingga di berbagai pelosok. Salah satunya, di Desa Curug Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Bertempat di Gedung Serba Guna kawasan Situ Rawa Kalong, masyarakat Desa Curug tak melewatkan momen detik-detik peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus 2022. Di tempat itu mereka menggelar berbagai acara. Seperti kirab sepeda hias anak-anak, jalan sehat, pagelaran kesenian Reog hingga berbagai perlombaan.

Kemeriahan perayaan HUT itu begitu terasa. Dari anak-anak hingga orang dewasa, pria dan wanita, berbaur menjadi satu, meperingati hari kemerdekaan Indonesia. Derap semangat peringatan hari proklamasi itu seolah makin membara, begitu lagu-lagu perjuangan terus diperdengarkan dari pengeras suara. Terbukti, hingga tengah hari, kerumunan itu masih utuh. Tak bubar karena kelelahan maupun panasnya sinar matahari.

Begitulah suasana yang ditemukan Majalah *Majelis MPR RI* saat berkunjung ke Situ Rawa Kalong, Kelurahan Curug,

Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, bertepatan dengan perayaan HUT Ke-77 Kemerdekaan Indonesia, Rabu (17/8/2022). Meski rata-rata kondisi cuaca Jakarta terasa terik, tetapi warga yang berkerumunan di kawasan Situ Rawa Kalong seolah tak merasakan panasnya sinar



matahari. Untunglah semilir angin yang berhembus, ditingkahi dingin uap air Situ yang memiliki luas tak kurang dari 8,25 hektar itu mampu melindungi para pengunjung, dari sengatan sinar matahari. Apalagi jika berteduh di bawah pepohonan yang tumbuh tepat dibibir situ Rawa Kalong. Sehingga yang

dirasakan kemudian bukannya kepanasan, tetapi sepoi angin yang mendatangkan rasa kantuk semakin dalam.

Ibarat saung di tengah sawah, Rawa Kalong menawarkan keteduhan dan ketenangan bagi masyarakat dan pengguna jalan raya Bogor yang tak pernah terlelap. Kebisingan di sepanjang jalan itu terjadi terus menerus, tak berkesudahan. Siang malam, pagi dan sore selalu memproduksi polusi udara yang tak pernah berhenti. Karena itu, keberadaan Rawa Kalong bisa menjadi destinasi yang menenangkan, juga menentramkan, sehingga banyak orang yang ingin berkunjung ke Situ tersebut. Apalagi setelah berita peresmian situ dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang sempat viral beberapa waktu lalu. Dan, dalam beberapa bulan terakhir, Situ Rawa Kalong menjadi buah bibir bagi masyarakat Depok pada khususnya dan Jawa barat pada umumnya.

Tiap hari ada saja ratusan orang yang berkunjung ke tempat tersebut. Jumlah itu akan meningkat puluhan kali lipat pada hari libur dan libur akhir pekan. Mengakibatkan



jalan menuju situ macet, dan pengunjung pun harus rela mengantri sebelum tiba di Situ Rawa Kalong.

“Sejak dulu, situ ini sebenarnya sudah ramai, pagi, siang, sore dan malam, selalu ada orang memancing. Situ ini baru sepi dari para pemancing saat hujan. Soalnya, pada saat turun hujan, di wilayah ini banyak sekali petir, membuat orang takut untuk memancing,” kata Mutohar yang tengah asik memerhatikan joran pancingnya.

Sejak pembangunan situ selesai, jumlah pengunjung yang hadir terus bertambah. Baik anak-anak mau pun orang tua. Mereka berasal dari berbagai daerah, kebanyakan berasal dari Depok dan sekitarnya. Keramaian yang terjadi di situ Rawa Kalong, menurut Mutohar, dimanfaatkan beberapa pedagang menjajakan dagangannya. Juga tukang parkir yang mengais rezeki di sana.

Panggung Apung

Pembangunan Situ Rawa Kalong berhasil menghadirkan kawasan situ yang lebih manusiawi. Ini terbukti dari keberadaannya yang mampu menarik antusias warga untuk mengunjunginya. Padahal, dulu sebelum direvitalisasi, Rawa Kalong dikenal sebagai tempat yang angker dan kumuh. Banyak sampah dan tanaman liar. Bahkan warga di sekitar situ dihantui ketakutan akan adanya hewan liar yang kadang masuk ke

pemukiman penduduk.

Tetapi kini, kesan tersebut sudah sirna, seiring selesainya pembangunan kawasan situ. Yang paling menyolok dari kondisi teranyar situ adalah hadirnya Panggung Apung. Panggung yang bisa digunakan, laiknya catwalk dalam peragaan busana. Sayangnya, sejak diresmikan beberapa waktu lalu, pintu gerbang Panggung Apung, itu selalu terkunci. Akibatnya, pengunjung tidak bisa menjajal sensasi berjalan di atas Panggung Apung. Dan, hanya bisa membuat-



nya sebagai latar belakang pengambilan foto.

Meski pintu menuju Situ Rawa Kalong selalu terkunci, pemandangan yang dihadirkan tetap menjadi daya tarik bagi pengunjung. Terlebih, karena kawasan tersebut benar-benar menyediakan fasilitas ruang publik yang bisa digunakan semua

orang untuk bersosialisasi. Seperti, gedung pertemuan, floating deck, vertical garden atau taman dinding, taman lansia, pedestrian, area UMKM, dan alun-alun kecil yang instagramable.

Melihat hasilnya, tidak berlebihan bila Pemprov Jawa Barat rela menganggarkan revitalisasi Rawa Kalong dengan biaya mencapai Rp. 20 miliar. Karena kasawan tersebut menjadi lebih berdaya guna dibanding sebelumnya. Bisa dipakai untuk tujuan wisata keluarga, berolahraga atau sekedar jalan-jalan dan berfoto-foto.

Namun, ada beberapa catatan harus diperhatikan agar kehadiran Rawa Kalong sebagai salah satu destinasi wisata di Depok bisa menjadi rujukan tempat melepas penat. Antara lain, minimnya tempat sampah dan belum beroperasinya toilet umum yang dibutuhkan pengunjung. Juga masih ada sampah yang perlu diantarkan dari kawasan pinggir danau yang dangkal.

Ini penting, agar pengunjung merasa lebih nyaman melaksanakan kegiatan wisata, maupun aktifitas lain di Situ Rawa Kalong. Apalagi setelah mereka berjalan-jalan melihat langsung kawasan Rawa Kalong. Termasuk melihat mural-mural lucu di sebagian dinding danau. Seperti gambar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang kerap dipakai sebagai back ground selfie. □

MBO

H. Muhammad Syafrudin S.T., M.M.

Anggota Pramuka di Pentas *Politik Nasional*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ANGGOTA Badan Sosialisasi MPR RI, H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M., asal dapil Nusa Tenggara Barat I — meliputi Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima dan Kota Bima — ini tak pilih-pilih teman bergaul. Di kompleks Parlemen, anggota MPR/DPR Fraksi PAN ini bisa bergaul dengan siapapun, mulai dari kalangan pimpinan hingga petugas keamanan dalam MPR/DPR.

Belum lama, wartawan Majalah Majelis, menjumpai lelaki berkulit putih berih, kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat, 6 Agustus 1968, ini sedang duduk santai di teras Sport Centre MPR/DPR/DPD RI. Mengenakan Tshirt, celana pendek, dan sepatu olahraga, Syafrudin sedang berbincang santai bersama beberapa orang anggota security Gedung MPR/DPR/DPD. Saat itu, Syafrudin menunggu koleganya yang sedang bermain boleh tepok.

Gaya memasyarakat yang dimiliki Syafrudin tak lepas dari pergaulannya yang luas. Ia pernah berhubungan dengan segala kelompok masyarakat. Mulai dari warga masyarakat yang kondisi

sosial ekonomi baik hingga kurang beruntung. Baik secara pribadi maupun kelompok tertentu. Salah satunya di Gerakan Pramuka.

Di Pramuka, Syafrudin pernah tercatat menjadi anggota Kwartir Nasional. Dia pernah mengikuti berbagai kegiatan perkemahan serta pelatihan. Dari tingkat siaga saat masih duduk di bangku sekolah dasar, lalu penggalang, pendega, dan pembina. Dan, dari situlah Syafrudin banyak menimba banyak pengalaman. Dan, berkat tempaan di Gerakan Pramuka itu pula membuat Syafrudin semakin luwes berhadapan dengan siapapun.

Selain itu, saat masih remaja atau duduk di bangku SLTA, Syafrudin sudah merantau ke Lampung, melanjutkan sekolahnya di sana. Kepindahannya dari Bima ke Lampung membuat Syafrudin mengenal budaya dan tata krama baru yang belum dikenal sebelumnya. Dan, itu membuat Syafrudin kian berpengalaman menghadapi berbagai kelompok masyarakat.

“Bisa dikatakan, Pramuka-lah yang paling besar jasanya menghantarkan saya menjadi anggota Legislatif. Karena, Pramuka



memberi banyak bekal bagi saya dalam menjalani kehidupan, lebih mandiri, disiplin, jiwa korsa, dan bertanggung jawab,” kata Syafrudin memulai perbincangannya dengan Majalah *Majelis* MPR RI beberapa waktu lalu.

Bungsu dari duabelas bersaudara pasangan H. Daeng Bukhari (Sulawesi Selatan) dan Siti A'isyah (Bima), Syafrudin selalu bersaing dan hidup di bawah tekanan saudara-saudaranya. Ia sering dipaksa menerima kenyataan hidup di bawah bayang-bayang saudara-saudaranya. Dan, itu memberinya pengertian bahwa hidup adalah perjuangan. Dan, untuk mencapai kehidupan yang bahagia, semua orang harus memperjuangkan cita-citanya.

Pelajaran kerasnya hidup, juga Syafrudin peroleh dari ayahnya, H. Daeng Bukhari. Ayahnya menjalankan disiplin sangat keras dalam

mendidik anak-anak. Selama tujuh hari dalam satu minggu, Syafrudin harus terus belajar, dan nyaris tak punya waktu buat bermain. Makanya, ia kerap terpaksa mencuri waktu untuk kabur dan bermain dengan teman-temannya, ketika sang ayah pergi menunaikan tugas.

“Kalau saya terlalu lama bermain, kemudian terlambat pulang dan ayah saya sudah berada di rumah, saya pasti dapat pukulan dari rotan. Dan, itu terjadi berkali-kali, yang akhirnya membuat saya sangat takut terhadap ayah, apalagi untuk melanggar aturan yang dibuatnya,” cerita Syafrudin lagi.

Bendungan Hilir

Bergulirnya era Reformasi pada 1998 adalah saat yang baik bagi H. Muhammad Syafrudin. Saat itu, ia bekerja di sebuah kantor yang



tak jauh dari Sekretariat DPP PAN, di bilangan Bendungan Hilir, Jakarta Selatan. Setiap hari Syafrudin melihat kesibukan dan hiruk-pikuk kegiatan DPP PAN. Sampai akhirnya Syafrudin bertekad untuk menjadi politisi dan anggota legislative dari Partai Amanat Nasional.

Dengan penuh semangat, Syafrudin mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh PAN. Ia juga semakin aktif pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan partai berlambang matahari itu. Namun, cita-cita untuk menjadi Anggota Fraksi PAN di DPR RI tidak semudah membalikkan telapak tangan. Buktinya, pada pelaksanaan Pemilu tahun 1999 Syafrudin belum berhasil mewujudkan mimpinya. Nasib serupa terulang lagi, saat Pemilu 2004 digelar. Tetapi, pengalaman membuatnya makin bersemangat. Syafrudin mengulangi usahanya pada Pemilu 2009, dan itu menjadi jembatan manis bagi dirinya menjadi anggota legislative.

“Sepuluh tahun berkecimpung dalam dunia politik dan dua kali gagal di pemilu membuat saya punya banyak pengalaman. Saya tidak berputus asa dan berusaha lebih keras lagi, sampai akhirnya pada 2009 mendapatkan hasil manis,” kata ayah dua putra hasil perkawinannya dengan Raden Ayi Rachmayani.

Keberhasilan Syafrudin memenangi Pemilu 2009 ditandai dengan perolehan suara sebesar 27.840 pemilih, dan menempatkannya di Komisi VII. Pada 2014, Syafrudin kembali memenangi Pileg setelah mengantongi dukungan pemilih sebesar 63.000 suara, dan mengantarnya menjadi anggota Komisi I. Jumlah perolehan suaranya kembali naik pada Pileg 2019 menjadi 66.907 suara dan mengantarnya menjadi anggota Komisi IV DPR RI.

Keberhasilan Kandidat Doktor Administradi Public di Universitas Brawijaya ini menambahkan, perolehan suaranya dari satu pileg ke pileg berikutnya, pertanda bahwa Syafrudin selalu berkontribusi di daerah pemilihannya. Yaitu, dapil Nusa Tenggara Barat I, meliputi Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Sumbawa, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Terbukti, diberbagai agenda, Syafrudin tak pernah lepas tangan dan senantiasa turut membangun Provinsi NTB.

“Kalau tidak mau berkontribusi bagi daerah akan sulit bagi kita untuk terpilih kembali. Apalagi sampai mendapat peningkatan perolehan suara yang banyak pada pelaksanaan pemilu,” kata Syarifuddin lagi.

Intinya, menurut Syafrudin, apapun cita-cita yang ingin diraih harus diperjuangkan dan bekerja keras. Pantang menyerah dan tidak berputus asa. Karena kegagaln adalah sukses yang tertunda.

Migor

Sebagai anggota Komsis IV, Syafrudin mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah terkait kebijakan masalah pangan, khususnya minyak goreng. Terbukti, lambat laun kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng bisa teratasi. Sehingga masyarakat tidak perlu mengantri untuk mendapatkan minyak goreng.

Penanganan sawit menjadi satu atap ditengarai menjadi jawaban penting terhadap kelangkaan minyak goreng. Yang jumlahnya



bisa terus dijaga dan pertahankan. Jangan sampai jumlahnya tidak ada kesesuaian antara catatan dengan realitas di lapangan.

“Jumlah penduduk kita sangat banyak, sehingga ketersediaan pangan selalu menjadi isu yang sensitif. Apalagi, ada oknum tertentu yang melakukan aksi ambil untung dengan cara-cara yang tidak benar. Karena itu, masyarakat harus tetap tenang, jangan panik dan jangan menimbun, karena hanya akan membuat suasana semakin panik,” kata Syafrudin.

Program Food Estate yang dijalankan pemerintah, kata Syafrudin, adalah upaya untuk menjaga stok pangan nasional. Jangan sampai seluruh kebutuhan pangan dilakukan dengan mekanisme impor, karena bisa berpengaruh besar dengan ketahanan pangan. Sayangnya, selama pandemi program tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan harga berbagai bahan pangan ikut terkerek naik.

Sebagai anggota DPR dapil Nusa Tenggara Barat I, Syafrudin juga mengapresiasi sukses pelaksanaan lomba moto GP di sirkuit Mandalika. Dia berharap, moto GP bisa menjadi kalender tahunan yang dilaksanakan secara rutin. Selain itu, keberadaan Mandalika juga harus mampu menjadi sirkuit yang digunakan untuk lomba-lomba yang lain.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

“Moto GP kemarin memberi dampak yang tidak kecil bagi pertumbuhan ekonomi NTB. Banyak UMKM yang mendapat keuntungan dari pelaksanaan moto GP tersebut. Semoga even itu bisa terus berlanjut, di samping even-even lainnya,” kata Syafrudin. □

MBO

Biodata

Nama : **H. Muhammad Syafrudin S.T., M.M.**
 Tempat tg. Lahir : Bima, Nusa Tenggara Barat, 6 Agustus 1968
 Daerah pemilihan : Nusa Tenggara Barat I

Riwayat Pendidikan:

SD Negeri 10 Bima (1975–1981)
 SMP Negeri 2 Bima (1981–1984)
 SMA Utama 3 Tanjung Karang (1984–1987)
 S-1 Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Lampung (1987–1997)
 S-2 Manajemen, Universitas Jayabaya (2010–2012)

Riwayat Organisasi:

- Ketua Badan Musyawarah Mahasiswa Teknik Universitas Muhammadiyah Lampung] (1990–1995)
- Ketua Dewan Kerja Pramuka Cabang Bandar Lampung (1993–1996)
- Sekretaris Dewan Kerja Daerah Lampung (1994–1998)
- Humas DPD PAN Jakarta Utara (1998–2003)
- Anggota Departemen Logistik DPP PAN (2000–2005)
- Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN (2010–2015)
- Andalan Nasional Humas Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (2014–2018)

Karier:

- Konsultan Asuransi Nabasa Life, Jakarta (1988–1989)
- Assistant Trading Manager PT Dega Kerabat Nitama, Jakarta (1989–1991)
- Bagian Umum Yayasan Mutiara Indonesia (1991–1993)
- Assistant Office Manager PT Inter Matrix Indonesia (1995–2000)
- Manager Operational PT Lasindo 2000 (2000–2002)
- Penyiar Radio Latin Rose (2002–2003)
- Direktur Tiga R Plus, Jakarta (2003–2010)
- Presiden Komisaris PT. Dopa Saka Buana, Jakarta (2009–sekarang)
- Komisaris PT Mitra Inti Prima, Jakarta (2011–sekarang)
- Anggota DPR-RI (2009–2014, 2014–2019, 2019–sekarang)

Geopolitik Indonesia Dalam Merespons Dinamika Global

DINAMIKA politik global dewasa ini menjadi salah satu aspek yang perlu diatensi secara serius oleh pemerintah. Pencapaian tujuan nasional di berbagai bidang sebagaimana termaktub dalam preambule UUD NRI Tahun 1945 tidak terlepas dari lingkungan strategis regional dan global yang memengaruhi. Tidak dimungkiri bahwa meskipun sistem internasional bersifat multipolar, kecenderungan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, kelompok Uni Eropa, Rusia, dan Tiongkok yang menjalankan perang proksi dan perebutan pengaruh di berbagai kawasan dunia akan secara langsung dan tidak langsung memengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Oleh sebab itu, prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pedoman Indonesia di kancah politik global harus dipertajam menjadi strategi geopolitik yang bersifat taktis dan komprehensif bagi pemenuhan kepentingan nasional.

Rivalitas AS dan Tiongkok

Salah satu dinamika politik global yang paling mencolok saat ini adalah pertarungan kekuasaan dan perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo Pasifik. Rivalitas keduanya berada pada sedikitnya empat dimensi, yakni: teknologi, investasi, infrastruktur, dan keamanan. Sebagai kekuatan baru dunia (*emerging force*), Tiongkok menjalankan kebijakan *Belt Road Initiative* di Asia Pasifik dan menjual konsep ekonomi Tiongkok di forum *United Nations General Assembly* yang menyasar negara-negara berpenghasilan rendah di kawasan. Kebijakan ini diharapkan dapat menggerus pengaruh Amerika Serikat melalui kebijakannya yang disebut sebagai *Global Development Initiative* yang dianggap gagal dalam membangun negara-negara berkembang di kawasan.

Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemon eksisting di kawasan tentu tidak tinggal diam melihat agresivitas Tiongkok. Guna menandingi *Belt Road Initiative* Tiongkok, Amerika Serikat

mencanangkan kebijakan *Blue Dot Network* pada 2019, disusul dengan kebijakan *Build Back Better World* pada 2021. Melalui dua kebijakan tersebut, Amerika Serikat menjanjikan kepada negara-negara di kawasan Indo Pasifik untuk memberikan investasi secara langsung dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang berbasis luas. Amerika Serikat juga berjanji untuk mewujudkan kawasan Indo Pasifik yang tangguh di bawah kepemimpinannya, terutama dalam memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara kawasan.

Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo Pasifik ini pada dasarnya menimbulkan banyak efek. Kecenderungan yang terjadi adalah munculnya perang proksi di antara kedua negara yang membagi negara-negara kawasan ke dalam kelompok-kelompok dan aliansi-aliansi tertentu. Muncul blok *AUKUS* sebagai bentuk kerja sama antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Muncul blok *QUAD* sebagai bentuk kerja sama empat negara, antara Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan India. Tiongkok juga tidak mau ketinggalan. Bersama dengan sekutu ideologisnya, yakni Rusia, Tiongkok membentuk kelompok *SCO* yang merangkul negara-negara Asia Tengah, seperti Kazakstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan, termasuk juga India di dalamnya. Yang menarik dari kerja sama tersebut, keanggotaan masing-masing negara tidak hitam putih. Sebagai contoh, India ada dalam forum *QUAD* yang dimotori Amerika Serikat, tapi juga ada di forum *SCO* yang dimotori Tiongkok dan Rusia. Sangat jelas tergambar bahwa dalam belenggu rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, negara-negara kawasan tetap berpegang pada kepentingan nasionalnya sebagai haluan utama.

Perang Rusia dan Ukraina

Selain rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di Indo Pasifik, dinamika politik global lainnya yang cukup mencolok dan patut dicermati adalah perang fisik antara Rusia dan Ukraina. Perang di antara kedua negara meletus pada Februari lalu yang menjadi puncak

Oleh:
Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A
Wakil Ketua MPR RI



konflik di antara kedua negara sejak 2014. Adapun motif yang diusung oleh Rusia terkait invasi ke Ukraina adalah menolak keanggotaan Ukraina ke dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (*NATO*) yang dapat mengancam keamanan nasional Rusia, serta tuduhan bahwa Ukraina saat ini dikuasai oleh kelompok neo-Nazisme yang anti terhadap Rusia. Perang di antara kedua negara yang masih berlangsung saat ini menimbulkan banyak implikasi.

Invasi Rusia ke Ukraina berdampak pada perpindahan sepertiga penduduk Ukraina untuk menghindari dampak perang, jutaan penduduk Ukraina meninggalkan negaranya, serta kerusakan materiil yang luar biasa di Ukraina. Selain itu, dampak skala global yang muncul dari perang ini adalah krisis energi global dalam hal mana harga minyak bumi dan gas alam menjadi sangat fluktuatif dan tidak stabil. Rusia yang menjadi pemasok energi utama di Eropa suka tidak suka terpaksa memainkan politik energi sebagai respons atas sanksi keras yang mereka terima dari negara-negara Eropa.

Strategi Indonesia

Situasi politik global yang bergejolak saat ini pada dasarnya bukanlah sebuah kondisi yang terpisah dari lingkungan strategis nasional Indonesia, melainkan saling terkait dan berpengaruh satu sama lain. Ada banyak kepentingan nasional Indonesia, baik yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang yang terpengaruh dan dipengaruhi oleh dinamika-dinamika tersebut. Sebagai contoh, strategi pemulihan ekonomi nasional Indonesia sangat tergantung dari besaran investasi asing yang masuk untuk menggerakkan perekonomian nasional. Jika situasi politik global tidak stabil, maka probabilitas masuknya investasi asing ke dalam negeri akan mengecil.

Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok melalui perang pengaruhnya, tentunya akan menguji komitmen Indonesia untuk menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan

pengarusutamaan *ASEAN* dalam menghadapi dinamika regional Asia Tenggara. Selain itu, perang Rusia dan Ukraina akan menjadi ujian bagi Indonesia dalam menjalankan presidensi *G-20* tahun ini di tengah kerasnya penolakan terhadap Rusia dari negara-negara anggota.

Geopolitik adalah kejelian dan kecermatan sebuah negara dalam memandang situasi dan kondisi geografisnya, menganalisis ancaman sekaligus peluang yang ditimbulkan dari lingkungan geografis tersebut. Dalam merespons dinamika politik global yang tidak ramah saat ini, Indonesia harus berlaku cermat dan waspada. *Pertama*, kepentingan nasional selalu menjadi acuan dalam praktik diplomasi di forum global. Namun demikian, kepentingan nasional ini diupayakan dapat tercapai melalui mekanisme yang kolaboratif dengan negara manapun dan tidak didikte oleh konflik yang ada.

Kedua, berbagai forum strategis yang ada, khususnya presidensi *G-20*, harus benar-benar dioptimalkan untuk mendukung pembangunan nasional, fisik maupun non-fisik. Hal ini tidak terlepas dari dimensi ekonomi dan keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh forum ini. *Ketiga*, di tengah menjamurnya berbagai aliansi dan kerja sama regional di kawasan Asia Pasifik, secara geopolitik, Indonesia disarankan tetap mengarusutamakan mekanisme kerja sama *ASEAN*. Prinsipnya sederhana, kawasan Asia Tenggara yang stabil akan berdampak positif bagi lingkungan dalam negeri Indonesia yang stabil.

Keempat, penguatan pada aspek-aspek yang menjadi keunggulan komparatif Indonesia, seperti penguasaan energi. Potensi sumber daya energi harus lebih dioptimalkan di tengah kelangkaan energi dan perubahan iklim yang melanda seluruh dunia. Terakhir, mewujudkan kondusivitas di dalam negeri sebagai modal dasar, khususnya situasi politik dan keamanan yang terkendali dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi lembaga yang ada. □

Kalimatun Sawa **Antara** Golongan Islam dan Kebangsaan

Buku yang menceritakan proses lahirnya Pancasila ditulis oleh Ahmad Basarah. Buku berjudul: *Bung Karno, Islam, dan Pancasila* ini tidak hanya menjelaskan bagaimana Pancasila hadir, namun juga meluruskan sejarah perjalanan politik dan hidup Bung Karno yang dibengkokkan dalam masa Orde Baru. Pancasila disebut oleh Ahmad Basarah sebagai kalimatun sawa atau titik temu antara Golongan Islam dan Kebangsaan.

KETIKA dibentuk badan, panitia, dan tim kecil untuk mempersiapkan kemerdekaan, dasar, dan konstitusi negara, maka di sana terjadi perdebatan sengit dari berbagai kelompok dan golongan, terutama dari kelompok Islam dan Kebangsaan, ada pula yang menyebut Nasionalis Religius dan Nasionalis Sekuler. Akhir dari perdebatan tersebut terjadi titik temu yakni pada Pancasila.

Untuk menuju titik temu tersebut terjadi proses dialektika dan keikhlasan yang lebih mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan dan pribadi. Proses untuk mengetahui bagaimana kedua kelompok besar itu bisa sepakat pada Pancasila, hal ini dapat ditelusuri dari buku yang berjudul: *Bung Karno, Islam, Dan Pancasila*.

Buku yang ditulis oleh Wakil Ketua MPR, Dr. Ahmad Basarah, itu mengupas dan menjelaskan bagaimana proses lahirnya Pancasila hingga diterimanya oleh seluruh kelompok dan golongan yang ada di Indonesia. Buku yang terbagi dalam 7 bab itu memiliki ketebalan xxxv + 212 halaman. Bab I diawali dengan kupasan mengenai *Bung Karno dan Islam*. Dilanjutkan Bab II dengan judul *Proses Sejarah Perumusan Pancasila* hingga Bab VII yang berjudul *Penjabaran Sila-Sila Pancasila*.

Ahmad Basarah berharap, buku yang covernya bergambar Bung Karno itu mampu memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi dunia pendidikan Indonesia. Khususnya, dalam memahami dan meletakkan kembali perspektif sejarah tentang pemikiran Bung Karno, Islam, dan Pancasila, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu juga berharap, buku yang dicetak oleh Konstitusi Press dapat menjadi *kalimatun sawa* atau titik temu di antara pandangan Golongan Islam dan Kebangsaan dalam memahami dan menerima, serta melaksanakan Pancasila yang telah final ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara.

Dalam prolog dikatakan, salah satu pekerjaan rumah para pemimpin bangsa Indonesia saat ini adalah menjelaskan dengan objektif dan jernih sejarah perjuangan para pendiri negara, khususnya tokoh-tokoh pembentuk Pancasila. Tokoh-tokoh bangsa yang terkait langsung dalam pembentukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut adalah mereka yang terlibat dalam anggota sidang PPKI,

BPUPKI, Panitia Delapan, dan Panitia Sembilan, terutama sosok dan pemikiran Bung Karno yang telah memainkan peran penting dalam konteks sejarah.

Pria yang pernah kuliah di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), Jakarta, dalam buku meluruskan perjalanan hidup dan politik Bung Karno yang selama Orde Baru telah disingkirkan. Dalam lanjutan prolog, dikatakan tulisan atau karya ilmiah apapun yang memaparkan dan menjelaskan tentang karya pemikiran serta sumbangsih Bung Karno kepada bangsa dan negara, termasuk peran sentralnya dalam

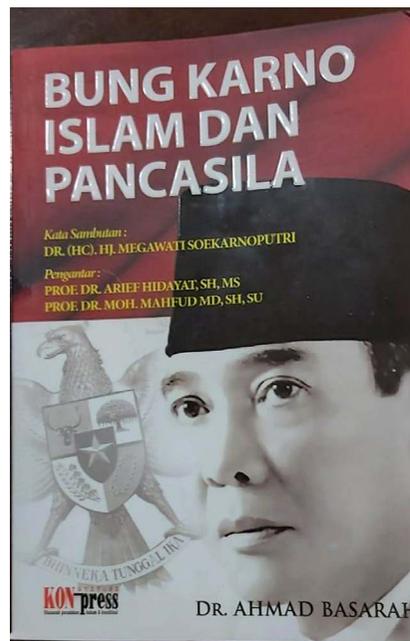
melahirkan Pancasila sebagai dasar negara tidak akan dapat diterima begitu saja oleh masyarakat luas tanpa terlebih dahulu mengajak kepada semua pihak untuk menjernihkan pikiran dan menghilangkan skeptisisme terhadap siapa, apa, dan bagaimana sesungguhnya sosok dan pemikiran Bung Karno.

Buku yang ada semakin mempunyai makna ketika Presiden Megawati Soekarnoputri memberi sambutan. Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., MS; dan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD SH., SU; juga memberi pengantar. Dalam sambutan, Megawati menyebut buku yang ada hadir pada momentum yang tepat menggambarkan keseluruhan "kontemplasi" Bung Karno sebagai sosok pemimpin yang terus menyintesis Islam dan Kebangsaan dalam seluruh pemikiran Bung Karno hingga lahir Pancasila yang digalinya dari bumi Indonesia.

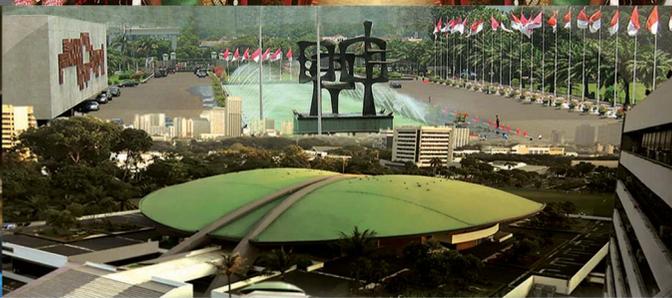
Pemahaman yang begitu kuat terhadap Islam menjadikan nilai-nilai ketuhanan menyatu dengan nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan bertujuan menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan sosial dalam semangat gotong royong sebagai kepribadian khas bangsa Indonesia.

Dalam pengantar, Mahfud MD menuturkan, tidak tepat jika dikatakan Bung Karno itu seorang penganut sekularisme, apalagi sampai ada yang mengatakan anti pada ide tentang hubungan antara negara dan agama, terutama Islam. Lebih lanjut dikatakan, sejauh dan sependek pengetahuan dirinya, justru Bung Karno berhasil membangun persenyawaan yang harmonis antara negara dan agama di dalam dasar dan ideologi negara Pancasila. □

AWG







MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

